BADAN POM RI
BBPOM DI MAKASSAR

LAPORAN KINERJA INTERIM BBPOM DI MAKASSAR TRIWULAN III TAHUN 2021

Rencana Kerja dan Anggaran

Capaian Kinerja Organisasi

Realisasi Anggaran

Evaluasi Internal

Redesai Sistem Perencnanaan dan penganggaran

Kata Pengantar

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Makassar Triwulan III Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Memasuki Triwulan III Tahun 2021, pandemi COVID-19 yang berawal dari Kota Wuhan, masih terus berlanjut,. Permasalahan pandemi COVID-19 bukan hanya permasalahan kesehatan yang pelik, tapi telah berkembang menjadi permasalahan ekonomi dan sosial yang krusial. Sejalan dengan Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021, kebijakan belanja Badan POM diarahkan untuk menjadi momentum transisi menuju adaptasi kebiasaan baru secara bertahap. Selain itu kebijakan harus menjadi instrumen untuk menyelesaikan permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial yang dihadapi Indonesia pasca pandemi COVID-19 kebijakan belanja Badan POM TA 2021 diarahkan antara lain untuk peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Badan POM

dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, serta pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peningkatan kualitas pelayanan publik dengan melakukan penguatan pengawasan premarket dan post-market obat dan makanan yang komprehensif berbasis risiko. Juga peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan melalui penguatan koordinasi pengawasan obat dan makanan dari hulu ke hilir, peningkatan efektivitas penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Balai Besar POM di Makassar menyusun Laporan Kinerja interim Triwulan III tahun 2021. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, efisiensi, inovasi, dan achievement Balai Besar POM di Makassar. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Triwulan III tahun 2021, Balai Besar POM di Makassar mencapai Nilai Kinerja Organisasi sebesar 74,93.

Hasil pengukuran kinerja ini diharapkan dapat digunakan dalam monitoring dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan selama Triwulan III tahun 2021.

Disamping itu, laporan ini berfungsi sebagai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* sesuai Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, juga sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi serta sebagai sarana evaluasi mandiri (Self evaluation) atas pencapaian Kinerja BBPOM di Makassar dalam upaya penyempurnaan kinerja pelaksanaan kegiatan Triwulan III Tahun 2021 yang merupakan tahun kedua setelah berakhirnya Rencana Strategis BBPOM di Makassar periode 2015 – 2019. Penyusunan dokumen ini mengacu pada hasil capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Triwulan III Tahun 2021 berdasarkan Rencana Strategi BBPOM Makassar 2020-2024, terutama dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan kegiatan di triwulan berjalan dan secara umum untuk tahun mendatang

Semoga kerja sama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan upaya Balai Besar POM di Makassar meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik lagi.

Tentunya diharapkan melalui kerja sama yang baik ini, akan mewujudkan Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

Terima kasih kepada seluruh jajaran Balai Besar POM di Makassar, khususnya pada para pegawai yang ada di garda terdepan. Terus jaga integritas dan profesionalisme, dan terus lakukan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak) dan 3T (tracing, testing, dan treatment).

Tetap nyalakan semangat untuk berbuat terbaik bagi bangsa kita dan mari kita kawal Obat dan Makanan aman, bermutu di provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2021 ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Besar POM di Makassar, dan umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja, serta dapat menjadi gambaran bagi generasi mendatang tentang bagaimana Balai Besar POM dalam berkarya dan berkinerja dalam masa pandemi ini.

.

Makassar, 20 Oktober 2021

K e p a l a

Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM

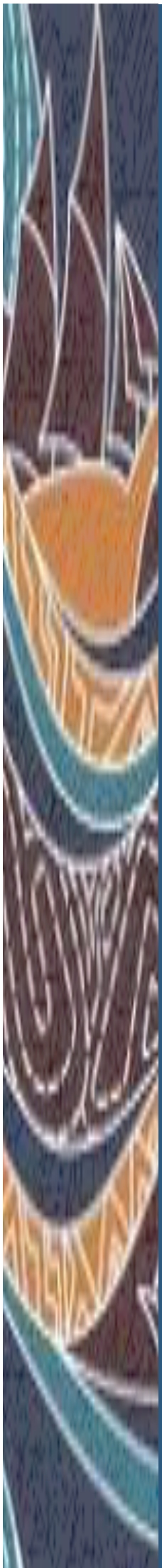

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Makassar Triwulan III Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berfungsi untuk menerjemahkan keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik *(good governance)*

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Tahun 2021 memuat informasi tentang Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang mengacu pada Renstra BBPOM Makassar 2020-2024, Pengukuran Kinerja tahun 2021,

Pengukuran Kinerja Kegiatan tahun 2021, Pengukuran efisiensi kegiatan tahun 2021. Terdapat 11 sasaran Strategis dengan 28 indikator kinerja Utama yang harus dicapai Balai Besar POM di Makassar selama tahun 2021 dimana frekuensi target dan capaian indikator kinerja ada yang triwulanan dan tahunan.

Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 28 indikator kinerja Utama, dimana dari 11 sasaran strategis baru 7 sasaran strategis yang dapat dievaluasi capaiannya sedangkan 6 sasaran strategis lainnya ditargetkan serta nilai capainnya pada akhir tahun 2021. Hal yang sama terhadap 28 Indikator kinerja utama 17 IKU yang dapat dinilai pada Triwulan III Tahun 2021 sedangkan sisanya 11 IKU lainnya ditargetkan pada akhir Tahun 2021. Dari 17 IKU ini semuanya merupakan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar

Capaian kinerja pada laporan ini merupakan capaian kinerja Balai Besar POM di Makassar hingga Triwulan III Tahun 2021. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, seluruh sasaran kegiatan yang capaiannya dapat dihitung pada Triwulan III Tahun 2021.

pada *Stekholders Perspective* pada sasaran pertama sampai dengan ketiga yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar 101,63; dimana tiga sasaran strategis pada perspektif ini hanya sasaran strategis satu yang memiliki target di Triwulan III Tahun 2021 bearada pada kategori **Baik**

Persepctive *Internal Proses* Sasaran strategis keempat yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar dan Sasaran strategis keenam " Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar" berada pada kategori Tidak Dapat disimpulkan dengan nilai masing-masing yaitu 120,20 dan 178,60; sasaran strategis kelima yaitu Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar berada pada kategori Baik yaitu dengan nilai 106,49; Sasaran strategis Sasaran strategis ketujuh "Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar" , kategori Sangat baik dengan nilai 116,26.

Pada learning and growth perspective terdapat empat sasaran strategis dan hanya dua sasaran strategis yaitu sasaran strategis kesepuluh dengan nilai 87,50 kategori **cukup** dan kesebelas "Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel' dengan nilai 101,09 kategori **Baik** "sedangkan sasaran strategis delapan, dan Sembilan penilaiannya pada akhir tahun 2021.

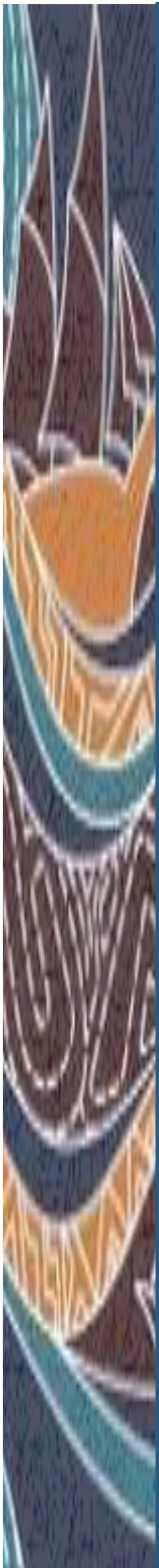

Bab I

Pendahuluan

a. Latar Belakang
b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
c. Aspek Strategis
d. Isu Strategis

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Makassar berkomitmen melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua yang penuh tantangan, tidak hanya di bidang ekonomi, namun di seluruh aspek kehidupan. Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang awalnya merupakan permasalahan kesehatan, secara cepat merambat menjadi pemicu permasalahan ekonomi dan sosial. Sejak Tahun 2020 hingga Tahun 2021 TW II juga merupakan tahun kedua masa Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2020-2024 yang memiliki visi Presiden "Terwujudnya indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut dalam 7 Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2020- 2024.

Pencapaian visi Presiden tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024. Dukungan Balai Besar POM di Makassar terhadap 7 Agenda Pembangunan sesuai RPJMN periode 2020-2024 dituangkan dalam Rencana strategis (Renstra) Balai Besar POM di Makassar

Badan POM mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya diwilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Besar POM di Makassar dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

"Belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda ekonomi, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 harus segera dimanfaatkan dan dibelanjakan. Lakukan lelang sedini mungkin di bulan Desember 2020 setelah DIPA diserahkan sehingga bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I tahun 2021," pesan Presiden Joko Widodo. Presiden menginstruksikan agar pemerintah bekerja lebih cepat karena dalam kondisi krisis, semangat harus berbeda menjadi extraordinary agar program stimulus berdampak dan berdaya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi. "Lakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakkan ekonomi nasional dan daerah sehingga bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I tahun 2021, Sesuai arahan Presiden dengan memanfaatkan APBN secara cermat, efektif, dan tepat sasaran. Seluruh rupiah yang ada di APBN harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, Presiden juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penggunaan anggaran untuk memecahkan masalah dan membantu rakyat, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, sebagai bagian integral pelaksanaan APBN.

Sesuai dengan arahan presiden tersebut, Badan POM memastikan DIPA Badan POM sangat mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional, dan Badan POM akan terus mengawal implementasinya, dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Maju.

Pada TA 2021, Badan POM memiliki 16 Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) pada Satker pusat dan 9 proyek Prioritas Nasional pada lingkup Balai Besar/Balai POM termasuk BBPOM di Makassar sebagai salah satu UPT dari Badan POM. Kepala Balai Besar POM di Makassar berkomitmen untuk mengawal seluruh pelaksanaan kegiatan di terutama Pro-PN, baik realisasi anggaran dan fisik maupun kemajuan pencapaian target serta memastikan agar hingga triwulan ke IV kinerja Pro-PN mencapai target, sesuai dengan Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2021.

Dalam pelaksanaan APBN 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan kondisi kegentingan, seperti dampak sosial, dampak ekonomi yang besar dan risiko gangguan stabilitas pada sistem keuangan, sehingga diperlukan langkah cepat dan antisipasif.
Balai Besar POM di Makassar sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Interim di Balai Besar POM Makassar Triwulan II Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Besar POM di Makassar atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Triwulan II Tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Balai Besar POM Makassar. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Balai Besar POM Makassar, serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Balai Besar POM Makassar.

Selain itu, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. 02.01.1.2.12.20.1150. tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Balai Besar POM di Makassar menyelenggarakan uraian fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi meliputi pengujian rutin dan dalam rangka investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pengujian yang terdiri atas:

a. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Kimia;

b. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Mikrobiologi; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemeriksaan meliputi inspeksi fasilitas produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi, sampling serta pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan yang terdiri atas:

a. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Kimia;

b. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Mikrobiologi; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber pada wilayah kerja masing-masing. Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penindakan.

4. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing.

5. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;

c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;

d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;

e. pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;

f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;

g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Pengelompokan uraian fungsi Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subkelompok substansi program dan evaluasi;

b. Subkelompok substansi umum; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi

Balai Besar POM di Makassar

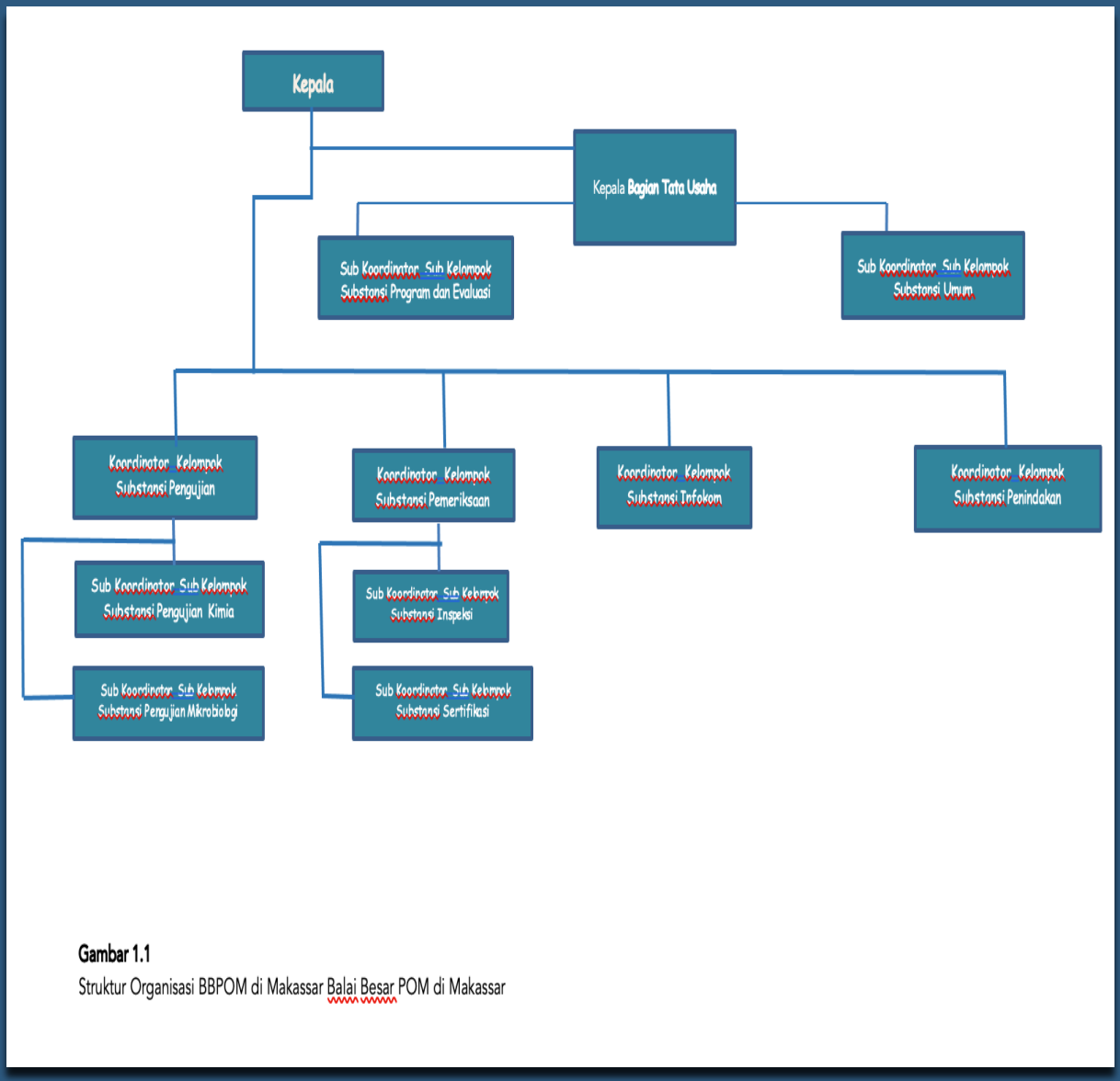

Gambar 1.1
Struktur Organisasi BBPOM di Makassar Balai Besar POM di Makassar

C. Isu Strategis

Agar pengawasan Obat dan Makanan menjadi lebih tajam, terarah dan mendalam, arah kebijakan dan strategi tersebut harus dijabarkan pada perencanaan tahunan secara lebih terperinci dengan penekanan sesuai isu nasional terkini (penjabaran tahunan Nawacita) dan atau mengacu alternatif penekanan untuk periode Tahun 2019 yaitu **"Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program (Renstra 2015- 2019) dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya".**

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional saat ini telah disusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke IV tahun 2020-2024. Terdapat 4 (empat) pilar pada RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut adalah: .

Gambar 1.2 Empat Pilar pada RPJMN ke IV tahun 2020-2024

Pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024 yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin Pemertaan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

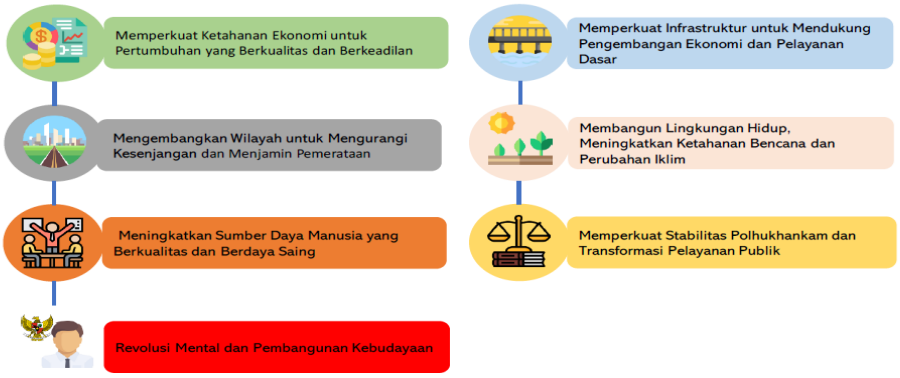

Gambar 1.3 Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV 2020-2024

Sumber: RPJMN 2020-2024

Pengawasan Obat dan Makanan terkait pada agenda pembangunan ke-3 yaitu: **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**. Pada agenda pembangunan ke-3 dijelaskan bahwa lingkungan dan isu strategis yang relevan dengan pengawasan Obat dan Makanan adalah **Pemenuhan Layanan Dasar.** Dengan isu strategis yang dihadapi adalah:

- Sistem rujukan pelayanan kesehatan belum optimal dilihat dari banyaknya antrian pasien. Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta belum mampu secara maksimal berperan sebagai *gate keeper.*
- Kekosongan obat dan vaksin serta penggunaan obat yang tidak rasional masih terjadi, ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku sediaan farmasi dan alat kesehatan, **serta sistem pengawasan obat dan makanan belum optimal**.
- Ketimpangan kinerja sistem kesehatan antar wilayah juga masih tinggi misalnya cakupan imunisasi yang rendah di Indonesia bagian timur. Fasilitas kesehatan terakreditasi dan tenaga kesehatan menumpuk di Jawa-Bali dan daerah perkotaan.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang belum optimal menjadi fokus penting dalam RPJMN 2020-2024 kaitannya dengan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, Badan POM sebagai koordinator pengawasan obat dan makanan sudah seharusnya mampu meningkatkan peran semaksimal mungkin. Untuk optimalnya fungsi pengawasan dan perkuatan peran dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak dijamin mutu dan keamanannya sangat dibutuhkan Undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan.Adanya regulasi dapat memberikan perkuatan pada legal aspek sehingga meningkatkan "kewibawaan" pengawasan.

Sasaran, indikator, serta target BPOM dalam mendukung isu strategis ini adalah

Tabel 1.1

Indikator Terkait Pengawasan Obat dan Makanan dalam RPJMN 2020-2024

No	Indikator	Status Awal	Target 2024
1	Persentase obat yang memenuhi syarat	80,8	92.3
2	Persentase makanan yang berkualitas	78	86

(Sumber: RPJMN 2020-2024)

Isu "**Pemenuhan Layanan Dasar**" dijabarkan dalam kebijakan dan strategi, yaitu: **Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta**. Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan ini adalah: **Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan**, mencakup: **pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan serta peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan**.

Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan pre dan post market obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguji serta pemenuhan sarana prasarana laboratorium; peningkatan kemampuan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan.

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan:

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan Pemangku Kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan;
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* obat dan makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik;
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sector terkait;
6. Penguatan Penindakan kejahatan Obat dan Makanan termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan ;
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Gambar 1.4. Arah Kebijakan BPOM 2020-2024

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:

Gambar 1.5. Strategi BPOM 2020-2024

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/ infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijaan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBPOM DI MAKASSAR

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan, adapun arah kebijakan BBPOM di Makassar yang akan dilaksanakan antara lain :

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan:

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat Sulawesi Selatan dalam pengawasan Obat dan Makanan
2. Peningkatan kapasitas SDM dan Pemangku Kepentingan kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKN di Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya peningkatan keamanan, dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan;
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* obat dan makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik di Provinsi Sulawesi Selatan
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait di Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Penguatan Penindakan kejahatan Obat dan Makanan termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan ;
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BBPOM di Makassar melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Penguatan peengelolaan SDM, sarana prasarana/ infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Selatan
4. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Makassar.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor Pusat maupun Daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, riset, kajian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Makassar termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BBPOM di Makassar melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat.

Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu:

a. Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.

b. Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.

c. Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.

2. **Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.**

   Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan BBPOM di Makassar mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

   a. Manajemen SDM yang harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai. Pengelolaan SDM berdasarkan sistem manajemen mutu implementasi ISO 9001 : 2019 berbasis kinerja.

   b. Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian terakreditasi yang mendukung kualitas pengujian obat dan makanan yang mampu telusur dengan hasil uji terjamin validitasnya. Sistem manajemen mutu Laboratorium yang handal dengan implementasi ISO 17025 : 2018 secara konsisten pada semua proses yang dilakukan.

   c. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh BBPOM di Makassar, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, BBPOM di Makassar harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

3. **Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.**

   Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk mendorong pelaku usaha agar terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:

   a. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kepasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

   b. Selain dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, BBPOM di Makassar juga tentunya Mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM.

4. **Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh BBPOM di Makassar.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses *full spectrum* secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
2) Pengujian Secara Laboratorium;
3) Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Pengawasan obat dan makanan oleh unit pusat yang memiliki fungsi regulator dan *steering*, dan dilaksanakan oleh BBPOM di Makassar dan Loka POM Palopo), untuk itu perlu selalu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini ditujukan agar BBPOM di Makassar dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

5. **Penguatan kemitraan dengan lintas sektor pusat maupun darah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.**

Strategi ini merupakan upaya BBPOM di Makassar dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan sangat terkait dengan lintas sector baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi ini mencakup beberapa upaya antara lain:

a. Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan antara pusat dan daerah mulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring, dan advokasi pengawasan secara terpadu.

b. Meningkatkan dan memanfaatkan *networking* yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

c. Koordinasi pengawasan bersama pemerintah daerah dan lintas sector terkait yang berperan dalam penerapan Inpres no.3 tahun 2017 tentang peningkatan efektifitas pengawasan keamanan obat dan makanan.

d. Tindaklanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati.

6. **Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.**

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan.

Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

a. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.

b. Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.

c. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan BBPOM di Makassar dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.
Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BBPOM di Makassar harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

7. Penguatan pengujian, riset, kajian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut BBPOM di Makassar harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada:

a. Peningkatan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.
b. Dukungan analisis/kajian kebijakan yang tepat dan mampu menangkap perubahan lingkungan strategis untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh BPOM memiliki kualitas yang baik.
c. Pengujian yang andal diharapkan BPOM akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).
d. Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal *database* pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum *up to date*. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Makassar termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik BPOM, hal ini sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses BPOM secara keseluruhan *(continuous improvement).*

b. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik.

c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara otpimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

Agar pelaksanaan Renstra BBPOM di Makassar 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 1.6

Roadmap Strategi BBPOM di Makassar 2020-2024

- Tahun 2021:

Peningkatan integrasi pengawasan premarket-postmarket termasuk penegakan hukum, pusat-balai, fungsionalisasi UPT (pemenuhan people, process, infrastructure), serta pembenahan database pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal.

BBPOM di Makassar dalam rangka pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar melakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi serta kondisi-kondisi elemen eksternal menggunakan analisis SWOT Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman). Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Identifikasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), kesempatan (opportunities), dan ancaman (threats) telah memberikan pandangan bagi BBPOM di Makassar terkait permasalahan yang timbul dari keadaan lingkungan dalam dan luar BBPOM di Makassar tertuang dalam tabel berikut ini:

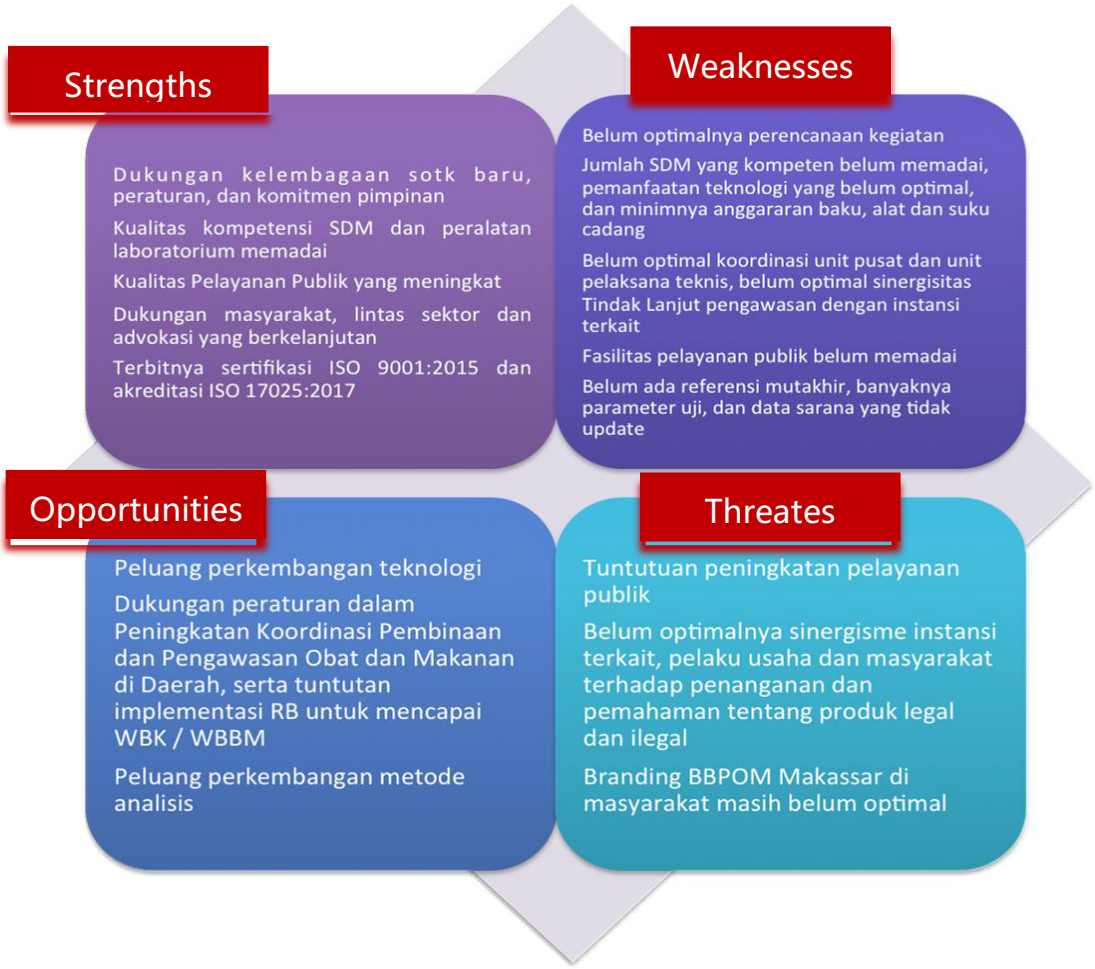

Gambar 1.7. Hasil Analisis SWOT

ASPEK STRATEGI ORGANISASI

INTERNAL

Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang dimiliki BBPOM di Makassar untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan per November 2020 adalah sejumlah 125 orang yang tersebar di Bagian, Sub Bagian, Bidang dan Seksi Balai Besar POM di Makassar. Sedangkan jumlah SDM di Loka POM di Kota Palopo adalah sebanyak 16 orang. Jumlah SDM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM di Makassar telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja.

Tabel 1.2

Profil Pegawai BBPOM di Makassar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

BBPOM DI MAKASSAR			LOKA POM DI KOTA PALOPO		
Tingkat Pendidikan	**Jumlah**	**Persentase**	**Tingkat Pendidikan**	**Jumlah**	**Persentase**
Non Sarjana	16	12,80 %	Non Sarjana	1	6,25 %
S1	39	31,20 %	S1	15	93,75%
Profesi	50	40 %	Profesi	6	%
• **Apoteker**	**50**	40 %	• **Apoteker**	**6**	%
• **Non Apoteker**		0 %	• **Non Apoteker**	**9**	0 %
S2	20	16 %	S2	1	0 %
S3	0	0%	S3	0	0%
Total	**125**	**100 %**	**Total**	**16**	**100 %**

*Keterangan: data SIAP per November 2019

BBPOM di Makassar harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir(*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah Sulawesi Selatan. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Sarana Prasarana

BBPOM di Makassar memiliki 4 (empat) gedung bangunan dengan total luas bangunan sebesar 4.929 m2 diatas total luas tanah 19.662 m

Sarana Transportasi

BBPOM di Makassar untuk memenuhi kebutuhan operasional kegiatan didukung sarana transportasi sebanyak, 6 unit mobil operasional, 3 unit mobil laboratorium keliling dan 1 unit mobil increnator

Sarana Komunikasi

(Instagram BBPOM di Makassar (@bbpom_makassar), Twitter BBPOM di Makassar (@BBPOM_Makassar), Facebook BBPOM di Makassar (@Bbpom Makassar), Youtube BBPOM di Makassar (BBPOM di Makassar), Whatsapp Grup (0852 11111 533), 0411-871115

Anggaran

Sesuai Surat Pengesahan DIPA No. SP DIPA - 063.01.2.432923/2020, Pagu anggaran pada DIPA awal yang diterbitkan per 12 Nopember 2019 sebesar Rp. 50.047.323.000,-. Namun terdapat revisi DIPA pertama tanggal 02 Maret 2020 dalam rangka penambahan anggaran untuk kegiatan KIE sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 50.544.323.000 kemudian Pada Tanggal 30 April terbit Revisi DIPA kedua Rp. 44.216.042.000 dalam rangka refocussing penanggulangan covid 19, selanjutnya revisi anggaran revisi DIPA keempat tanggal 13 Oktober 2020 dalam rangka penambahan anggaran pada output 3165.088 KIE Obat dan Makanan Aman menggunakan Pola baru sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 45.992.042.000.

EKSTERNAL

KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

Wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten/kota dan 1 Loka POM yaitu Loka POM di Kota Palopo (7 kabupaten/kota) yang dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Makassar.

Isu Strategis

Eksistensi sebuah instansi bergantung sejauh mana instansi tersebut mampu mengidentifikasi dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu Strategis yang melingkupi kinerja BBPOM di Makassar pada tahun 2020, antara lain sebagai berikut :

1. Dukungan Visi-Misi Presiden (Pangan PJAS, Desa, Pasar)

BBPOM di Makassar berperan dalam upaya pencegahan penyakit tidak menular dan penurunan angka stunting. Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA) yang diinisiasi Badan POM sebagai penjabaran dari Instruksi Presiden No 1 tahun 2017 terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
Germas SAPA dilakukan melalui kegiatan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dan Gerakan Pasar aman (Paman).

2. Dukungan Terhadap UMKM

Jumlah UMKM di Sulawesi Selatan mencapai 916.232 unit (Bapedda Pemprov Makassar tahun 2019). Pada tahun 2020, BBPOM di Makassar melakukan bimbingan teknis dan pendampingan terhadap pelaku usaha Obat Tradisional dan bimbingan teknis e- registrasi pangan olahan, dengan output antara lain menerbitkan 12 NIE pangan olahan dari UMKM pangan di BBPOM di Makassar.

3. Penegakan Hukum Dan Pengawasan Obat Dan Makanan Di Makassar

Sebagai kota Daeng juga sebagai kota jalur perdagangangan dan transit antar propinsi juga sebagai kota pelajar untuk Kawasan bagian timur Indonesia, Makassar memiliki populasi dengan latar belakang yang beragam diantaranya golongan mahasiswa dan usia produktif yang diyakini melek IT dan berpotensi menggerakkan perekonomian melalui usaha skala kecil, namun juga menunjukkan peluang dalam peningkatan resiko atas pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan. Selain itu, BBPOM di Makassar

4. Pengawasan Produk Obat JKN

BBPOM di Makassar melakukan pengawasan terhadap produk obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), antara lain melalui *sampling* dan pengujian obat serta pemeriksaan sarana sesuai CPOB, CDOB dan GPP. Sampling obat JKN dilakukan sesuai Prioritas Sampling tahun 2019 yang telah ditetapkan oleh Badan POM. Sampling *purposive-targeted* obat JKN dilakukan melalui pendekatan analisis risiko produk obat yang digunakan di sarana pemerintah maupun sarana pelayanan lain yang bekerja sama dengan BPJS.

1. Implementasi Inpres 3 tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindaklanjut perlu disiapkan. Tindaklanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Makassar sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3, maka Badan POM memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke 24 Kabupaten di Provinsi Sulawesi selatan yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian ijin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaran bimtek tenaga kefarmasian difasilitas pelayanan keferamasian dalam pemenuhan stadart dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, monitoring tindak lanjut pengawasan sarana. BBPOM Makassar melaksanakan pendampingan dan monitoring pelaksanaan DAK di Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Reformasi Birokrasi (RB)

Implementasi RB oleh BBPOM di Makassar menuju *good and clean governance* serta pelayanan publik yang berkualitas, berpedoman pada *Road Map*-RB BPOM tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, BBPOM di Makassar belum berhasil berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenpanRB.

7. Pandemi Covid-19

Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing, melakukan tes massal atau rapid test untuk mencegah penyebaran virus covid-19, pemberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah, refocussing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan Covid-19

Bab II

Perencanaan Kinerja

a. Rencana Strategis 2020-2024
b. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
c. Kriteria Pencapaian indikator

Bab II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Makassar berkomitmen melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar periode 2020-2024 telah mengacu pada Rencana Strategis Badan POM periode 2020-2024.Penyelarasan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Makassar sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat Obat dan Makanan tersebut sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk itu, Balai Besar POM di Makassar telah menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasarannya, yang sesuai dengan visi dan misi Badan POM.

Visi

"Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong"

Penjelasan Visi:

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Balai Besar POM di Makassar untuk mewujudkan Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek sebagai berikut: :

Aman

Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu

Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya Saing

Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu *Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong*

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut :

misi

1. *Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan Kualitas Manusia Indonesia*
2. *Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa*
3. *Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga*
4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Penjelasan misi :

1. ***Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia***

   Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia.** Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai

koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: Data diolah, 2019

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.

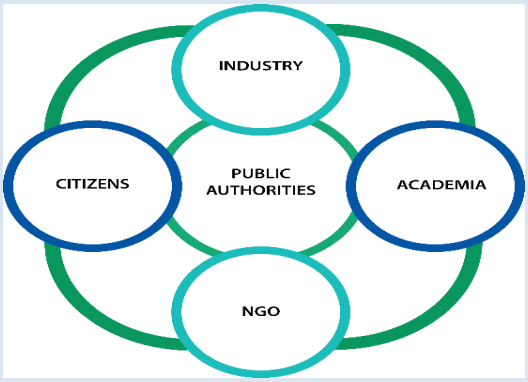

Gambar 2.2 *Penta Helix* Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: *https://pentahelix.eu*.

2. ***Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.** Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sector industry itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen tergadap total ekspor dan 60 persen tenaga kerja industry ada di lima sector tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kepasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan

cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. ***Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga***

   Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.**

   Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: ***1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.***

4. ***Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan***

   Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.** Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

Misi Balai Besar POM di Makassar merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Makassar. Pengawasan pre- dan post-market berstandar internasional didukung dengan perkuatan dari aspek laboratorium terakreditasi sesuai ISO:IEC 17025 tahun 2017 yang diterapkan dalam rangka memperkuat Balai Besar POM di Makassar menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk obat dan makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, bermutu dan berdaya saing , diharapkan Balai Besar

POM di Makassar mampu melindungi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan khususnya, dan Indonesia pada umumnya dengan optimal.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Makassar dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Makassar. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Makassar akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Balai Besar POM di Makassar dan Loka POM di Kota Palopo berikut:

Untuk mewujudkan visi, misi, serta menjalankan sasaran strategis tersebut, Balai Besar POM di Makassar telah menyusun sasaran kegiatan dengan pertimbangan tantangan masa depan dan sumber daya termasuk infrastuktur yang dimiliki. Sasaran kegiatan yang ditetapkan mengacu pada sasaran strategis Badan POM tahun 2015-2019 yang mengalami perubahan pada pertengahan tahun 2018 yang tercantum dalam Peta Strategis BSC level 0. Sasaran strategis tersebut diturunkan menjadi sasaran kegiatan pada peta strategis Level II BBPOM di Makassar.

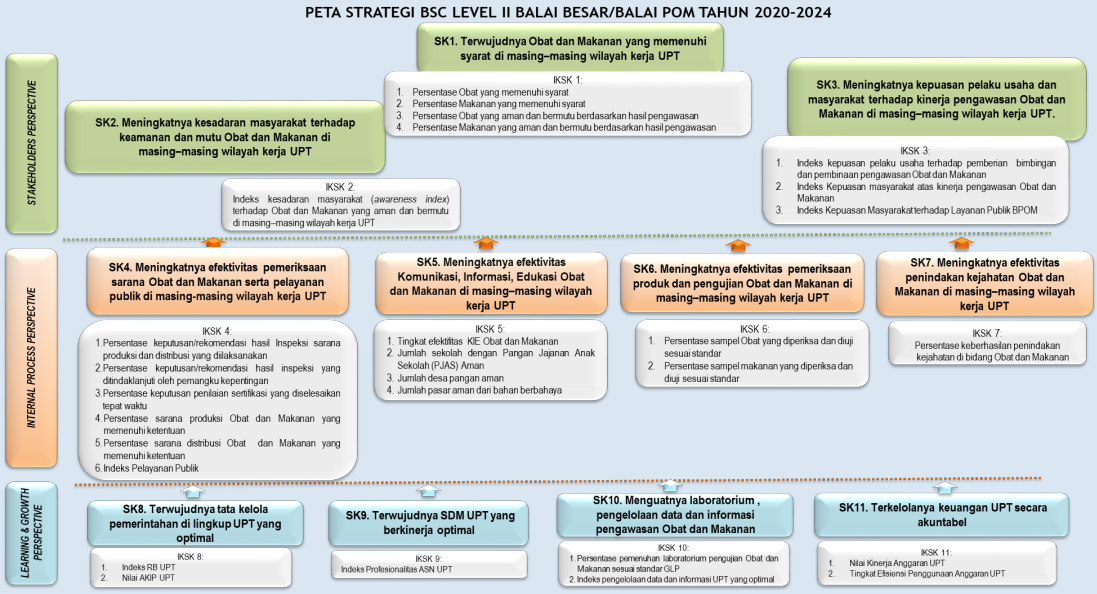

Gambar 2.3 Peta Strategis Level II BBPOM di Makassar

Sumber: Rencana Stretegis BBPOM di Makassar 2020 - 2024, 2020

SASARAN STRATEGIS KEGIATAN DI BALAI POM MAKASSAR

Sasaran Strategis berdasarkan pada Rencana Strategis BBPOM di Makassar peiode 2020-2024

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Level 2 BBPOM di Makassar

Perspective	Sasaran Strategis		Indikator	
Stakeholder	SS.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSS.1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSS.1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSS.1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
	SS.2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.2.1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Makassar
	SS.3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
			IKSS.3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
			IKSS.3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Internal Process	SS.4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSS.4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSS.4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSS.4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS.4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS.4.6	Indeks Pelayanan Publik
	SS.5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.5.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
			IKSS.5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
			IKSS.5.3	Jumlah desa pangan aman
			IKSS.5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
	SS.6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar .	IKSS.6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSS.6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SS.7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan	IKSS.7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

		Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar		
Learning and Growth	SS.8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	IKSS.8.1	Indeks RB BBPOM di Makassar
			IKSS.8.2	Nilai AKIP BBPOM di Makassar
	SS.9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	IKSS.9.1	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar
	SS.10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSS.10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
			IKSS.10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal
	SS.11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	IKSS.11.1	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar
			IKSS.11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar

Stakeholder Perspective :

1. **Sasaran Strategis 1 :**

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Komoditas/produk yang diawasi BBPOM di Makassar tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Makassar merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

Pertama, pengawasan setelah beredar (*post-market control)* untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara terpadu, konsisten, dan terstandar.

Kedua, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

Ketiga, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

1) **Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 83,6 pada akhir tahun 2021;**
2) **Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 89 di tahun 2021;**
3) **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan , dengan target sebesar 83,6 pada akhir tahun 2021;**
4) **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 89 pada akhir tahun 2021.**

Indikator ini sekaligus sebagai salah salah ukuran keberhasilan tujuan BPOM "Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat".

2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BBPOM di Makassar bertugas melakukan pengawalan terhadap kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Makassar melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 77 pada akhir tahun 2021.

3. Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BBPOM di Makassar berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BBPOM di Makassar, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BBPOM di Makassar bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai Besar POM di Makassar perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai Besar POM di Makassar perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

1) **Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 84,5 pada akhir tahun 2021;**
2) **Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target sebesar 72 pada akhir tahun 2021;**
3) **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 90 pada akhir tahun 2021.**

Internal Process Perspective:

4. **Sasaran Strategis 4**

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Makassar mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Makassar, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Makassar akan meningkat efektivitasnya apabila BBPOM di Makassar mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BBPOM di Makassar perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator :

1) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang diilaksanakan, dengan target sebesar 89 pada akhir tahun 2021;**
2) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 60 pada akhir tahun 2021;**
3) **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu , dengan target sebesar 88 pada akhir tahun 2021;**
4) **Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 51 pada akhir tahun 2021;**

5) **Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 60 pada akhir tahun 2021.**
6) **Indeks Pelayanan Publik, dengan target sebesar 3,76 pada akhir tahun 2021.**

5. **Sasaran Strategis 5**

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Makassar mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Makassar, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini.

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar akan meningkat efektivitasnya apabila mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Makassar perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Hal ini sejalan dengan Inpres No.3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

1) **Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 86,87 pada akhir tahun 2021;**
2) **Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target sebesar 40 pada akhir tahun 2021;**
3) **Jumlah desa pangan aman, dengan target sebesar 12 pada akhir tahun 2021;**
4) **Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target sebesar 8 pada akhir tahun 2021.**

6. **Sasaran Strategis 6**

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BBPOM di Makassar

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Makassar mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Makassar, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

1) **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 86 pada akhir tahun 2021;**
2) **Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 77 pada akhir tahun 2021.**

7. **Sasaran Strategsi 7**

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BBPOM di Makassar melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu

Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 73 pada akhir tahun 2020.

Learning and Growth Perspective

8. Sasaran Strategis 8

Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM BBPOM di Makassar agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BBPOM di Makassar untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BBPOM di Makassar, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Makassar. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1) **Indeks Reformasi Birokrasi BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 89 pada akhir tahun 2021;**
2) **Nilai AKIP BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 85 pada akhir tahun 2021.**

9. Sasaran Strategis 9

Terwujudnya SDM BBPOM di Makasssar yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 77 pada akhir tahun 2021.

10. Sasaran Strategis 10

Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium serta sistem operasional teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan di era *internet of things.*

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1) **Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target sebesar 79 pada akhir tahun 20201**.
2) **Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal, dengan target sebesar 2 pada akhir tahun 2021.**

11. Sasaran Strategis 11

Terkelolanya keuangan BBPOM di Makassar secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning*

and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan BBPOM di Makassar dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1) **Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 94 pada akhir tahun 2021;**
2) **Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 88,5 pada akhir tahun 2021.**

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2021

Pada akhir tahun 2020, Balai Besar POM di Makassar telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar tahun 2020-2024. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut.

Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 11 sasaran kegiatan dengan 28 indikator kinerja kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2021 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 1 pada Laporan Kinerja ini.

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	77
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84,5
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72

		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	90
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Indeks Pelayanan Publik	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,87
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	77
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	Indeks RB BBPOM di Makassar	89
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar	85
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	Efisien (88,5%)

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BBPOM di Makassar sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024 (dapat dilihat pada lampiran 2). Tujuan dari Perjanjian Kinerja ini adalah :

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabiltas, transparansi, dan kinerja aparatur :
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan pemberian *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi);
4. untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja;
5. penetapan sasaran kerja pegawai.

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Tahun 2021 Balai Besar POM di Makassar

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	77
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan	84,5

	kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	pengawasan Obat dan Makanan	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	90
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Indeks Pelayanan Publik	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,87
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	77
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73

	Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar		
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	Indeks RB BBPOM di Makassar	89
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar	85
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPTBBPOM di Makassar	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	Efisien (88,5%)

Kegiatan	Anggaran
Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	Rp 25.363.546.000
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp. 25.164.566.000

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM Makassar selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2021 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Tabel 2.4

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60	83,60	83,60	83,60	381.100.800
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00	80,00	80,00	80,00	176.469.750
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,60	83,60	83,60	83,60	95.275.200
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,00	80,00	80,00	80,00	58.823.250
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	-	-	-	77,00	139.350.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	84,50	229.649.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	72,00	105.166.000

		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	-	-	-	90,00	577.333.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00	89,00	89,00	89,00	189.543.200
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00	60,00	60,00	60,00	81.232.800
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00	88,00	88,00	88,00	228.240.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00	51,00	51,00	51,00	365.455.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	60,00	60,00	1.708.359.000
		Indeks Pelayanan Publik				3,76	99.720.000
5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,87	86,87	86,87	86,87	3.396.344.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	-	-	-	40	798.340.000
		Jumlah desa pangan aman	-	-	-	12	913.058.000

		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	-	-	-	8	503.990.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	30	60	86	461.440.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	20	40	77	529.370.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	33	43	50	73	1.336.127.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Makassar yang optimal	Indeks RB BBPOM di Makassar	-	-	-	89,00	270.746.000
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar	-	-	-	85,00	342,215.000
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	-	-	-	77,00	19.895.512.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	79,00	8.851.737.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	2,00	2,00	2,00	2,00	380.291.000
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPTBBPOM di Makassar	30	50	75	94	8.045.029.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88,50)	368.196.000

2.5. Kriteria Pencapaian Indikator

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar POM Di Makassar merupakan Indikator Kegitan Utama. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu : (1) data internal, berasal dari sistem informasi intern instansi; dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi, baik data primer maupun data sekunder. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.

Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran kinerja diperoleh dengan cara membandingkan capaian kinerja *outcome* dengan target kinerja *outcome* yang ada pada Perjanjian Kinerja tahun

berjalan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja kegiatan adalah dengan Membandingkan capaian kinerja kegiatan yang berupa komponen dengan targetnya yang sesuai dalam rencana kinerja kegiatan pada tahun yang berjalan. Pengukuran Kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achieveable, Reasonable dan Timebond*). Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus di bawah.

$$\%\ Capaian = \frac{(100\ \% - Realisasi)}{(100\ \% - Target)}\ x\ 100\ \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus di bawah.

$$\%\ Capaian 100\ \% = \frac{(Realisasi)}{(Target)}\ x\ 100\ \%$$

Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran

Kriteria penilaian Capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kriteria	Capaian Target Indikator
Tidak dapat disimpulkan	$\chi \leq 120\%$
Sangat Baik	$110\% < X \leq 120\ \%$
Baik	$90\% \leq \chi < 110\%$
Cukup	$70\% \leq \chi < 90\%$
Kurang	$50\% \leq \chi < 70\%$
Sangat Kurang	$< 50\%$

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NSP)

Nilai Pencapaian Sasaran (NSP) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indicator(NPI) dikalikan dengan bobot :

$$NPS2 = \frac{1\ NPI1 + 1NPI\ 2}{2}$$

$$NPS3 = \frac{1\ NPI1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3}{3}$$

$$NPS4 = \frac{1\ NPI1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4}{4}$$

$$NPS5 = \frac{1\ NPI1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4 + 1NPI\ 5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai hasil capaian baik faktor/analisis penyebab ketidaktercapaian kinerja triwulan yang lalu atau faktor pendukung/analisis penyebab capaian kinerja serta rencana tindak lanjut untuk triwulan berikutnya dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Makassar adalah sebagai berikut :

1. Penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Makassar yang disahkan oleh SK Kepala BPOM
2. Kepala BBPOM di Makassar menunjuk perwakilan penanggungjawab data disetiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Makassar. Penanggung jawab data di setiap bidang bertanggungjawab melakukan penginputan sesuai dengan form data kinerja, kertas kerja dan penginputan pada database bit.ly data kinerja secara rutin setiap bulan dan triwulanan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai
3. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada bit.ly data monev berupa RAPK, RHPK, aplikasi SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas dan setiap triwulan pada aplikasi e-performace.
4. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi memanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) dimana aplikasi ini telah menyediakan pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 2 , eselon 3 dan eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Hasil pengukuran ini kemudian menjadi dasar dan diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi acuan dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.

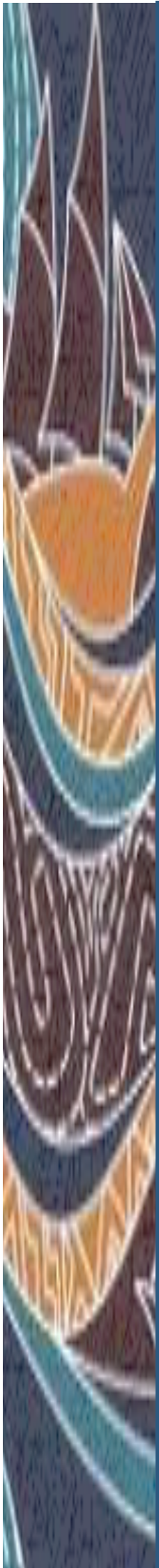

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Indikator Kinerja Utama triwulan III Tahun 2021
b. Realisasi Anggaran triwulan III Tahun 2021
c. Capaian Kinerja triwulan III Tahun 2021

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Dari 28 indikator dan diantaranya ada 17 indikator untuk penilaian interim triwulan III Tahun 2021 pada 11 sasaran strategis, 15 indikator dinyatakan "berhasil" yaitu dengan capaian ≥ 90% terhadap target yang telah ditetapkan, sedangkan 2 indikator dinyatakan tidak berhasil karena tingkat ketercapaiannya dibawah 90 %

A. Capaian IKU triwulan III Tahun 2021

Kinerja BBPOM di Makassar triwulan III Tahun 2021 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2021 merupakan kinerja tahun kedua Renstra BBPOM di Makassar 2020-2024. Capaian kinerja pada triwulan III Tahun 2021 sebesar 106,74 % yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja berdasarkan Nilai Nilai Pencapaian Sasaran Strategis NPSS secara manual, meskipun perhitungan NPSS telah diterapkan di Tahun 2021, namun aplikasi kinerja yang diimplementasikan di BBPOM Makassar pada aplikasi E-Performance masih dalah proses maintenance.

Nilai NPSS triwulan III Tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) triwulan III Tahun 2021 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2020-2024 yaitu 106,74 %.

Gambar 3.1 Dashboard Peta Strategi BBPOM di Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahunan	Realisasi 2021 Realisasi	Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian
Stakeholder Perspective					
Capaian Perspective sakeholder				109,25	109,25
Internal Process Perspective					
Capaian Internal Process Perspective				59,90	58,76
Learning & Growth Perspective					
Capaian Learning & Growth Perspective				73,64	73,64
NPS TOTAL				80,93	80,55

diperoleh nilai NPSS di triwulan II Tahun 2021 sebesar 80,55 % dengan kriteria Cukup, terdiri dari NPS perspektif stakeholder sebesar 109,25 %, NPS perspektif internal proses sebesar 58,76 %, NPS perspektif *learning & growth* sebesar 73,64 %. Dengan demikian disimpulkan bahwa di triwulan II BBPOM di Makassar **belum berhasil** mencapai target semua sasaran strategis dari semua perspektif.

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan II Tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2020 sebagai tahun kedua periode Renstra 2020-2024, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan II Tahun 2021 dengan triwulan II Tahun 2020, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

3.1. Capaian Kinerja

Dari 28 indikator dan diantaranya ada 14 indikator untuk penilaian interim triwulan II Tahun 2021 pada 11 sasaran strategis, 13 indikator dinyatakan "berhasil" yaitu dengan capaian ≥ 90% terhadap target yang telah ditetapkan, sedangkan 1 indikator (persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar) dinyatakan tidak berhasil karena tingkat ketercapaiannya dibawah 90 %

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Secara keseluruhan target kinerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2020 masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai. Terhadap 11 sasaran strategis penilaian pada tahun 2020 terdapat 7 sasaran strategis dengan kategori baik, 1 sasaran strategis kategori sangat baik, 1 sasaran strategis kategori tidak dapat disimpulkan hingga tidak dapat disimpulkan dan belum berhasil mencapai target 2 sasaran strategis dengan kategori Cukup seperti tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Capaian sasaran kegiatan BBPOM di Makassar triwulan II Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	% Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	111,07	Sangat Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	116,09	Sangat Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	-	-

6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	102,78	Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	106,06	Baik
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	-	-
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	-	-
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	118,42	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa BBPOM di Makassar pada *Stekholders Perspective* pada sasaran pertama sampai dengan ketiga yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar 111,17 ; Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar 0 ; Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar 0 ; dimana tiga sasaran strategis pada perspektif ini hanya sasaran strategis satu yang memiliki target di triwulan II Tahun 2021 bearada pada kategori **Baik**.

Persepctive *Internal Proses* sasaran strategis kelima yaitu Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar tidak dapat dinilai karena target berada pada triwulan ke IV Tahun 2021. Sasaran strategis keempat yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar berada pada kategori Sangat Baik yaitu dengan nilai 116,09 Sasaran strategis keenam " Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar" dan Sasaran strategis ketujuh "Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar" , kategori baik dengan nilai masing-masing 102,78 dan 106,06 .

Pada learning and growth perspective terdapat empat sasaran strategis dan hanya satu sasaran strategis yaitu sasaran strategis kesebelas "Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel' dengan nilai 115,58 kategori **Baik** "sedangkan sasaran strategis delapan, Sembilan dan sepuluh penilaiannya pada akhir tahun 2021.

Tabel 3.2

Capaian Kinerja BBPOM di Makassar triwulan II Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi	% Capaian	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	94,60	113,16	103,45
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	85,56	106,95	
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6	97,56	116,70	
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	61,60	77,00	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	-	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	
		8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	100,00	112,36	113,21
		10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	50,39	83,98	
		11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	66,19	75,22	
		12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	75,00	147,06	

		13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	86,96	144,93	
		14	Indeks Pelayanan Publik	3,76	4,35	115,69	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,87	91,87	105,76	105,76
		16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	30,21		
		17	Jumlah desa pangan aman	12	26,38		
		18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8	33,13		
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	30	41,23	137,43	158,32
		20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	35,84	179,20	
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	43	50,07	116,44	116,44
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	22	Indeks RB BBPOM di Makassar	-	-	-	-
		23	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	-	-	-	
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	-	-	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	81,50
		26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	2	1,63	81,50	
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	50	67,91	135,82	124,73
		28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	88,00	100,00	113,64	

Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing Sasaran Strategis Balai Besar POM di Makassar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar diukur dengan 4 Indikator sebagai berikut :

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan
4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
Target 83,60 Realisasi 84,21 Capaian 113,91 %

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
Target 80,00 Realisasi 81,40 Capaian 101,74 %

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
Target 83,60 Realisasi 97,56 Capaian 116,70 %

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
Target 80,00 Realisasi 60,00 Capaian 75,00 %

Pada sasaran strategis pertama "Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar " tiga indikator nilai capaiannya diatas dari target mencapai lebih dari 100 % yaitu indikator pertama, kedua, ketiga yaitu indikator persentase Obat yang memenuhi syarat; Persentase Makanan yang memenuhi syarat dan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sedangkan indikator keempat yaitu Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaiannya dibawah 100 %.

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Persentase Obat yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan Jumlah Sampel Acak Obat mencakup (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) yang Memenuhi Syarat setelah tahap pemeriksaan dan pengujian dibagi dengan Total sampel Acak Obat yang dipeiksa dan diuji

Indikator yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar antara lain adalah persentase Obat yang Memenuhi Syarat.

Pada triwulan II tahun 2021 BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan obat dan makanan yang memenuhi syarat diwilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 95,23 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Acak Obat MS}}{\text{Total sampel Acak Obat yang diperiksa dan di uji}} \times 100\ \%$$

Terdapat beberapa kriteria untuk menentukan obat memenuhi syarat yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II Tahun 2021

Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat triwulan II Tahun 2021 adalah 113,91 % dengan realisasi sebesar 95,23 % Obat yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Makassar telah memenuhi syarat.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat triwulan II Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase obat yang memenuhi syarat	83,60	95,23	113,91	Sangat Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan Jumlah sampel acak produk Obat Memenuhi Syarat yang diperiksa dan di uji sebanyak 439 sampel terhadap total sampel acak Obat yang diperiksa dan diuji sebanyak 461 sampel. Jenis Obat yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan pada tahun 2021, yaitu Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5)Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Jumlah keseluruhan Sampel Obat yang diperiksa adalah 461 sampel terdiri atas 238 sampel obat, 156 sampel Obat tradisional, 41 sampel suplemen Kesehatan dan 126 sampel kosmetik, dari 461 sampel tersebut terdapat 22 sampel Obat tidak memenuhi syarat yang terdiri atas:

- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori TIE/Ilegal palsu : 18 (18 kosmetik) Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori Kadaluarsa : 1 (1 kosmetik) Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori rusak : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Tidak Memenuhi Syarat Uji Laboratorim) : 3 (3 Obat Tradisional) Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Memenuhi Syarat Uji Laboratorim) : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Tidak Memenuhi Syarat uji laboratorium) : 0 Sampel

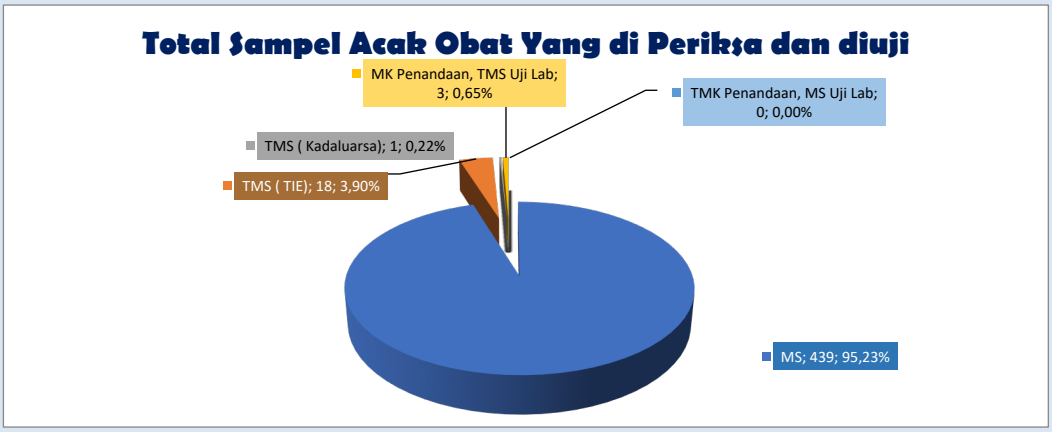

Gambar 3.2
Jumlah Sampel Obat yang diperiksa dan diuji triwulan II Tahun 2021

Jumlah sampel Obat sampai dengan triwulan II Tahun 2021 yang diperiksa adalah 575 sampel dan sebesar 461 sampel yang selesai diperiksa dan diuji, dan sisanya sebanyak 114 sampel obat yang carry over di triwulan III Tahun 2021.

b. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2021

Tabel 3.4. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat triwulan II Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja Persentase obat yang memenuhi syarat	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I Tahun 2021	83,60	84,21	100,73	Baik
Triwulan II Tahun 2021	83,60	95,23	113,91	Sangat Baik

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat BBPOM Makassar untuk triwulan II tahun 2021 dibandingkan triwulan I Tahun 2021. Triwulan II Tahun 2021 berada pada angka 113,73 kategori "sangat baik" lebih tinggi apabila dibandingkan triwulan I Tahun 2021 dengan nilai 100,72 kategori "Baik"

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat triwulan II Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2021	Target 2024	Realisasi triwulan II 2021	% Capaian	Kriteria
Persentase obat yang memenuhi syarat	83,60	92,30	95,23	104,37	Baik

Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat triwulan II Tahun 2021 **telah mencapai** target Renstra tahun 2024, serta capaian yang diperoleh sudah masuk kategori baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat mencapai kategori Sangat Baik.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase obat yang memenuhi syarat kategori baik antara lain :

- Mengikuti petunjuk dalam KepKa Badan POM tahun 2021 tentang Pedoman *Sampling* Obat& NAPZA Tahun 2021

Untuk sampling obat secara acak/random dilakukan secara acak untuk memenuhi keterwakilan (representative) terhadap produk yang beredar. Sampling acak yang dilakukan sesuai Pedoman Sampling Obat dan NAPZA Tahun 2021 dengan kaidah stratified random sampling dimana cara mengambil sampel dengan memperhatikan strata (tingkatan) di dalam populasi. Tingkatan yang dimaksud adalah tingkatan kelas terapi berdasarkan jumlah produk beredar. Sampling acak diperuntukkan untuk obat JKN dan obat non JKN.

- Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada triwulan II Tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 95,23 %. Pelaksanaan sampling obat oleh Balai Besar POM di Makassar dilakukan secara onsite dengan tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemic covid 19 yang belum berakhir.

  Pelaksanaan metode sampling secara langsung (onsite) di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel acak Obat yang didapat lebih bervariasi jenisnya dibandingkan pada saat sampling secara online. Sedangkan untuk sampel Suplemen dan Obat Tradisonal yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) variasi jenis produknya sangat terbatas. Kemungkinan mendapatkan produk dan bets yang sama pada saat melakukan sampling acak di daerah sangatlah kecil, karena keterbatasan persedian jenis produk yang dijual di daerah (kabupaten).

  Jumlah sampel acak Obat Balai Besar POM di Makassar adalah 461 sampel, terdiri atas 439 sampel memenuhi syarat dan 22 sampel yang tidak memenuhi syarat, berasal dari 19 sampel acak yang TMS (18 TIE/Ilegal/Palsu yaitu pada komoditi kosmetik; 1 sampel kedalurasa komoditi kosmetik) serta 3 Sampel acak Obat Tradisional MK. Penandaan namun TMS ujij laboratorium.

- Jumlah dan item sampel yang tersedia di daerah mempengaruhi tingginya persentase obat yang memenuhi syarat, selain itu kepatuhan produsen dalam penggunaan penandaan/label pada produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku diwilayah sampling BBPOM Makassar juga mempengaruhi tingginya persentase obat yang memenuhi syarat yang dicapai pada triwulan II Tahun 2020 hal ini disebabkan karena telah mencantumkan interaksi obat pada brosur komoditi obat; klaim yang tidak sesuai pada Obat Tradisional dan Kosmetik.

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase Obat yang Memenuhi Syarat semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- pengambilan *sampling* obat yang dilakukan Balai Besar POM di Makassar harus sepenuhnya mengacu pada pedoman *sampling* yang telah ditetapkan Kepala BPOM. Selain itu akan dilakukan *review* dan evaluasi terhadap Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat agar selalu sejalan/sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang Obat dan Makanan.
- Agar pencapaian kinerja dapat lebih ditingkatkan akan dilakukan pengawasan, baik secara daring maupun kunjungan ke sarana di masa Pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sarana yang didapati melakukan ketidaksesuaian dalam pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran produk obat, maka diberiksan sanksi administratif. Sementara bagi sarana yang sudah melakukan pengelolaan produk obat dengan baik, tetap dilakukan pembinaan. Terhadap temuan

produk yang ilegal maupun substandar, telah dilakukan tindakan pengamanan terhadap produk tersebut, untuk selanjutnya pihak sarana diminta melakukan klarifikasi.

- ❖ Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk Tindakan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian pada hasil pengawasan.
- ❖ Metode sampling acak untuk produk Obat, Kosmetik, Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan dilakukan dalam rangka menjawab sampling representatif (keterwakilan semua risiko yang ada di masyarakat), dimana metode sampling yang dilakukan pada tahun 2021 menggunakan metode pengawasan *Multistage* sampling sebagai upaya agar jenisnya lebih bervariasi
- ❖ Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling (Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara acak, dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda). Apabila diperoleh sampling acak yang produk dan betsnya sama, parameter uji yang dilakukan adalah berbeda untuk setiap bets sesuai parameter uji yang telah ditentukan.

e. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase obat yang memenuhi syarat kategori baik antara lain :

- Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Implementasi *Sampling* Obat Program Nasional/JK
- Pengawasan Intensif Tindak Lanjut Perintah Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Syarat
- Penyebaran informasi kepada masyarakat sebagai bentuk Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat.
- Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Obat tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Obat tanpa izin edar dan substandar.
- Pembinaan terhadap sarana distribusi Obat untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga tidak ditemukan Obat yang TMS karena rusak;
- Penyebaran informasi keamanan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile;
- Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku
- Penerapan Sistem Manejemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

- Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling (Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara acak, dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda). Apabila diperoleh

sampling acak yang produk dan betsnya sama, parameter uji yang dilakukan adalah berbeda untuk setiap bets sesuai parameter uji yang telah ditentukan.

- Melakukan penajaman realisasi sampling Obat, Obat tradisional dan kosmetik untuk mendapatkan sampel yang berpotensi tidak memenuhi syarat
- Memeperluas kemampuan uju Laboratorium dalam rangka pengawasan obat yang beredar
- Meningkatkan fungsi laboratorium spesifik untuk konfirmasi sampel terduga tidak memenuhi syarat

cara sampling pada sampel obat yaitu target produk Obat yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun 2021, Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika**.** Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi : (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kedaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Persentase Makanan yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan Jumlah Sampel Acak Makanan mencakup (makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman) yang Memenuhi Syarat setelah tahap pemeriksaan dan pengujian dibagi dengan Total sampel Acak Makanan yang dipeiksa dan diuji

Pada triwulan II tahun 2021 BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan makanan yang memenuhi syarat, hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 81,40 %, menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\%\ Makanan\ MS = \frac{Jumlah\ Sampel\ Acak\ Makanan\ \ MS\ yang\ diperiksa}{Total\ Sampel\ Acak\ Makanan\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \ X\ 100\ \%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II Tahun 2021

Capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2021 adalah 101,74 % dengan realisasi sebesar 81,40 % Makanan yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Makassar telah memenuhi syarat.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat triwulan II Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	81,40	101,74	Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan sampel acak produk Makanan MS yang diperiksa dan di uji 175 sampel terhadap total sampel acak makanan yang diperiksa dan diuji sebanyak 215 sampel. Jenis makanan yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan pada tahun 2021. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Jumlah keseluruhan Sampel makanan yang diperiksa adalah 215 . Dari 215 sampel tersebut terdapat 40 sampel makanan tidak memenuhi syarat yang terdiri atas :

- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori TIE/Ilegal palsu : 0 Sampel

- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori Kadaluarsa : 3 Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori rusak : 2 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Tidak Memenuhi Syarat Uji Laboratorim) : 7 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Memenuhi Syarat Uji Laboratorim) : 15 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Tidak Memenuhi Syarat uji laboratorium) : 13 Sampel

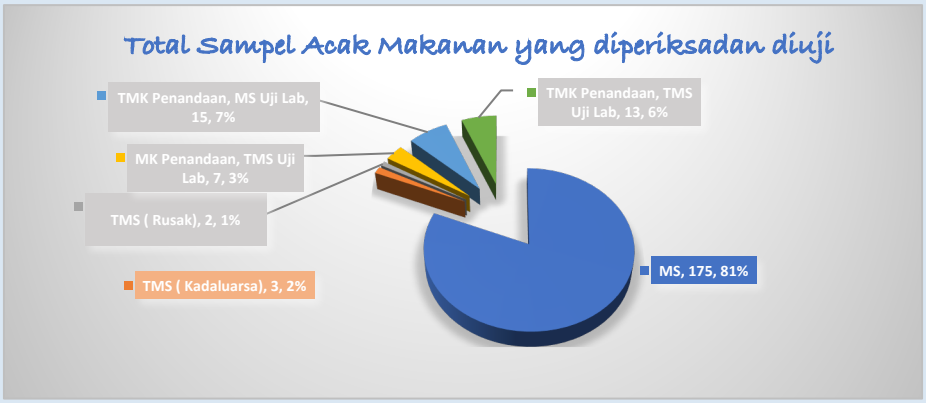

Grafik 3.3

Jumlah Sampel makanan yang memenuhi syarat triwulan II Tahun 2021

Jumlah sampel makanan triwulan II Tahun 2021 yang diperiksa adalah 315 sampel dan sebesar 215 sampel yang selesai diperiksa dan diuji dan sisanya sebanyak 100 sampel obat yang carry over di triwulan III Tahun 2021.

b. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II Tahun 2021 dengan triwulan II Tahun 2020

Tabel 3.7.. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat triwulan II Tahun 2021 dengan triwulan II Tahun 2020.

Indikator Kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I Tahun 2021	80	90	112,50	Sangat Baik
Triwulan II Tahun 2021	80	81,40	101,74	Baik

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase makanan yang Memenuhi Syarat BBPOM Makassar untuk triwulan II tahun 2021 dibandingkan triwulan I Tahun 2021. Triwulan II Tahun 2021 berada pada angka 101,74 kategori " baik" lebih rendah apabila dibandingkan triwulan I Tahun 2021 dengan nilai 112,50 kategori "Sangat Baik"

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.10. Perbandingan realisasi Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat triwulan II Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2024	Realisasi 2021	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	86	81,40	94,65	Baik

Realisasi Persentase makanan yang memenuhi syarat triwulan II Tahun 2021 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, serta capaian yang diperoleh sudah masuk kategori baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor kendala /Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase makanan yang memenuhi syarat kategori baik antara lain:

- Pengawasan terhadap produk makanan yang beredar lebih intensif, disertai dengan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan dan ritel, mengurangi peredaran Makanan tanpa izin edar.
- Terhadap sampel Makanan yang tidak memenuhi ketentuan penandaan disebabkan oleh kurangnya kepatuhan pelaku usaha terhadap implementasi label produk Makanan yang sudah disetujui oleh direktorat Registrasi Pangan Olahan sebanyak 12,38 %
- Terhadap sampel Makanan yang tidak memenuhi syarat pengujian laboratorium yaitu TMS pada parameter pemanis siklamat, pemanis sakarin, pewarna tartrazin, pewarna eritrosin sebanyak 3,2 %

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase makanan yang Memenuhi Syarat semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- *Sampling* Makanan dilakukan Balai Besar POM di Makassar sepenuhnya mengacu pada pedoman *sampling* yang telah ditetapkan Kepala BPOM. Selain itu akan dilakukan *review* dan evaluasi terhadap Pedoman *Sampling* dan Pengujian Makanan agar sejalan/sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang Obat dan Makanan.
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk Tindakan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian pada hasil pengawasan.
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha sarana produksi pangan olahan terkait pemenuhan CPPOB.
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi ketentuan.
- Melaporkan hasil evaluasi penandaan ke pusat untuk ditindaklanjuti ke produsen.

e. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase obat yang memenuhi syarat kategori baik antara lain :

- Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.
- Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Makanan tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Makanan tanpa izin edar dan substandar.
- Pembinaan terhadap sarana distribusi Makanan untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga tidak ditemukan Makanan yang TMS karena rusak;
- Penyebaran informasi keamanan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile;
- Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku
- Penerapan Sistem Manejemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

- Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling (Produk Pangan) agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara acak (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda). Apabila diperoleh sampling acak yang produk dan betsnya sama, parameter uji yang dilakukan adalah berbeda untuk setiap bets sesuai parameter uji yang telah ditentukan. cara sampling pada sampel makanan yaitu target produk

makanan yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan tahun 2021.

- Peningkatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait untuk lebih melakukan pembinaan terhadap sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) mengenai CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) sehingga produk pangan yang dihasilkan bermutu, aman dan bermanfaat.
- Lebih intensif melakukan monitoring Tindak Lanjut dari sarana produksi MD terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar agar sarana produksi melakukan perbaikan terkait hasil temuan.

Persentase makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)

2) Produk kedaluwarsa

3) Produk rusak

4) Tidak memenuhi ketentuan label

5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

f. Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.

g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan Jumlah Sampel Targeted Obat mencakup (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) yang Memenuhi Syarat setelah tahap pemeriksaan dan pengujian dibagi dengan Total sampel Targeted Obat yang dipeiksa dan diuji

Indikator yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar adalah Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Pada triwulan II Tahun 2021 BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan obat dan makanan yang memenuhi syarat diwilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 97,56 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\%\ \text{Obat aman \& Bermutu} = \frac{\text{Jumlah sampel Targeted Obat MS}}{\text{Total sampel Targeted Obat diperiksa \& diuji}} \times 100\ \%$$

Terdapat beberapa kriteria untuk menentukan obat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II Tahun 2021

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II Tahun 2021 adalah 116,70 % dengan realisasi sebesar 97,56 Obat yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Makassar aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,60	97,56	116,70	Sangat Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan sampel targeted produk Obat Memenuhi Syarat yang diperiksa dan di uji sebanyak 160 sampel terhadap sampel targeted obat yang diperiksa dan diuji sebanyak 164 sampel. Jenis Obat yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan pada tahun 2021, yaitu Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Jumlah keseluruhan Sampel Obat yang diperiksa dan diuji adalah 164 sampel terdiri atas 34 sampel obat, 39 sampel 0bat tradisional, 19 sampel suplemen Kesehatan dan 72 sampel kosmetik, dari 164 sampel tersebut terdapat 4 sampel Obat tidak memenuhi syarat yang terdiri atas :

- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori TIE/Ilegal palsu : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori Kadaluarsa : 1 Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori rusak : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Tidak Memenuhi Syarat Uji Laboratorim) : 2 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Memenuhi Syarat Uji Laboratorim) : 1 Sampel

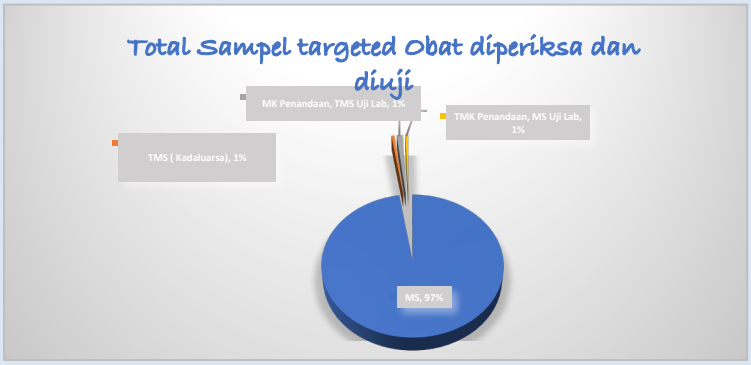

Grafik 3.3

Jumlah Sampel targeted Obat yang diperiksa dan diuji triwulan II Tahun 2021

b. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2021

Tabel 3.10. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan II Tahun 2021	83,60	97,56	116,70	Sangat Baik
Triwulan I Tahun 2021	83,60	100	119,62	Sangat Baik

Perbandingan target capaian kinerja indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM Makassar untuk triwulan II tahun 2021 dibandingkan triwulan I Tahun 2021. Triwulan II Tahun 2021 berada pada angka 116,70 kategori "sangat baik" lebih rendah apabila dibandingkan triwulan I Tahun 2021 dengan nilai 119,60 pada kategori yang sama yaitu "Sangat Baik"

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.11. Perbandingan realisasi Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2024	Realisasi 2021	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,60	92,30	97,56	105,69	Baik

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2021 **telah mencapai** target Renstra tahun 2024, serta capaian yang diperoleh sudah masuk kategori baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan kategori sangat baik antara lain :

- Keberhasilan Pembinaan kepada pelaku usaha dalam Implementasi Perka BPOM No. 25 tahun 2017 tentang Tata Cara dan *mandatory Sertifikasi* CDOB
- Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Obat tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Obat tanpa izin edar dan substandar.
- Jumlah sampel obat targeted di triwulan II Tahun 2021 Balai Besar POM di Makassar adalah 164 sampel, tidak memenuhi syarat sejumlah 4 sampel dan 160 memenuhi syarat
- Terhadap sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan disebabkan oleh kurangnya kepatuhan pelaku usaha terhadap implementasi label produk Obat Tradisional yang sudah disetujui oleh Deputi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebanyak 1 sampel.
- Terhadap sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang tidak memenuhi syarat pengujian laboratorium sebanyak 2 Sampel yaitu sampel Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

- Terhadap sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Sampel TIE, Kedaluarsa yaitu 1 sampel Obat.

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- pengambilan *sampling* obat yang dilakukan Balai Besar POM di Makassar harus sepenuhnya mengacu pada pedoman *sampling* yang telah ditetapkan Kepala BPOM. Selain itu akan dilakukan *review* dan evaluasi terhadap Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat agar selalu sejalan/sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang Obat dan Makanan.
- Agar pencapaian kinerja dapat lebih ditingkatkan akan dilakukan pengawasan, baik secara daring maupun kunjungan ke sarana di masa Pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sarana yang didapati melakukan ketidaksesuaian dalam pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran produk obat, maka diberiksan sanksi administratif. Sementara bagi sarana yang sudah melakukan pengelolaan produk obat dengan baik, tetap dilakukan pembinaan. Terhadap temuan produk yang ilegal maupun substandar, telah dilakukan tindakan pengamanan terhadap produk tersebut, untuk selanjutnya pihak sarana diminta melakukan klarifikasi.
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.

○ Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase obat yang memenuhi syarat kategori baik antara lain :

- Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Implementasi *Sampling* Obat Program Nasional/JK
- Pengawasan Intensif Tindak Lanjut Perintah Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Syarat
- Penyebaran informasi kepada masyarakat sebagai bentuk Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat.
- Peningkatan kegiatan sosialisasi tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* Obat yang diterbitkan oleh Badan POM.

○ Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling (Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara targeted (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda). Apabila diperoleh sampling acak yang produk dan betsnya sama, parameter uji yang dilakukan adalah berbeda untuk setiap bets sesuai parameter uji yang telah ditentukan.

cara sampling pada sampel obat yaitu target produk Obat yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan tahun 2021, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel Targeted memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak ; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian; d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets dan Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan Jumlah Sampel Targeted makanan mencakup (makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman) yang Memenuhi Syarat setelah tahap pengujian dibagi dengan Total sampel Targeted makanan yang dipeiksa dan diuji

Indikator yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Makassar antara lain adalah Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Pada triwulan II Tahun 2021 BBPOM di Makassar belum berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Makassar, hal ini ditunjukkan belum dicapainya target Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 60 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\%\ \text{makanan aman \& bermutu} = \frac{\text{Jumlah sampel Targeted makanan MS}}{\text{Total Sampel targeted makanan diperiksa dan diuji}} \times 100\ \%$$

Terdapat beberapa kriteria untuk menentukan Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II Tahun 2021 adalah 75 % dengan realisasi sebesar 60 % makanan yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Makassar aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	60	75	Cukup

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan sampel targeted produk makanan MS yang diperiksa dan di uji sebanyak 69 sampel terhadap total sampel makanan targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 115 sampel. Jenis makanan yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan pada tahun 2021, yaitu Sampling dilakukan terhadap makanan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak aman dan bermutu adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Jumlah keseluruhan Sampel targeted makanan yang diperiksa dan diuji adalah 115 sampel yang selesai diperiksa dan diuji , dari 115 sampel tersebut terdapat 46 sampel makanan tidak aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang terdiri atas :

1. Tidak Memenuhi Ketentuan kategori TIE/Ilegal palsu : 0 Sampel
2. Tidak Memenuhi Ketentuan kategori Kadaluarsa : 0 Sampel
3. Tidak Memenuhi Ketentuan kategori rusak : 0 Sampel

4. Tidak Memenuhi Syarat (Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Tidak Memenuhi Syarat Uji Laboratorim) : 6 Sampel
5. Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Memenuhi Syarat Uji Laboratorim) : 2 Sampel
6. Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Tidak Memenuhi Syarat uji laboratorium) : 38 Sampel

Gambar 3.4
Jumlah Sampel targeted makanan yang diperiksa dan diuji triwulan II Tahun 2021

Jumlah sampel makanan targeted sampai dengan triwulan II Tahun 2021 yang diperiksa adalah 152 sampel dan sebesar 115 sampel yang selesai diperiksa dan diuji, dan sisanya sebanyak 37 sampel makanan yang carry over di triwulan III Tahun 2021.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.13. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II Tahun 2021 dengan triwulan II Tahun 2020

Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan II Tahun 2021	80	60	75	Cukup
Triwulan I Tahun 2021	80	58,23	72,78	Cukup

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM Makassar untuk triwulan II tahun 2021 dibandingkan triwulan I Tahun 2021. Triwulan II Tahun 2021 berada pada angka 75 kategori "Cukup" lebih tinggi 2,21 poin apabila dibandingkan triwulan I Tahun 2021 dengan nilai 72,78 berada pada kategori yang sama yaitu "Cukup"

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.14. Perbandingan realisasi Indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2021	Target 2024	Realisasi triwulan II 2021	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	86	60	69,76	Cukup

Realisasi Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II Tahun 2021 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, serta capaian yang diperoleh masih termasuk kategori cukup. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor kendala /Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan kategori baik antara lain :

- Sampiling Produk Pangan di triwulan kedua termasuk di dalamnya adalah sampel fortifikasi, dimana realisasi pada sampel fortifikasi berkontribusi terhadap rendahnya capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan karena tehadap 74 sampel yang diperiksa dan diuji sebanyak 35 sampel yang TMS uji.
- Jumlah sampel makanan yang diuji triwulan kedua Tahun 2021 mencapai 75,65% (152 sampel makanan) yang disampling secara targeted. hasil pengujian Makanan yang TMS sebagian besar berasal dari sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan sampel fortifikasi garam beryodium disampling secara purposive/targeted. Sampel yang tidak memenuhi syarat mutu sebanyak 46 sampel dari total 115 sampel makanan yang diuji, dengan TMS parameter Siklamat. pada sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) serta TMS parameter KIO3 dan kadar air pada sampel fortifikasi garam beryodium. Hal ini menunjukkan masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan, khususnya dengan pihak sekolah untuk meningkatkan kesadaran para guru, orang tua murid, murid dan pedagang sekitar sekolah terhadap keamanan pangan sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB.
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang aman dan bermutu.

e. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan kategori baik antara lain :

- Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Implementasi *Sampling* makanan
- Pembinaan terhadap sarana distribusi Makanan untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga tidak ditemukan Makanan yang TMS;
- Penyebaran informasi keamanan makanan yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile;
- Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan.
- Penerapan Sistem Manejemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling (Makanan) agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara acak (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda). Apabila diperoleh sampling acak yang produk dan betsnya sama, parameter uji yang dilakukan adalah berbeda untuk setiap bets sesuai parameter uji yang telah ditentukan.

cara sampling pada sampel makanan yaitu target produk makanan yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan tahun 2021, Persentase makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel

targeted yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Sasaran 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Sasaran Strategis Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar diukur dengan Indikator :

1. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awarness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan bermutu

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.

Variabel

1. Pengetahuan
2. Sikap
3. Perilaku

KLIK

Metodologi

Design metodologi yang digunakan pada kajian ini adalah *Multistage random sampling* dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan *Margin of Error* 10%, dan Jumlah sampel ditetapkan dengan metode Probability Proportional to Size (PPS)
Penetapan populasi/responden adalah

- **Daftar sampel blok sensus (DSBS) tiap provinsi dilengkapi dengan informasi klasifikasi daerah (perkotaan dan perdesaan).**
- **Daftar sampel rumah tangga (DSRT) di blok sensus terpilih berdasarkan hasil pemutakhiran terakhir**

yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari 3.487 Blok Sensus (34.870 DSRT) yang tersebar di 34 propinsi dan 514 kabupaten/kota. Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan *tools* kuesioner

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Capaian indikator Indeks kesadaran masyarakat (*Awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar pada triwulan II Tahun 2021 belum ada penilaian, dimana target akhir Tahun 2021 adalah 71 .

Tabel 3.15
Target Kinerja Indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar triwulan II tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awarness index) terhadap Obat dan makanan aman bermutu	77	-	-	-

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.

Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.

Kajian yang bertujuan untuk mengukur nilai indeks kesadaran dan kepuasan masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat pada skala Nasional, Regional, Provinsi dan Loka POM. Design metodologi yang digunakan pada kajian ini adalah *cross sectional* (potong lintang) dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan *Margin of Error* 10%, dan pemilihan sampel/responden adalah secara acak (*random*). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari 3.487 Blok Sensus (34.870 DSRT) yang tersebar di 34 propinsi termasuk Provinsi Sulawesi Selatan dan 514 kabupaten/kota. Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan *tools* kuesioner.

1. **Indeks Kesadaran Masyarakat**

Indikator pembentuk indeks Kesadaran masyarakat adalah sejauh mana pengetahuan, sikap dan prilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi

Dari hasil survei terhadap pengukuran tingkat kesadaran masyarakat Sulawesi Selatan berdasarkan 3 (tiga) Indikator Pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap KLIK pada seluruh komoditas diperoleh nilai Indeks Kesadaran Masyarakat. Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu :

2. Pengetahuan

   Pengetahuan (Knowledege) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan, Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar, Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

3. Sikap

   Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu, Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar, Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

4. Perilaku

   Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar, Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Tabel 3.16

Kategori Indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2021

Kategori	Interval Indeks	Lebar Interval	%
Tidak Baik	<45	45	0,3
Kurang Baik	45 – 60	15	12,82
Cukup Baik	60 – 75	15	64,4
Baik	75 – 90	15	21,69
Sangat Baik	≥ 90	10	0,79

Pada akhir Tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar.

Sasaran 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Capaian indkator Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar adalah sebagai berikut :

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
Target - Realisasi - Capaian -

Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
Target - Realisasi - Capaian -

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar
Target - Realisasi - Capaian -

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM

Aspek Pengukuran

1). **Aspek bimbingan dan pembinaan**
2). **Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan**
3). **Aspek penanganan saran dan masukan**
4). **Aspek manfaat**
5). **Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.**
6). **Aspek pengetahuan dan pemahaman**

Capaian indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar pada triwulan II Tahun 2021 belum ada penilaian, dimana target akhir Tahun 2021 adalah 84,5 .

Tabel 3.17
Target Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan triwulan II tahun 2021

Indikator	Target Triwulan II 2021	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM.

Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/ pelatihan/ bimbingan teknis, asistensi/ pendampingan/ *coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportitr, sarana pelayanan. Aspek pengukuran dalam survei ini :

1). Aspek bimbingan dan pembinaan

2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan

3). Aspek penanganan saran dan masukan

4). Aspek manfaat

5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.

6). Aspek pengetahuan dan pemahaman

2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM

Indikator Pembentuk

- ***tangibles,***
- ***realibility,***
- ***responsiveness,***
- ***assurance dan***
- ***emphaty***

Target Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan pada triwulan II Tahun 2021 belum ada penilaian, dimana target akhir Tahun 2021 adalah 72 .

Tabel 3.18
Target Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan triwulan II Tahun 2021

Indikator	Target triwulan II 2021	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	-	-	-

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 indikator yaitu *tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphaty*.

Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 pengukuran indeks:

1) Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
2) Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan. Pada triwulan pertama hingga ketiga tahun 2021 belum ada realisasi untuk indikator ini.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Acuan

Peratuan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Pada triwulan pertama hingga ketiga tahun 2021 belum ada realisasi untuk indikator ini, dimana target akhir Tahun 2021 adalah 90 .

Tabel 3.19

Target Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar triwulan II Tahun 2021

Indikator	Target Triwulan II 2021	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	-	-	-	-

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini Permen PAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

Pada Tahun 2021, target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar.

Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BBPOM di Makassar terhadap penerima layanan informasi, penerima layanan Surat Keterangan Impor/Ekspor (SKI/SKE), dan penerima layanan pengujian sampel pihak ketiga (lintas sektor). Realisasi indikator ini ditargetkan akan diperoleh pada triwulan IIV. Data hasil survei diolah oleh Inspektorat Utama melalui aplikasi Simolekdesi/https://sapaapip.pom.go.id hasilnya telah diperoleh pada triwulan IV tahun 2021.

Sasaran 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan dan pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar sebagai berikut :

1 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	2 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
5 Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	6 Indeks Pelayanan Publik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
Target 89 Realisasi 100 Capaian 112,36 %

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
Target 60 Realisasi 50,39 Capaian 83,98 %

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
Target 88 Realisasi 66,19 % Capaian 75,22 %

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
Target 51 Realisasi 61 % Capaian 119,61 %

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
Target 60 Realisasi 81,00 Capaian 135,00 %

Indeks Pelayanan Publik
Target 3,76 Realisasi 4,35 Capaian 115,69

Pada sasaran strategis keempat Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan 5 indikator antara lain :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi / distribusi.

Pada triwulan II tahun 2021 BBPOM di Makassar telah berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan capaian 100 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Rasio} = \frac{\text{Jumlah Tindak lanjut Hasil Pengawasan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan yang diberikan}}$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II Tahun 2021

Jumlah rekomendasi yang dilaksanakan pada triwulan II Tahun 2021 adalah 152 keputusan dibandingkan dengan Jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan adalah 152 dengan realisasi 100 %. keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, diatas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 89 %

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan triwulan II Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	100	112,36	Sangat Baik

Capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan II Tahun 2021 adalah 100 dengan kriteria sangat baik.

Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi / distribusi.

Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras ataur ekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindaklanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/ rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT
- Rekomendasihasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT

- Rekomendasihasi inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat
- Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha;
- Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/ lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keseluruhan jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan pada triwulan II Tahun 2021 adalah 152 keputusan/rekomendasi, dari 152 jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan tersebut keseluruhan jumlah rekomendasi yang dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 133, Tindak lanjut = 133
  - Obat 57 keputusan/rekomendasi, 57 Tindak lanjut
  - Obat Tadisional; 15 keputusan/rekomendasi, 15 Tindak lanjut
  - Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Kosmetik; 22 keputusan/rekomendasi, 22 Tindak lanjut
  - Pangan; 39 keputusan/rekomendasi, 39 Tindak lanjut
- Rekomendasihasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 16, Tindak lanjut = 16
  - Obat 3 keputusan/rekomendasi, 3 Tindak lanjut
  - Obat Tadisional; 7 keputusan/rekomendasi, 7 Tindak lanjut
  - Suplemen Kesehatan; 2 keputusan/rekomendasi, 2 Tindak lanjut
  - Kosmetik; 2 keputusan/rekomendasi, 2 Tindak lanjut
  - Pangan; 2 keputusan/rekomendasi, 2 Tindak lanjut
- Rekomendasihasi inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat/UPT lain = 0, Tindak lanjut = 0
  - Obat 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Obat Tadisional; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Kosmetik; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Pangan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut

- Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 3, Tindak lanjut = 3
  - Obat 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Obat Tadisional; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Kosmetik; 1 keputusan/rekomendasi, 1 Tindak lanjut
  - Pangan; 3 keputusan/rekomendasi, 3 Tindak lanjut

b. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II Tahun 2021 dengan triwulan II Tahun 2020

Tabel 3.21. Perbandingan realisasi dan capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Makassar triwulan I Tahun 2021 dengan triwulan II Tahun 2021

Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan I Tahun 2021	89	100	112,36	Sangat Baik
Triwulan II Tahun 2021	89	100	112,36	Sangat Baik

100 112,

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan untuk triwulan II tahun 2021 dibandingkan triwulan I Tahun 2021. Triwulan II dan I Tahun 2021 berada pada angka yang sama yaitu 112,36 kategori "Sangat baik" .

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun triwulan II Tahun 2021 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.22. Perbandingan realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Makassar triwulan II Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target triwulan II 2021	Target 2024	Realisasi triwulan II 2021	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	95	100	105,26	Baik

indikator indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Makassar tahun 2020 **teklah mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan dan sistematis agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis Penyebab Capaian Kinerja dan Alternatif Solusi

Hal yang mempengaruhi capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kurang disebabkan pada 152 jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan sebanyak 63 jumlah rekomendasi yang dilaksanakan. Hal ini terjadi karena :

- Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan yaitu rekomendasi perbaikan temuan pada saat pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dalam bentuk corretive action preventive action (CAPA).
- Memasuki tahun kedua perode Renstra 2020-2024 sehingga telah tersedia baseline data untuk menentukan target yang mampu dicapai BBPOM di Makassar, perlu dilakukan review terhadap target pada tahun selanjutnya
- Dalam melaksanakan tindakan perbaikan (CAPA) terhadap temuan ketidaksesuaian masih banyak pelaku usaha yang kesulitan dalam pelaksanaannya terutama untuk perbaikan temuan yang membutuhkan anggaran dengan alasan tidak adanya anggaran disebabkan oleh lesunya perekonomian selama masa pandemi covid-19.
- Perlu strategi khusus dalam menetapkan jenis dokumen yang dihitung sebagai tindak lanjut ataupun rekomendasi yang diberikan seperti surat perintah pengawasan dari Badan POM berupa pengawasan sarana dari pusat atau tindak lanjut yang disampaikan oleh UPT Badan POM.
- Memperkuat monitoring dan pengawalan terhadap rekomendasi yang diberikan baik tindak lanjut yang disampaikan oleh Badan POM, UPT Badan POM dan Lintas sector untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Alternatif Solusi

- Memberikan layanan konsultasi terhadap sarana dalam pembuatan CAPA
- Meningkatkan monitoring terhadap sarana dalam perbaikan tindakan ketidaksesuaian (CAPA)

e. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan kategori cukup antara lain :

1. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM terkait produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)

2. Selama triwulan II Tahun 2021 dilakukan inspeksi rutin sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sebanyak 152 sarana dan pengawasan terhadap iklan dan penandaan obat dan makanan di BBPOM Makassar dengan keputusanr/ekomendasi yang dilaksanakan sebagai berikut :

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 133, Tindak lanjut = 133, capaian 100 %
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 16, Tindak lanjut = 16,capaian 100 %
- Rekomendasihasi inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat/UPT lain = 0, Tindak lanjut = 0, capaian 0 %
- Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT =3, Tindak lanjut = 3, capaian 100 %

Dimana capain terendah adalah pada jenis rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain 0 %.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Berdasarkan evaluasi, untuk meningkatkan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, maka :

- Balai Besar POM di Makassar sudah melakukan komunikasi dengan Badan POM (Kedeputian I dan Kedeputian II) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari Balai Besar POM di Makassar yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat.
- Untuk bisa melaksanakan rekomendasi dari Pusat maupun rekomendasi dari pemangku kepentingan Balai Besar POM di Makassar tetap melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dan produksi secara onsite dengan memperhatikan protocol Kesehatan dan analisa resiko sarana.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi / distribusi.

Pada triwulan II Tahun 2021 BBPOM di Makassar telah berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan belum dicapainya target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan capaian 50,39 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Rasio} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang Tindak lanjuti oleh pemangku kepentingan}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan}}$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II Tahun 2021

Jumlah tindaklanjut rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan pada triwulan II tahun 2021 adalah 73 keputusan dibandingkan dengan Jumlah rekomendasi yang diberikan oleh pemangku kepentingan adalah 138 dengan realisasi 50,39 % rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan, dibawah dari target yang telah diperjanjikan sebesar 60 %

Capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada triwulan II Tahun 2021 adalah 83,98 % dengan kriteria cukup.

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan II Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	60	50,39	83,98	Cukup

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/ distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

1) Pelaku usaha;
2) Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/ Rekomendasi hasili nspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback*/ respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Dasar penerbitan keputusan/ rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Keseluruhan jumlah Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan pada triwulan II Tahun 2021 adalah 138 keputusan/rekomendasi diwilayah kerja BBPOM di Makassar, dari 138 Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan tersebut hanya 73 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut :

- Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha = 121, Tindak lanjut = 65
  - Obat 55 keputusan/rekomendasi, 23 Tindak lanjut
  - Obat Tadisional; 13 keputusan/rekomendasi, 8 Tindak lanjut
  - Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Kosmetik; 20 keputusan/rekomendasi, 12 Tindak lanjut
  - Pangan; 33 keputusan/rekomendasi, 22 Tindak lanjut

- Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor = 17, Tindak lanjut = 8
  - Obat 15 keputusan/rekomendasi, 8 Tindak lanjut
  - Obat Tadisional; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Kosmetik; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Pangan; 2 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian triwulan II Tahun 2021 dengan triwulan II Tahun 2020

Tabel 3.24. Perbandingan realisasi dan capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Balai Besar POM di Makassar triwulan II Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2021.

Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan I Tahun 2021	60	64,57	107,78	Baik
Triwulan II Tahun 2021	60	50,39	83,98	Cukup

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder BBPOM Makassar untuk triwulan II tahun 2021 dibandingkan triwulan I Tahun 2021. Triwulan II Tahun 2021 berada pada angka 83,98 kategori "Cukup" lebih rendah dibandingkan triwulan I Tahun 2021 dengan nilai 64,57 kategori "Baik"

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.25. Perbandingan realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Balai Besar POM di Makassar triwulan II Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target triwulan II 2021	Target 2024	Realisasi 2021	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	60	75	50,39	67,18	Kurang

indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di Makassar triwulan II tahun 2021 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, capaian yang diperoleh kategori kurang. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan dan sistematis agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis Penyebab Capaian Kinerja dan Alternatif Solusi

Analisis Penyebab Capaian Kinerja dan Alternatif Solusi

Hal yang mempengaruhi capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di wilayah kerja BBPOM di Makassar tidak dapat disimpulkan disebabkan meningkanya Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan. Hal ini terjadi karena :

- Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu rekomendasi perbaikan temuan pada saat pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam bentuk corretive action preventive action (CAPA).
- Dalam melaksanakan tindakan perbaikan (CAPA) terhadap temuan ketidaksesuaian untuk sarana pemerintah (PKM, RS dan GFK/IFK) semakin mudah dalam pelaksanaannya terutama untuk perbaikan temuan yang membutuhkan anggaran serta adanya anggaran yang disiapkan oleh APBD.
- Untuk sarana IRTP makin minimnya pelaku usaha yang kesulitan dalam pelaksanaannya terutama untuk perbaikan temuan yang membutuhkan anggaran dengan alasan tidak adanya anggaran disebabkan oleh lesunya perekonomian selama masa pandemi covid-19

Alternatif Solusi

- Memberikan layanan konsultasi terhadap sarana dalam pembuatan CAPA
- Meningkatkan monitoring terhadap sarana dalam perbaikan tindakan ketidaksesuaian (CAPA)
- Meningkatkan koordinasi dengan stokeholder terkait.

e. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder kategori Baik antara lain :

1. Melakukan sosialisasi ke pelaku usaha pada saat pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar agar memberikan feedback atas hasil pemeriksaan sarana maksimal.
2. Penggunaan _aplikasi Smart POM yang berfungsi untuk mempercepat rekomendasi hasil pemeriksaan dan feedback lintas sector (Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten) atas temuan hasil pemeriksaan oleh petugas Balai Besar POM di Makassar belum optimal.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Berdasarkan evaluasi kinerja triwulan sebelumnya, untuk meningkatkan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder diwilayah kerja BBPOM Makassar, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar.
2. Advokasi dan Koordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam penggunaan Anggaran Dana Alokasi Khusus bidang obat dan makanan, untuk 12 kabupaten/kota yang mendapatkan DAK non Fisik bidang obat dan makanan pada tahun 2021
3. Meneruskan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dengan menggunakan aplikasi smart POM serta melakukan evaluasi dan monitoring feedback dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.

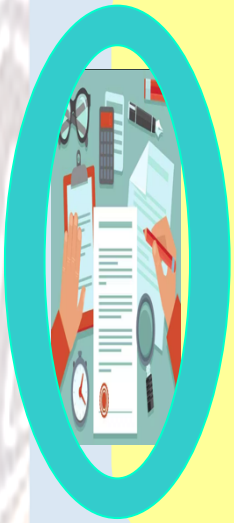

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup surat hasil Pemeriksaan sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan, Rekomendasi atas hasil pemeriksaan sarana dalam rangka perijinan Industri Kosmetik dan pendirian PBF pada tahun berjalan.
yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan.

Capaian indkator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar sebesar 66,19 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase Keputusan penilaiaan Sertifikasi} = \frac{\text{keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan}} \times 100\ \%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II Tahun 2021

Capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan II Tahun 2021 adalah 75,21 % dengan realisasi sebesar 66,19 keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dibawah dari target yang telah diperjanjikan sebesar 88 % dengan kriteria Cukup.

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan II Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	66,19	75,21	Cukup

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan keputusan penilaian sertifikasi pada triwulan II tahun 2021 yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 184 keputusan terhadap jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada triwulan II Tahun 2021 sebanyak 278 Jumlah permohonan penilaian sertifikasi.

Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 184 terdiri atas :

- Surat Keterangan Impor (SKI) : 15
- Surat Keterangan Ekspor (SKE) : 33
- Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB : 83
- Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga : 53

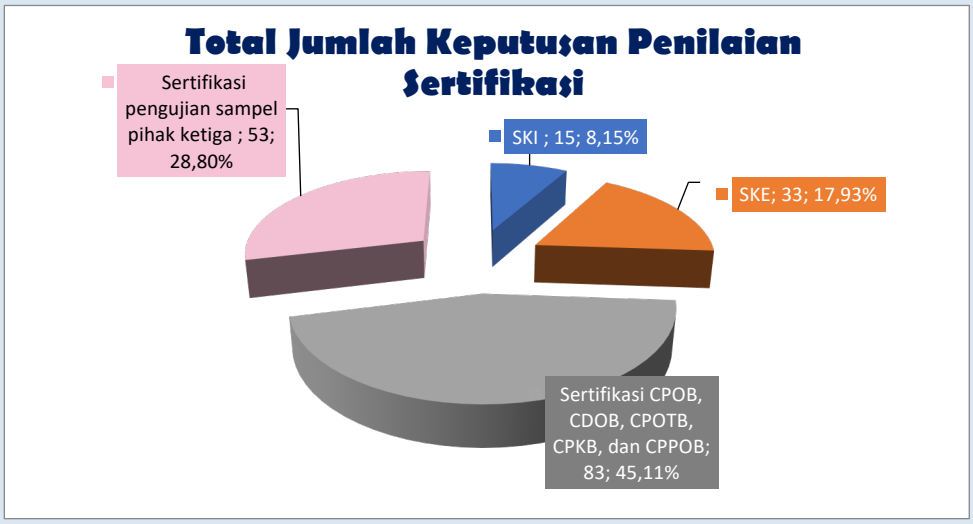

Gambar 3.19.

Jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada triwulan II tahun 2021

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup surat hasil Pemeriksaan :

- sarana produksi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk,
- pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB,
- penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan,
- Rekomendasi atas hasil pemeriksaan sarana dalam rangka perijinan Industri Kosmetik dan pendirian PBF.
- hasil pengujian sampel pihak ketiga

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian triwulan II Tahun 2021 dengan triwulan II Tahun 2020

Tabel 3.26. Perbandingan realisasi dan capaian indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar triwulan II Tahun 2021 dengan triwulan II Tahun 2020.

Indikator Persentase keputusan penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan I Tahun 2021	85	68,18	80,21	Cukup
Triwulan II Tahun 2021	88	66,19	75,21	Cukup

Terdapat penurunan realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar triwulan II tahun 2021 dibanding triwulan I Tahun 2021 dari nilai 68,18 menjadi 66,19, capaiannya mengalami peninngkatan 1,99 point, pada kategori Cukup.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2021 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.27. Perbandingan realisasi indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar triwulan II Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target triwulan II 2021	Target 2024	Realisasi triwulan II 2021	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu					
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	97	66,19	68,24	Kurang

indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar triwulan II Tahun 2021 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Kurang. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis Penyebab Capaian Kinerja dan Alternatif Solusi

Faktor Pendukung Capaian kinerja .

Hal yang mempengaruhi capaian keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Selatan kategori baik disebabkan :

- Capaian kinerja persentase kepetusan penilaian sertifikasi untuk Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK untuk

lingkup BBPOM di Makassar sebanyak 108 jumlah pemohon terdapat 83 Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu atau sebanyak 76,85 % yang sesuai dengan time line

- Faktor yang juga berkontribusi terhadap nilai capaian persentase keputusan penilaian serrtifikasi dibawah dari target yang diperjanjikan adalah Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga yang sesuai dengan timeline yaitu 53 dari 118 jumlah pemohon atau mencapai 44,92 % sesuai timeline. Namun Hal ini tidak sejalan dengan semakin meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM Makassar.
- Pelaksanaan Bimtek Percepatan Penerapan Mandatori CDOB dan Pelayanan *Desk* CAPA
- Petugas melakukan konfirmasi kembali kepada pelaku usaha tentang kesiapan dan komitmennya dalam memenuhi persyaratan CPPOB/CPOTB/CPKB/CDOB.
- Melaksanakan Desk CAPA untuk membantu sarana dalam membuat CAPA
- Petugas melakukan fasilitasi/pendampingan UMKM dalam memenuhi persyaratan sarana produksinya.

Alternatif Solusi

- Melakukan Forum Konsultasi Publik secara berkala kepada pelanggan layanan
  pengujian pihak ke 3 agar dalam menentukan kebjakan Layanan Pengujian Pihak ke 3 dapat dilibatkan dan dikomuikasikan kepada seluruh pelanggan sehingga kebijakan dapat dilaksanakan secara transparan kepada pihak ke 3.
- Koordinasi dengan Instansi Terkait/ Pemerintah Daerah dalam hal pengujian melalui Jejaring Laboratorium di daerah Peningkatan kompetensi personil Laboratorium dalam hal pengujian.
- Koordinasi dengan dinas terkait di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM di wilayah Sulawesi Selatan Petugas memastikan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi GMP sarana produksi
- Petugas akan mengkonfirmasi kembali pelaku usaha dengan kesiapan dan komitmennya untuk memenuhi persyaratan audit sertifikasi.Peningkatan pemahaman dan pengawalan terhadap sarana distribusi terutama sarana distribusi obat terkait persyaratan minimal yang wajib dipenuhi oleh sarana distribusi
- Perkuatan kompetensi SDM Bidang Pemeriksaan terkait pendampingan dan inspeksi pada sarana distribusi yang tidak tertib administrasi CDOB di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar
- Pemberian layanan konsultasi sebelum dilakukan pemeriksaan sarana akan lebih ditingkatkan

e. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu kategori Sangat Baik antara lain :

a) Peningkatan kompetensi SDM petugas dengan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis seiring dengan peningkatan Indeks Profesionalisme pegawai

b) Peningkatan koordinasi lintas sektor agar dapat meningkatkan daya ungkit kegiatan pendampingan pelaku usaha obat dan makanan

c) Dengan adanya masa darurat COVID-19, tetap dilakukan upaya peningkatan pengetahuan pelaku usaha tentang GMP dan registrasi melalui webinar (secara online)

d) Peningkatan monitoring timeline penyelesaian keputusan sertifikasi

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Berdasarkan evaluasi kinerja triwulan sebelumnya, untuk meningkatkan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diwilayah kerja BBPOM Makassar, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar.
2. Advokasi dan Koordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam penggunaan Anggaran Dana Alokasi Khusus bidang obat dan makanan, untuk 12 kabupaten/kota yang mendapatkan DAK non Fisik bidang obat dan makanan pada tahun 2021
3. Meneruskan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dengan menggunakan aplikasi smart POM serta melakukan evaluasi dan monitoring feedback dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

- Sarana Produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, sel punca dan rumah sakit).
- Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.
- Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal.

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP.
- TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.
- TMK untuk sarana produksi IRTP adalah yang memperoleh level 3 dan 4.
- Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT
-Untuk sarana produksi IOT tidak memennuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.
- Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.
- Sarana produksi kosmetik mencakup golongan A dan B
- TMK apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major
- Sarana produksi Suplemen Kesehatan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major
- Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP.
- TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.
- TMK untuk sarana produksi IRTP adalah yang memperoleh level 3 dan 4.

3. Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT
   - Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.
   - Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.
4. Sarana produksi kosmetik mencakup golongan A dan B
   - TMK apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major
5. Sarana produksi Suplemen Kesehatan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis /5 major.

Pada triwulan II Tahun 2021 BBPOM di Makassar telah optimal Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan capaian 61 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase sarana Produksi yang Memenuhi Ketentuan} = \frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan}}{\text{target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan untuk diperiksa}} \times 100\ \%$$

Tabel 3.28

Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	61,00	119,61	Sangat Baik

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II Tahun 2021

Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar triwulan II Tahun 2021 adalah 119,61 % dengan realisasi sebesar 61,00 % sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar di atas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 51 % dengan kriteria Sangat Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan sebanyak 61 sarana terhadap target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan untuk diperiksa sebanyak 100 sarana.

Jenis sarana produksi yang disampling yaitu :

- Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP.
  a. TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.
  b. TMK untuk sarana produksi IRTP adalah yang memperoleh level 3 dan 4.
- Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT
  a. Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.
  b. Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.
- Sarana produksi kosmetik mencakup golongan A dan B
  - TMK apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major
- Sarana produksi Suplemen Kesehatan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.

Keseluruhan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada triwulan II Tahun 2021 adalah 100 sarana produksi diwilayah kerja BBPOM di Makassar yang selesai diperiksa, dari 100 sarana tersebut terdapat 39 Sarana produksi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan terdiri atas :

- Industri Kosmetik : 0 Sarana

- Industri Obat Tradisional : 2 Sarana
- Industri Pangan : 25 Sarana
- Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) : 12 Sarana

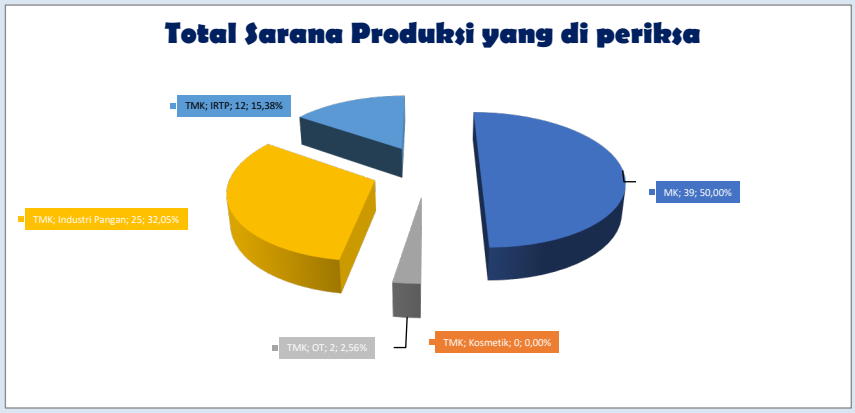

Grafik 3.6
Jumlah Sarana Produksi nyang diperiksa triwulan II Tahun 2021

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian triwulan II Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2021.

Tabel 3.29. Perbandingan realisasi dan capaian indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar triwulan II Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2021

Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan I Tahun 2021	51	57,45	112,64	Sangat Baik
Triwulan II Tahun 2021	51	61	119,61	Sangat Baik

Terdapat peningkatan realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar triwulan II tahun 2021 dibanding triwulan I Tahun 2021 dari nilai 112,64 menjadi 119,61 capaiannya mengalami peninngkatan 6,97 point, pada kategori Sangat Baik. yang berarti bahwa BBPOM di Makassar di telah berhasil meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2021 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.30. Perbandingan realisasi indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diwilayah kerja BBPOM di Makassar triwulan II Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target triwulan II 2021	Target 2024	Realisasi triwulan II 2021	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	67	61	91,04	Baik

Realisasi indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar triwulan II Tahun 2021 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Baik Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan dan sistematis agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis Penyebab Capaian kinerja dan alternatif solusi

Analisis Penyebab Capaian kinerja

Hal yang mempengaruhi capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori sangat Baik disebabkan 61 sarana industri pangan olahan sejumlah 36 sarana yang memenuhi ketentuan dan sisanya sebanyak 25 sarana produksi pangan olahan tidak dapat memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dan CPPOB (untuk Produsen pangan olahan). Penyebab sarana produksi pangan olahan tidak dapat memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dan CPPOB antara lain :

- Pelaku usaha sarana produksi pangan olahan tidak konsisten dalam menerapkan CPPOB
- Tidak semua karyawan yang bekerja di sarana produksi memahami CPPOB

Alternatif Solusi

- Peningkatan pemahaman dan pengawalan terhadap sarana produksi terutama sarana industri pangan dan industri rumah tangga pangan terkait persyaratan minimal yang wajib dipenuhi oleh sarana produksi
- Perkuatan kompetensi SDM seksi sertifikasi terkait pendampingan pada sarana Industri pangan dan IRTP tentang pemenuhan standar minimal hygine sanitasi pada sarana produksi industri pangan diwilayah kerja Balai Besar POM di Makassar
- Koordinasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten lebih ditingkatkan dalam melakukan pembinaan bagi pelaku usaha sarana produksi IRTP yang berada di wilayah kerjanya

e. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori Baik antara lain :

Telah diadakan forum komunikasi untuk inspektur CPOTB, forum Manajemen Inspeksi CPOB selain itu juga diadakan kegiatan pembelajaran daring peraturan dibidang pangan olahan yang diikuti oleh inspektur pangan di seluruh UPT Badan POM dan sosialisasi tools inspeksi CPPOB. Adanya kegiatan-kegiatan tersebut juga membantu menyamakan persepsi para inspektur dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan menyampaikan permasalahan dilapangan yang perlu dibahas ke tingkat nasional dalam rangka perbaikan norma, standar dan kebijakan.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Berdasarkan evaluasi kinerja triwulan sebelumnya, untuk meningkatkan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Mengawal ketat perencanaan pemeriksaan sarana secara daring dan luring setiap bulannya dengan mempertimbangkan penyerapan anggaran, pencapaian target dan protokol kesehatan, serta kebijakan pemerintah setempat dan induk organisasi terkait pengendalian penyebaran Covid-19.

- Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan yang disampaikan oleh sarana sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar.
- Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan dilapangan terutama pemeriksaan secara luring terkait protokol Covid-19 yang diterapkan oleh pelaku usaha yang dapat mempengaruhi kelancaran pemeriksaan dan pencapaian target pemeriksaan sarana produksi.

2. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.

Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.
Sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dihitung terhadap sarana distribusi yang diprioritaskan.
Sarana distribusi yang diprioritaskan adalah sarana distribusi yang ditetapkan melalui analisa risiko. Analisa risiko dilakukan mengacu pedoman tindak lanjut hasil pengawasan (SK Deputi Tahun 2016) yang berlaku.
Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.

efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan dicapainya target Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan capaian 78,93 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Presentase sarana Distribusi yang Memenuhi Ketentuan} = \frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan}}{\text{target jumlah sarana Distribusi Obat Dan Makanan yang di diprioritaskan untuk diperiksa}} \times 100\ \%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II Tahun 2021

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II Tahun 2021 adalah 134,99 % dengan realisasi sebesar 81,00 % sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, diatas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 60 % dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

Tabel 3.31

Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	81,00	134,99	Tidak dapat disimpulkan

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan sebanyak 537 sarana terhadap target jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan untuk diperiksa sebanyak 663 sarana.

Jenis sarana distribusi yang diperiksaa yaitu :

a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.

c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.

d. Sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dihitung terhadap sarana distribusi yang diprioritaskan.

e. Sarana distribusi yang diprioritaskan adalah sarana distribusi yang ditetapkan melalui analisa risiko. Analisa risiko dilakukan mengacu pedoman tindak lanjut hasil pengawasan (SK Deputi) yang berlaku.

f. Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

g. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.

Capaian indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar pada triwulan II Tahun 2021 adalah 81,00 % diatas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 60 % dengan kriteria tidak dapat disimpulkan .

Keseluruhan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada triwulan II Tahun 2021 adalah 663 sarana diwilayah kerja BBPOM di Makassar yang selesai diperiksa, dari 663 tersebut terdapat 126 Sarana distribusi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan terdiri atas :

- Pedagang Besar Farmasi (PBF) : 4 Sarana
- Apotik : 45 Sarana
- Toko Obat : 3 Sarana
- Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) : 5 Sarana

- Rumah Sakit (RS) : 4 Sarana
- Puskemas : 8 Sarana
- Klinik : 2 Sarana
- Fasilitas Distribusi Obat Tradisional : 16 sarana
- Fasilitas Distribusi Suplemen : 1 sarana
- Fasilitas Distribusi Kosmetik : 22 sarana
- Fasilitas Distribusi Pangan Olahan : 16 sarana

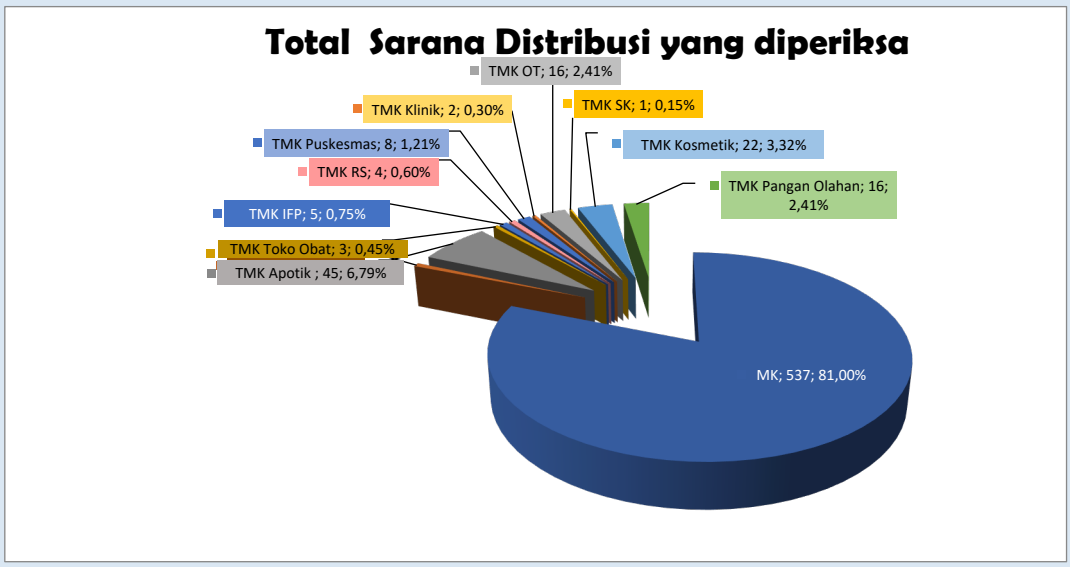

Gambar 3.7

Jumlah Sarana Distribusi yang diperiksa triwulan II Tahun 2021

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Triwulan I Tahun 2021

Tabel 3.32. Perbandingan realisasi dan capaian indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Makassar triwulan II Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2021

Indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan II Tahun 2020	60	78,93	131,55	Tidak dapat disimpulkan
Triwulan II Tahun 2021	60	81,00	134,99	Tidak dapat disimpulkan

Terdapat peningkatan target indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar triwulan II Tahun 2021 dibandingkan triwulan I Tahun 2021 , Jika dibandingkan dengan capaian tiwulan I Tahun 2021, terjadi kenaikan sebesar 3,44 point yang berarti bahwa BBPOM di Makassar di telah berhasil meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.33. Perbandingan realisasi indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Makassar triwulan II Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target triwulan II 2021	Target 2024	Realisasi triwulan II 2021	% Capaian	Kriteria
persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	80	81,00	101,25	Baik

indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Makassar triwulan II Tahun 2021 **telah mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan dan sistematis agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung Capaian kinerja dan alternatif solusi

Faktor Pendukung Capaian Kinerja

Hal yang mempengaruhi capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori tidak dapat disimpulkan :

- Pada triwulan II Tahun 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat (PBF, IF Kab/Kota, Apotek, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Distribuso OT, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan). Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 537 sarana (81 %) memenuhi ketentuan dan 126 sarana (19 %) tidak memenuhi ketentuan. Sarana yang memiliki persentase memenuhi ketentuan dibawah target 60 % adalah Toko Obat (57,14 %) . Hal ini disebabkan karena penetapan sarana pemeriksaan sarana distribusi obat telah menggunakan analisis resiko, dimana

sarana dengan analisis resiko tertinggi yang akan diperiksa. Beberapa hal ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat pemeriksaan antara lain terdapat sarana yang masa berlaku ijin nya sudah habis tetapi masih tetap melakukan penjualan obat, terdapat beberapa audit komprehensif dari PBF ke apotek dan diperoleh hasil apotek yang bertindak seperti distributor dan menyalurkan obat dalam jumlah besar ke paramedis dan perorangan, selain itu ditemukan juga PBF dan apotek yang melakukan panel penjualan obat.

- Selain pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat, pada triwulan II tahun 2021 BBPOM di Makassar juga telah melakukan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan sebanyak 663 sarana. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 537 sarana (81 %) memenuhi ketentuan dan 126 sarana (19 %) tidak memenuhi ketentuan. Keseluruhan sarana memiliki persentase memenuhi ketentuan diatas target 60 % adalah distribusi PBF (82,61 %), Instalasi Sediaan Farmasi (70,59), Rumah sakit (89,74), Puskesmas (94,03), klinik (86,67), distribusi obat tradisional (76,81 %), distribusi Suplemen Kesehatan (96 %) distribusi kosmetik (73,17 %), distribusi pangan olahan (88,15 %). Tingginya angka kepatuhan ini disebabkan sudah adanya efek jera kepada pelaku usaha, sehingga minimnya ditemukan produk tanpa ijin edar (TIE) dan kedaluwarsa di pasaran. Pemeriksaan sarana distribusi obat tersebut lebih difocuskan pada pemeriksaan sarana di puskesmas yaitu sejumlah 89 sarana dengan hasil 71 sarana memenuhi ketentuan dan 18 sarana tidak memenuhi ketentuan.

Alternatif Solusi

1. Dikarenakan terjadinya pandemic Covid 19 sejak tahun 2020 hingga triwulan II Tahun 2021 terjadi perubahan tehadap target sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa. Perubahan ini juga menyebabkan tejadinya penyesuaian cara pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan, dimana untuk sarana dengan risiko tinggi (*high risk*) terjadinya penularan covid 19 (rumah sakit, puskesmas, klinik), maka pemeriksaan sarana dilakukan secara intensif pada sarana Obat utamanya di puskesmas.

    - Dilakukan pendampingan pada saat melakukan Pemeriksaan di Puskesmas sehingga diharapkan puskesmas yang diperiksa memenuhi ketentuan. Pendampingan tersebut berupa sosialisasi SOP, dimana petugas pemeriksa menjelaskan titik2 kritis yang harus ada pada SOP dan penyampaian contoh prosedur kerja (SOP) dan form-form terkait pengelolaan vaksin di sarana pelayanan kefarmasian. Adapun SOP dan form yang disosialisasikan pada saat pemeriksaan antara lain SOP Pemantauan suhu vaksin Covid-19; SOP Pengiriman Vaksin Covid-19; SOP Verifikasi termometer di Saryanfar dalam kondisi darurat Pandemi Covid-19; SOP Penyimpanan vaksin di fasyanfar; SOP Pemusnahan vial bekas vaksinasi Covid-19; SOP Pencatatan mutasi vaksin di Fasyanfar; SOP penanganan situasi darurat; form pencatatan vial bekas vaksinasi covid-19 yang telah dimasukkan dalam kantong; form Berita acara pemusnahan vial bekas vaksinasi Covid-19; dan form rekap vial bekas vaksinasi Covid 19 yang telah dimusnahkan.
    - Selain itu terdapat pendampingan berupa verifikasi pembacaan dengan thermometer terkalibrasi karena masalah utama pada pengelolaan produk rantai dingin (Cold Chain Product) di sarana pelayanan kefarmasian adalah alat monitoring suhu penyimpanan yang belum terkalibrasi.
    - BPOM melakukan sosialisasi melalui webinar atau video YouTube terkait cara pengelolaan produk rantai dingin (Cold Chain Product). Dengan banyaknya intervensi yang dilakukan mengakibatkan meningkatnya pengetahuan pengelola vaksin sehingga pada saat pemeriksaan sarana memenuhi ketentuan.

e. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori Tidak dapat disimpulkan antara lain :

- Pada bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang, terdapat program intensifikasi pengawasan vaksin di sarana distribusi dan pelayanan obat, yaitu di puskesmas, instalasi farmasi kab/kota, instalasi farmasi provinsi dan rumah sakit. Program intensifikasi ini berimbas terhadap target pemeriksaan, dimana target pemeriksaan di focuskan pada sarana-sarana intensifikasi tersebut.
- Terdapat tools intensifikasi pengawasan vaksin di sarana puskesmas dan rumah sakit. Pada tools tersebut focus pemeriksaan lebih kepada pengelolaan vaksin, sehingga aspek lain tidak direview. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian jumlah sarana yang memenuhi ketentuan.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Berdasarkan evaluasi kinerja triwulan sebelumnya, untuk meningkatkan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Balai Besar POM di Makassar melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dengan kombinasi antara menggunakan metode online dan pemeriksaan secara onsite dengan memperhatikan analisa resiko sarana sesuai jumlah target pemeriksaan dan tetap melaksanakan protocol kesehatan.
- Balai Besar POM di Makassar pada triwulan II tahun 2021 telah diundang menjadi narasumber pada kegiatan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Organisasi Profesi, memberikan pengetahuan tentang bagaimana pengelolaaan obat yang benar. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan para pelaku usaha megetahui bagaimana cara mengelola obat yang benar sehingga akan meningkatkan persentase distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.
- Upaya untuk meningkatkan angka persentase distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan yang memenuhi ketentuan, BBPOM di Makassar juga rutin melakukan KIE kepada masyarakat terkait memilih produk obat dan makanan yang aman. Diharapkan melalui KIE masyarakat dapat memilih obat dan makanan yang aman dan dapat memutus rantai demand dari peredaran produk yang TIE (Tanpa Ijin Edar).
- Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan dilapangan.

6. Indeks Pelayanan Publik

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Aspek Pengukuran

- **a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);**
- **b. Profesionalitas SDM (18%);**
- **c. Sarana Prasarana (15%);**
- **d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);**
- **e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);**
- **f. Inovasi (7%).**

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II Tahun 2021

Capaian indikator Indeks Pelayanan Publik pada triwulan II Tahun 2021 belum ada penilaian, dimana target akhir Tahun 2021 adalah 3,76 .

Tabel 3.34

Target Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik triwulan II Tahun 2021

Indikator	Target 2021	Target TW II 2021	Realisasi TW II 2021	Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	3,76	-	4,35	115,69	Sangat Baik

Indeks Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- Profesionalitas SDM (18%);
- Sarana Prasarana (15%);
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);

- Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indeks Indeks Pelayanan Publik (IPP) Badan POM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM.

Cara perhitungan indikator ini

- Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)
- Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Untuk tahun 2021, target nilai IPP adalah sebesar 4,36, pada triwulan II ini nilai IPP yang diperoleh BBPOM di Makassar adalah 4,35 dengan kategori A.- (Sangat Baik), dibandingkan dengan target akhir Tahun 2021 maka capaiannya adalah 115,69.

Keberhasilan tersebut dicapai dengan upaya-upaya sebagai berikut :

- Perbaikan sarana dan prasana untuk dapat memenuhi standar pelayanan yang baik bagi masyarakat. Kelengkapan sarana yang telah dilakukan di tahun 2021 adalah pengadaan mesin layanan antrian, melengkapi toilet untuk layananpublik
- Pelatihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme petugas pelayanan publik
- Pembuatan list gap kompetensi, sehingga petugas layanan yang masih belum memadai bisa diprioritaskan untuk mendapatkan pelatihan
- Pembuatan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sasaran 5

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Makassar sebagai berikut :

1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	3 Jumlah desa pangan aman
2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
Target 86,87 Realisasi 91,87 Capaian 105,76 %

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
Target - Realisasi - Capaian -

Jumlah desa pangan aman
Target - Realisasi - Capaian -

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
Target - Realisasi - Capaian -

Pada sasaran strategis keenam "Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan 4 indikator antara lain :

1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

1) KIE melalui media cetak dan elektronik
2) KIE langsung ke masyarakat dan
3) KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *faceto face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*.

Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar , menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan

Tabel 3.34

Target Kinerja Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan II Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,87	91,87	105,76	Baik

Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;

b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;

c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;

d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Balai Besar POM di Makassar dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dilakukan dengan menggunakan tools pada link yang telah disiapkan oleh Biro HDSP terhadap minimal 32 orang responden yang telah mengikuti/menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai Media.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial.

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian triwulan II Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2021

Tabel 3.60. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar triwulan II Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2021

Indikator Indeks Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan I Tahun 2021	86,87	93,28	107,37	Baik
Triwulan II Tahun 2021	86,87	91,87	105,76	Baik

Terdapat penurunan target indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar triwulan II Tahun 2021 dibandingkan triwulan I Tahun 2021, yaitu sebesar 1,61 point.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.61. Perbandingan realisasi Indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan triwulan II Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2021	Target 2024	Realisasi tw II 2021	% Capaian	Kriteria
Indeks Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan	86,87	92,18	91,87	99,66	Baik

indikator Indeks Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan triwulan II tahun 2021 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat lebih meningkat menjadi kategori Sangat Baik.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan baik antara lain :

- Meningkatnya frekuensi KIE tatap muka langsung bersama Tokoh Masyarakat pada bulan Januari sampai dengan Juni 2021 dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Pada Tahun 2021 BBPOM Makassar telah melaksanakan sebanyak 14 kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI di berbagai Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
- Pembuatan konten KIE di media social dalam berbagai bentuk seperti infografis dan video sehingga interaksi dengan masyarakat meningkat
- Kebijakan pemerintah selama masa pandemik Covid 19, salah satunya adalah Work From Home (WFH), sehingga pelayanan public yang dilakukan mayoritas melalui aplikasi WhatsApp
- Selama masa pandemic dibuka layanan informasi melalui media sosial untuk tetap meningkatkan pengetahuan dan pemahamanan masyarakat tentang keamanan dan mutu Obat dan Makanan sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku dalam memilih Obat dan Makanan
- Layanan informasi melalui media social ditingkatkan (facebook, Instagram, tweeter)

Di tiap titik kegiatan KIE dihadiri oleh kurang lebih 250 orang – 500 orang. Indeks efektifitas KIE pada Tahun 2020 sebesar 91,87 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial dll. Kontribusi masing masing aspek adalah : aspek ragam kegiatan; aspek pemahaman; aspek manfaat dan aspek minat. Aspek pemahaman dan manfaat merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indek efektifitas KIE. Bergerak dari hasil

survey ini harus menjadi kajian dan masukan bagi BBPOM di Makassar untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekwensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai.

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Hasil survey Tingkat Efektifitas KIE yang jauh melebihi target merupakan hasil kerja keras selama triwulan I dan II tahun 2021. Namun BBPOM Makassar harus tetap konsisten melaksankan program intensitas pelaksanaan KIE. Berbagai upaya KIE dengan biaya yang lebih murah melalui media sosial harus terus dilakukan. Demikian juga dengan pelibatan berbagai unsur dan komunitas dalam masyarakat harus tetap dijaga sehingga relasi positif dengan BBPOM Makassar tetap terjalin
- Pelayanan informasi melalui media lebih ditingkatkan, bukan hanya melalui infografis juga melakukan Ig Live dan Webwinar
- Hingga triwulan II Tahun 2021 BBPOM Makassar telah melaksanakan sebanyak 14 kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI di berbagai Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Di tiap titik kegiatan KIE dihadiri oleh kurang lebih 250 - 500 orang. Indeks efektifitas KIE pada triwulan IV sebesar 91,87 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial dll. Kontribusi masing masing aspek adalah : aspek ragam kegiatan; aspek pemahaman; aspek manfaat dan aspek minat.

d. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Nilai indikator “Pemahaman” sebagai kontribusi terbesar pada pencapaian indeks dapat disebabkan beberapa hal antara lain:
  b. Meningkatnya KIE secara daring dalam bentuk webinar di masa pandemi.
  c. Pembuatan konten KIE di media sosial dalam berbagai bentuk seperti infografis, videografis, video, dan kuis sehingga interaksi dengan masyarakat meningkat.
  d. Pada triwulan II juga telah dilaksanakan KIE tatap muka di berbagai daerah dengan pembatasan jumlah peserta dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
  e. Penyebaran produk informasi kepada masyarakat dalam cakupan yang sangat besar.
- Kontributor kedua pada pencapaian indeks Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan “Manfaat”, yang artinya masyarakat merasakan manfaat kegiatan KIE.
- Jenis media KIE yang digunakan memiliki pengaruh terhadap efektivitas KIE BPOM, untuk jenis penyuluhan, Virtual (Webinar/seminar online/daring), Media Sosial (Instagram BBPOM di Makassar (@bbpom_makassar), Twitter BBPOM di Makassar (@BBPOM_Makassar), Facebook BBPOM di Makassar (@Bbpom Makassar), Youtube BBPOM di Makassar (BBPOM di Makassar), Whatsapp Grup (0852 11111 533), Telegram) memiliki indeks yang lebih tinggi dibanding media yang lain. Hal ini disebabkan karena Jenis media penyuluhan dan Virtual memiliki kedekatan komunikasi dua arah antara BBPOM di Makassar dengan masyarakat/ audiens.
- Mayoritas masyarakat ‘Berminat” dan “sangat berminat” mengikuti kegiatan KIE BPOM. Informasi/topik yang paling banyak diminati adalah Pangan Olahan, karena terkait dengan kebutuhan pokok, topik berikutnya yang diminati adalah mengenai

Obat dan Kosmetik. Topik lainnya yang diminati masyarakat diantaranya mengenai tata cara registrasi, informasi tentang air minum isi ulang, Alkes dan PKRT, isu terkini, informasi COVID-19, dll.

- Kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat secara langsung ternyata masih merupakan kegiatan KIE yang berdampak paling besar pada pencapaian pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain karena sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan tinggal di pedesaan dan kegiatan KIE secara langsung ini merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat, apalagi jika dihadiri oleh tokoh masyarakat atau pemuka agama. Hal ini di lakukan agar kehadiran BBPOM di Makassar dapat dirasakan oleh masyarakat di pedesaan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya perbaikan pelayanan publik BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- Hasil survey Tingkat Efektifitas KIE yang melebihi target merupakan hasil kerja keras selama sampai dengan triwulan II tahun 2021 baik dari Tim BBPOM Makassar maupun Tim Tokoh Masyarakat. Namun demikian hal ini tidak boleh membuat BBPOM di Makassar lengah dan mengurangi intensitas pelaksanaan KIE. Berbagai upaya KIE dengan biaya yang lebih murah melalui media sosial dan KIE dengan medote daring harus terus dilakukan. Demikian juga dengan pelibatan berbagai unsur dan komunitas dalam masyarakat harus tetap dijaga sehingga relasi positif dengan BBPOM di Makassar tetap terjalin. Asosiasi pelaku usaha juga merupakan asset yang banyak membantu BBPOM di Makassar sebagai salah satu pilar dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM).
- Berbagai media yang selama ini digunakan oleh BBPOM Makassar akan dilakukan evaluasi untuk menentukan media mana yang paling banyak menjaring minat masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar informasi tentang obat dan makanan.
- Memperluas jangkauan KIE melalui media sosial yang bisa diakses oleh generasi millennial.
- Mempertahankan KIE melalui radio, televisi, media cetak/koran yang sampai saat ini masih diakses oleh generasi non millennial.

2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan.

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya dikantin sekolah.

Adapun tahapan kegiatan PJAS yaitu :

1. Advokasi PJAS

   Advokasi PJAS bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah.
2. Pemetaan Kantin Sekolah.

   Kegiatan pemetaan kantin sekolah terdiri dari audit pemetaan, operasionalisasi mobil laboratorium keliling (Mobling), komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) keamanan PJAS. Pemetaan kantin sekolah dilaksanakan di sekolah terpilih dari sekolah yang menjadi target intervensi di setiap provinsi.

   Pemetaan kantin sekolah dilaksanakan 1 hari untuk setiap sekolah terpilih sebelum dilaksanakannya bimbingan teknis keamanan pangan di sekolah.
3. Bimbingan teknis keamanan pangan di sekolah Bimbingan teknis bertujuan untuk mensosialisasikan materi keamanan pangan kepada komunitas sekolah; memberdayakan dan mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam penyediaan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi; mencetak Duta Pangan Aman yang berperan sebagai *agent of change* implementasi program keamanan pangan di sekolah; dan mencetak Kader Keamanan Pangan Sekolah dalam implementasi program keamanan pangan di sekolah.
4. Pelatihan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS) Dalam rangka mewujudkan kemandirian komunitas sekolah dalam melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu, maka perlu dilakukan Pelatihan PBKPKS yang mendorong komunitas sekolah terutama pengelola kantin sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan yang baik dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah atas penerapannya
5. Audit Surveilan PBKPKS.

   Setelah diberikan Pelatihan PBKPKS, l;>dilakukan Audit PBKPKS bertujuan untuk menilai pemenuhan persyaratan keamanan pangan di kantin sekolah. Agar lebih komprehensif, pada saat kegiatan Audit PBKPKS juga dilakukan operasionalisasi mobil keliling dan evaluasi pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa untuk mengetahui gambaran dari hasil intervensi keamanan pangan yang telah dilakukan. Audit surveilan PBKPKS yang dilakukan secara berkala diharapkan mampu memotivasi komunitas sekolah untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan secara konsisten sehingga praktik keamanan pangan menjadi budaya di lingkungan sekolah. Kegiatan Audit Surveilan dan Pengawalan PBKPKS di daerah diharapkan dapat mengawal kemandirian sekolah khususnya dalam implementasi keamanan pangan di kantin sekolah. Audit surveilan dilakukan terhadap kantin sekolah yang sudah mendapatkan sertifikat PBKPKS (Periode 2017-2019).

Pada Tahun 2021, target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar. Pada triwulan pertama hingga ketiga tahun 2021 belum ada realisasi untuk ind?ikator ini, sehingga capaian baru bisa dilihat pada TW IV. Secara tahapan kegiatan pada triwulan II telah mencapai 28,13 %. Tahapan

kegiatan yang telah terlaksana adalah tahap di point 1 – 3 (Advokasi Lintas Sector keamanan PJAS; Sosialisasi Keamanan Pangan; Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah), sedangkan tahap point 4 – 7 dijadwalkan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan intervensi PJAS adalah :
Adanya pandemi covid sehingga sekolah libur panjang, aktifitas kantin dan yang lain terhenti sementara. Murid sebagai subyek masih belum bisa dilibatkan karena sebagian besar orang tua masih melarang.

Upaya-upaya perbaikan / rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program sekolah dengan PJAS aman adalah:

- Beberapa kegiatan dilakukan secara daring atau secara luring dengan pembatasan peserta dan penerapan protokol kesehatan.
- Mengikuti juknis baru yang telah disesuaikan dengan kondisi new normal terkait adanya pandemi covid.

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar, menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan

3. Jumlah desa pangan aman

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain .

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata

Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain

Pada tahun 2020, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Jumlah desa pangan aman. Tahapan Kegiatan GKPD, yaitu :

1. Advokasi Kelembagaan Desa yang bertujuan untuk menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah.

2. *Gap Asessment* merupakan penilaian awal terhadap pengetahuan kader dan komunitas desa mengenai keamanan pangan dan kemampuannya dalam melaksanakan praktek keamanan pangan.

Gap asessment dilakukan untuk melihat permasalahan keamanan pangan yang selama ini terjadi di masyarakat. Dalam rangka *gap asessment* Gerakan Keamanan Pangan Desa, Tim GKPD BBPOM di Makassar bersama fasilitator lapangan dan 6 enumerator melaksanakan survei terhadap kader dan komunitas desa yang berlokasi di 4 desa yang akan diintervensi program gerakan keamanan pangan desa. Responden yang diambil datanya merupakan calon kader dan calon komunitas desa/usaha pangan desa yang akan mengikuti bimtek dan fasilitasi keamanan pangan. Hasil *gap assessment* dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan strategi intervensi yang tepat untuk masyarakat desa sehingga program ini dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

3. Pelatihan korlap dan kader KPD (Kompetensi Keamanan Pangan)

Setelah diperoleh data *baseline* pengetahuan komunitas desa yang akan diintervensi, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan Korlap dan kader KPD (Kompetensi Keamanan Pangan). Pelatihan kader desa merupakan kegiatan untuk membekali kemampuan kader tentang keamanan pangan.

Pelatihan untuk kader ini penting dilakukan agar kader tersebut dapat mendampingi komunitas desanya dalam menerapkan prinsip keamanan pangan serta dapat melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan pada praktek keamanan pangan di lingkungannya. Indikator keluaran kegiatan ini adalah jumlah kader keamanan pangan yang dilatih di bidang keamanan pangan . Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* terdapat peningkatan pengetahuan kader yang dilatih

4. Bimtek Komunitas dan Usaha Pangan Desa

Kader berkewajiban membina komunitasnya dalam menerapkan keamanan pangan dilingkungan desa. Pembinaan oleh kader dilaksanakan dalam bentuk Bimtek Komunitas dan Usaha Pangan Desa dan kegiatan Fasilitasi Keamanan Pangan Desa. Pelaksanaan Bimtek dimulai dengan koordinasi fasilitator lapangan ke masing-masing desa yang akan diintervensi. Bimtek keamanan pangan dilakukan terhadap komunitas masyarakat yang terlebih dahulu telah diambil datanya pada kegiatan *gap assessment*. Komunitas masing-masing terdiri dari 10 orang. Pada kegiatan Bimtek ini juga dilakukan *pre-test* dan *post-test*. Berdasarkan data nilai *pre-test* dan *post-test* peserta Bimteknkomunitas desa dan usaha pangan desa, dapat dilihat adanya peningkatan nilai setelah dilakukan Bimtek, hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pengetahuan komunitas desa dan usaha pangan desa setelah mengikuti Bimtek ini.

5. Fasilitasi keamanan pangan

Dilaksanakan sebagai bentuk pengawalan kepada komunitas desa dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan, sekaligus memastikan bahwa ilmu dan pengetahuan yang dibagikan kepada komunitas dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu mengubah kebiasaan masyarakat desa untuk lebih mengutamakan keamanan dalam mengelola dan mengolah pangan baik dalam rumah tangga maupun dalam usaha pangan yang dijalankannya.

Pengawasan terhadap pangan yang beredar di desa dilakukan dengan pengambilan dan pengujian sampel dalam kegiatan Intensifikasi pengawasan keamanan pangan (*pre* dan *post* intervensi). Petugas BBPOM di Makassar bersama dengan kader melaksanakan pengujian produk pangan menggunakan *rapid test kit* dengan parameter pengujian *Methanyl yellow, Rhodamine B, Boraks dan Formalin.* Dari hasil pengujian tidak ditemukan sampel yang mengandung bahan berbahaya.

Bagi desa yang menerapkan keamanan pangan secara mandiri, Badan POM memberikan apresiasi dalam Desa Pangan Aman *Award* yang diumumkan pada puncak perayaan ulang tahun Badan POM RI setiap tahunnya. Penilaian dilaksanakan setelah intervensi GKPD. Untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan GKPD di Kabupaten yang telah diintervensi pada tahun sebelumnya, dilaksanakan pengambilan data dalam rangka Monev dilaksanakan secara langsung terhadap seluruh kader keamanan pangan desa dan komunitas desa yang diintervensi di setiap desa/kelurahan. Kader dan komunitas desa (masyarakat desa maupun usaha pangan desa) yang telah diintervensi diambil data mengenai pengetahuan, persepsi dan perilaku tentang penerapan prinsip keamanan pangan selama menangani pangan. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dan dijadikan acuan dalam melaksanakan dan melakukan perbaikan pada program GKPD tahun berikutnya.

Selain Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pula kegiatan. Pengawalan terhadap desa/kelurahan yang sudah diintervensi dalam rangka pembentukan Desa Paman Pratama agar dapat dikembangkan menjadi Desa Paman Madya dan selanjutnya menjadi Desa Paman Mandiri. Kegiatan pengawalan ini dilaksanakan oleh petugas BBPOM di Makassar agar desa menjalankan program keamanan pangan secara berkelanjutan.

Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar, menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Dihitung dari Jumlah desa yang :
Desa pangan aman adalah desa yang memenuhi kriteria poin C

Pada tahun 2021, target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar . Pada triwulan pertama hingga ketiga tahun 2021 belum ada realisasi untuk indikator ini.

Secara tahapan kegiatan pada triwulan II telah mencapai 20 %. Tahapan kegiatan yang telah terlaksana adalah tahap di point 1 – 3 (Advokasi kelembagaan Desa; Pengadaan paket informasi keamanan; Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa KKPD), sedangkan tahap point 4 – 8 dijadwalkan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

Adapun tahapan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Kelembagaan Desa
2. Pengadaan paket informasi keamanan
3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa KKPD
4. Bimtek Komunitas sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas
5. Fasilitasi Keamanan Pangan Desa

6. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan
7. Monitoring dan Evaluasi
8. Pengawalan tahun sebelumnya

Faktor penghambat dalam pelaksanaan intervensi Desa Pangan Aman adalah :
Sampai Pada akhir triwulan II tahun 2021 kegiatan Desa Pangan Aman telah melalui beberapa tahap yaitu advokasi, pengadaan paket informasi dan Rapid Test Kit, dan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa Pangan Aman. Advokasi telah dilakukan di 4 Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Kabupaten Barru, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Sinjai; dan Kabupaten Soppeng. Kabupaten Maros merupakan satu satunya yang belum dilakukan advokasi karena terkendala kondisi PPKM Darurat yang diterapkan di Sulawesi Selatan. Sedangkan Pelatihan Kader Keamanan Pangan telah dilakukan di 7 desa dari target 12 desa yang harus diintervensi. Program Keamanan Pangan Desa merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2021 akan dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS).

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 8 pasar, 12 desa dan 40 sekolah yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota tersebut. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Makassar akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirmya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, dll.
Pada saat bimtek kader telah diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk melakukan pengujian bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan menggunakan tes kit. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow. Setelah dilakukan bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim BBPOM Makassar Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri. Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Terpadu ini ke Desa, Pasar atau Sekolah yang lain.
Jika dilihat dari hasil capaian Program Keamanan Pangan Desa hingga Triwulan II ini terdapat beberapa kendala yang cukup berarti. Kondisi pandemi yang telah terjadi sejak tahun 2020 telah membuat BBPOM Makassar menyesuaikan metode pelaksanaan tahapan Prgram Keamanan Pangan Desa sesuai kondisi di masing masing Desa. Penerapan protocol Kesehatan secara ketat selalu diupayakan

sehingga tidak terjadi kluster baru penularan covid 19. Saat ini kegiatan Program Keamanan Pangan Desa dihentikan sementara karena penetapan PPKM Darurat di wilayah Selawesi Selatan sejak Bulan Juni 2021.

Penyelenggaraan Advokasi Program Prioritas Nasional sesuai informasi dilaksanakn setelah Kick Off oleh BPOM Pusat. Karena ada penjadwalan ulang Kick Off Keamanan Pangan Terpadu Kab/Kota Pangan Aman yg semula bulan Februari 2021 menjadi bulan Maret 2021, serta melihat kondisi penyebaran COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan, maka Kegiatan Advokasi Terpadu Lintas Sektor di di Provinsi Sulawesi Selatan yang semula dijadwalkan bulan Maret 2021 baru dapat dilaksanakan pada bulan April 2021.
Hal ini menyebabkan rangkaian kegiatan selanjutnya yaitu Pelatihan Kader Desa Pangan Aman pada 12 desa target intervensi menjadi mundur dan tidak sesuai jadwal yang semula di tetapkan.

Pelaksanaan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa KKPD dilaksanakan seminggu setelah lebaran yaitu pada bulan Mei dan seterusnya hingga terakhir dilaksanakan bulan Juni 2021. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa KKPD telah dilaksanakan pada April Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) Kader GKPD di Kabupaten Barru ; Mei: - Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) di Kabupaten Sidrap & Sinjai ; Juni: Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) di Kabupaten Soppeng, masih menyisakan 2 Kabupaten karena kondisi yang belum memungkinkan terkait covid. (Peberlakuan PPKM Darurat pada Bulan Juli 2021

Upaya-upaya perbaikan / rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program desa pangan aman adalah:

- Tahapan pelaksanaan Program Pasar Aman Berbasis Komunitas akan segera dilanjutkan setelah status PPKM Darurat dicabut dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat memperhatikan kondisi yang berkembang setiap saat.
- Setelah Monev tahap I akan dilaksanakan penyuluhan, kampanye dan Monev tahap II. Jika kondisi tidak memungkinkan maka pelaksanaan penyuluhan dan kampanye akan dilaksanakan secara daring.
- Setelah mulai berjalan kegiatan pertemuan, akan dilaksanakan dengan pemadatan jadwalnya untuk mengejar ketertinggalan.

4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya.).

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.
Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan
peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Kriteria Pasar Aman meliputi :
1. Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
2. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta
3. Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya. Pada triwulan II, II dan III tahun 2021 belum ada realisasi untuk indikator ini, namun tetap dilaporkan *progress* kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan I, II dan III tahun 2021.

Secara tahapan kegiatan pada triwulan II telah mencapai 32,29 %. Tahapan kegiatan yang telah terlaksana adalah tahap di point 1 – 4 (Advokasi Lintas Sector; Survey pasar; Bimtek pengelola pasar; Monev (sampling dan pengujian) tahap 1 Pasar tahun ke n dan pengawalan tahun sebelumnya)), sedangkan tahap point 5 – 8 dijadwalkan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan intervensi Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas adalah :
Sampai pada akhir triwulan II tahun 2021 tahapan kegiatan Pasar Aman Berbasis Komunitas yang telah dilaksanakan adalah audiensi kepada Pemerintah Daerah dan Advokasi kepada Organisasi Perangkat Daerah yang terkait. Kegiatan Audiensi/Advokasi telah dilakukan di beberapa Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Barru, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Sinjai; dan Kabupaten Soppeng. Kabupaten Maros merupakan satu satunya yang belum dilakukan advokasi namun BBPOM Makassar yang dipimpin oleh Kepala BBPOM Makassar telah melakukan audiensi kepada Bupati Maros yang didampingi oleh beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program Pasar Aman Berbasis Komunitas merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2021 akan dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

Adanya pandemi covid sehingga kegiatan terhambat, terutama untuk kegiatan yang bersifat mengumpulkan peserta yaitu Pelatihan Fasilitator Pasar, Penyuluhan Pedagang Pasar dan Kampanye Pasar. Kegiatan ini tidak bisa dilakukan secara daring karena melibatkan komunitas pasar.

Upaya-upaya perbaikan / rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah:

- Kegiatan yang bersifat pertemuan ditunda, sampai kondisi telah memungkinkan untuk dilakukan sosialisasi.
- Melaksanakan kegiatan yang bukan pertemuan yaitu samping dan pengujian dengan menggunakan tes kit oleh petugas pasar.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pasar aman dari bahan berbahaya adalah :

1. Advokasi

Strategi advokasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan dukungan dari pihak yang
terkait, antara lain pemerintah, wakil rakyat, masyarakat maupun media massa. Kampanye Pasar Aman dari Bahan Berbahaya merupakan salah satu bentuk advokasi kepada masyarakat sebagai bagian dari komunitas pasar.

2. Survei Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Survei Pasar dilaksanakan untuk identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan
berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya merupakan tahap kegiatan lanjutan yang harus segera dilaksanakan setelah suatu pasar tradisional ditetapkan sebagai pasar yang akan dikendalikan sebagai pasar aman dari bahan berbahaya. Kegiatan identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya ini bertujuan untuk:

1. Melakukan pendataan identitas pedagang di pasar yang diduga menjual produk bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya.
2. Inventarisasi produk yang dijual oleh setiap pedagang pasar yang diduga sebagai bahan berbahaya dan/atau pangan yang mengandung bahan berbahaya.
3. Memudahkan fasilitator/petugas yang berwenang

3. Bimtek dan Fasilitasi Pasar aman dari bahan berbahaya kepada petugas pasar.

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pedagang pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya. Dengan demikian, diharapkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dapat dihilangkan. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya kepada komunitas pasar, khususnya pedagang pasar; meningkatkan
kesadaran pedagang pasar agar tidak menjual bahan yang dilarang untuk pangan ataupun produk produk yang mengandung bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan.

4. Penyuluhan komunitas pasar

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pedagang pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya. Dengan demikian, diharapkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dapat dihilangkan.

Tujuannya adalah melakukan sosialisasi aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya kepada

komunitas pasar, khususnya pedagang pasar; meningkatkan kesadaran pedagang pasar agar tidak menjual bahan yang dilarang untuk pangan ataupun produk-produk yang mengandung bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan.

5. Kampanye Pasar

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan komunitas pasar tentang

keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan kampanye kepada komunitas pasar, khususnya masyarakat sebagai konsumen. Dengan demikian diharapkan dapat terjadi peningkatan pemahaman sekaligus kesadaran bagi masyarakat sebagai konsumen untuk memilih pangan yang aman dari bahan berbahaya. Penurunan permintaan konsumen diharapkan akan menjadi salah satu langkah untuk meminimalkan kebocoran bahan berbahaya di pasar tradisional.

Metodologi yang digunakan dalam kampanye antara lain dengan penayangan iklan layanan masyarakat, pemutaran spot iklan di radio komunitas pasar, demo pengujian pangan dan bahan berbahaya dengan menggunakan lab keliling, serta penyebaran media informasi. Kegiatan dilaksanakan oleh Petugas Balai Besar/Balai POM bekerjasama dengan petugas pengelola pasar.

Petugas Balai Besar/Balai POM membawa perlengkapan untuk kegiatan kampanye seperti mobil laboratorium keliling, media informasi berupa leaflet, poster tentang keamanan pangan dan bahan berbahaya. Petugas Balai Besar/Balai POM berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, serta

memfasilitasi masyarakat yang berbelanja di pasar untuk memeriksakan keamanan pangan yang dibeli.

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar, menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Dihitung dari Jumlah pasar yang memenuhi kriteria poin F
riteria Pasar Aman meliputi :

1. *Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya*
2. *Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta*
3. *Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya*

Sasaran 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BBPOM di Makassar

Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan BBPOM di Makassar yang optimal di Provinsi Sulawesi Selatan diukur dengan 2 Indikator sebagai berikut

1. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Pada sasaran strategis keenam Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan dua indikator tersebut semua indikator tersebut mencapai target yang diperjanjikan untuk triwulan II Tahun 2021.

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Standar adalah : Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP .

Tools

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Pada triwulan II Tahun 2021 BBPOM di Makassar telah berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 45,88 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%
B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II Tahun 2021

Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II Tahun 2021 adalah 137,45 % dengan realisasi sebesar 45,88 % Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Tabel 3.35
Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standard triwulan II Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	30	45,88	152,92	Tidak dapat disimpulkan

Hasil perhitungan diperoleh dari Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar sebanyak 807 sampel dan Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar sebanyak 604 terhadap Jumlah target sampel Obat selama tahun 2021 sebesar 1.803 Sampel Obat mencakup (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik)

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = A + B / 2

A = (Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

B = (Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Jumlah sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar terdiri dari komoditi Obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.36

Jumlah sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II Tahun 2021

Komoditi	diperiksa	diuji
Obat	272	280
Obat Tradisional	193	209
Suplemen Kesehatan	58	62
Kosmetik	267	239
Total	**790**	**790**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian triwulan II Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.37. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Makassar triwulan II Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2021.

Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan II Tahun 2020	15	12,36	82,40	Cukup
Triwulan II Tahun 2021	30	45,88	152,92	Tidak dapat disimpulkan

Terdapat peningkatan realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Makassar triwulan II tahun 2021 dibanding triwulan I Tahun 2021 dari nilai 82,40 menjadi 152,92 capaiannya mengalami peningkatan 70,52 point, pada kategori Tidak dapat disimpulkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2021 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.38 Perbandingan realisasi Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target triwulan II 2021	Target 2024	Realisasi triwulan II 2021	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	30	90	45,88	50,97	Kurang

indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2021 **tidak dapat dibandingkan** dengan target Renstra tahun 2024, karena target triwulan II Tahun 2021 merupakan tahapan nilai rata-rata sampai dengan akhir tahun 2021. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat lebih meningkat menjadi kategori Sangat Baik

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar kategori tidak dapat disimpulkan antara lain :

- Jumlah sampel yang disampling sampai dengan triwulan kedua sudah mencapai 790 (47,94 %) dari target sampel setahun sebanyak 1648.
- Pengaturan sistem piket staf pengujian WFH-WFO sebesar 75% pada bulan April - Mei dan WFO 100% dengan tetap menjaga protokol Kesehatan
- Di masa pandemi covid-19 ini BBPOM Makassar tetap berupaya untuk meningkatkan keberhasilan dalam pengujian sampel makanan dengan tetap menerapkan sistem manajemen mutu, pengujian sesuai parameter uji yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan time line pengujian serta meningkatkan kompetensi melalui pelatihan online/webinar/ seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal.
- Adanya kebijakan dari P3OMN mengenai pedoman sampling acak yang memungkinkan pengambilan sampel pada saat belum tersedia reagen, baku pembanding atau bahkan metode analisa dengan mulai menghitung waktu timeline sejak seluruh kebutuhan untuk pengujian telah tersedia
- Kompetensi analis dalam melakukan parameter uji sesuai yang ditetapkan dalam pedoman sampling juga merupakan penyebab keberhasilan pencapaian target

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dilakukan dengan pemenuhan baku pembanding, reagensia/media, ketersediaan metode analisa, dan pengaturan jadwal pengujian mengingat saat ini masih dalam masa pandemi
- Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat meningkat

e. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM Makassar untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- Selama masa pandemi, seluruh kegiatan bimtek internal yang direncanakan pada tahun 2021 oleh oleh BBPOM di Makassar ditiadakan, namun kegiatan pengembangan kompetensi tetap dilakukan dengan mengikuti berbagai pelatihan secara daring maupun luring baik yang diselenggarakan oleh PPPOMN maupun oleh pihak lain seperti Univeritas dan Provider Pelatihan. Tidak adanya Bimtek internal cukup berpengaruh khususnya untuk menerapkan metode analisis baru yang belum pernah dilakukan.
- Program evaluasi kinerja laboratorium melalui Program Uji Profisiensi, Uji Kolaborasi dan Uji Banding baik dari provider internal oleh P3OMN Badan POM RI maupun dari eksternal telah dilaksanakan oleh Laboratorium BBPOM di Makassar. Uji Profisiensi telah diikuti oleh seluruh laboratorium Bidang Pengujian dengan hasil inlier (memuaskan).
- Memastikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dilakukan dengan Verifikasi Metode Analisa
- Upaya penjaminan peralatan/instrumen yang digunakan dalam uji memberikan hasil pengukuran sesuai telah dilakukan dengan kalibrasi baik internal oleh P3OMN maupun oleh pihak eksternal
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 merupakan pengakuan terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian, pada tahun 2020 telah dilaksanakan audit pemenuhan ISO 9001:2015 dan persiapan reakreditasi ISO 17025:2017
- Pemanfaatan Alat Sarana Prasarana laboratorium serta manajemen penjadwalan WFO WFH yang optimal memberikan pengaruh pada ketercapaian target kinerja mengingat beberapa staf pengujian juga menjadi penguji sampel Covid.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya perbaikan pelayanan publik BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :
Berdasarkan evaluasi sebelumnya, telah dilakukan usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dengan pemenuhan baku pembanding dan reagensia/media melalui optimalisasi anggaran yang ada. Selain itu, untuk menyelesaikan semua target pengujian sampel juga dilakukan pengaturan jadwal WFO dan WFH bagi penguji secara fleksibel dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan capaian yang tidak dapat disimpulkan pada triwulan II Tahun 2021, maka perlu dilakukan review terhadap target indikator pada tahun 2022 disesuaikan dengan pedoman sampling yang baru. Untuk tahun 2022 juga telah dianggarkan pembelian baku pembanding, serta perencanaan pengadaan reagen dan Bimtek Internal untuk memfasilitasi metode analisis baru yang belum dikuasai.

2. Persentase Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Standar adalah : Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP .

Tools

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Pada triwulan II Tahun 2021 BBPOM di Makassar telah berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 45,88 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan Diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

A = (Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel makanan) x 100%
B = (Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel makanan) x 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi. Triwulan II Tahun 2021

Capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II Tahun 2021 adalah 175,64 % dengan realisasi sebesar 35,13 % Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

Tabel 3.39

Capaian Kinerja Indikator Persentase pemenuhan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standard triwulan II Tahun 2021.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	35,13	175,64	Tidak Dapat disimpulkan

Hasil perhitungan diperoleh dari Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 372 sampel dan Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar sebanyak 349 terhadap Jumlah target sampel Makanan selama Tahun 2021 sebesar 1267 Sampel Makanan mencakup (segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman)

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = A + B / 2

A = (Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%

B = (Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%

Makanan yang dimaksud mencakup Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, serta Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium

Jumlah sampel Makanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.40

Jumlah sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II Tahun 2021

Komoditi	diperiksa	diuji
Makanan	372	349
Total	**372**	**349**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian triwulan II Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.41. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standa BBPOM di Makassar triwulan II Tahun 2021 dengan triwulan II Tahun 2020

Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan I Tahun 2021	10	13,49	134,90	Tidak Dapat disimpulkan
Triwulan II Tahun 2021	20	35,13	175,64	Tidak Dapat disimpulkan

Terdapat peningkatan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja BBPOM di Makassar triwulan II tahun 2021 dibanding triwulan II Tahun 2012 dari nilai 134,90 menjadi 175,64, capaiannya mengalami peninngkatan 40,74 point, pada kategori Tidak dapat disimpulkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.42. Perbandingan realisasi Indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target triwulan II 2021	Target 2024	Realisasi triwulan II 2021	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	85	35,13	41,32	Kurang

indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2021 **tidak dapat dibandingkan** dengan target Renstra tahun 2024, karena target triwulan II Tahun 2021 merupakan tahapan nilai rata-rata sampai dengan akhir tahun 2021. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat lebih meningkat menjadi kategori Sangat Baik

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar kategori tidak dapat disimpulkan antara lain :

- Jumlah sampel yang disampling sampai dengan triwulan kedua sudah mencapai 372 (29,36 %) dari target sampel setahun sebanyak 1.267.

- Pengaturan sistem piket staf pengujian WFH-WFO sebesar 75% pada bulan April - Mei dan WFO 100% dengan tetap menjaga protokol Kesehatan
- Di masa pandemi covid-19 ini BBPOM Makassar tetap berupaya untuk meningkatkan keberhasilan dalam pengujian sampel makanan dengan tetap menerapkan sistem manajemen mutu, pengujian sesuai parameter uji yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan time line pengujian serta meningkatkan kompetensi melalui pelatihan online/webinar/ seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal.
- Adanya kebijakan dari P3OMN mengenai pedoman sampling acak yang memungkinkan pengambilan sampel pada saat belum tersedia reagen, baku pembanding atau bahkan metode analisa dengan mulai menghitung waktu timeline sejak seluruh kebutuhan untuk pengujian telah tersedia
- Kompetensi analis dalam melakukan parameter uji sesuai yang ditetapkan dalam pedoman sampling juga merupakan penyebab keberhasilan pencapaian target

- Sejak awal triwulan II Tahun 2020 sampai dengan saat ini triwulan II Tahun 2021 kegiatan sampling dan pengujian masih terhambat dengan adanya pandemi Covid- 19. Dengan kondisi pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhir terdapat protokol yang harus di patuhi seperti pembatasan jumlah staf yang hadir perhari.

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dilakukan dengan pemenuhan baku pembanding, reagensia/media, ketersediaan metode analisa, dan pengaturan jadwal pengujian mengingat saat ini masih dalam masa pandemi
- Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian makanan meningkat.

g. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM Makassar untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- Selama masa pandemi, seluruh kegiatan bimtek internal yang direncanakan pada tahun 2021 oleh BBPOM di Makassar ditiadakan, namun kegiatan pengembangan kompetensi tetap dilakukan dengan mengikuti berbagai pelatihan secara daring maupun luring baik yang diselenggarakan oleh PPPOMN maupun oleh pihak lain. Tidak adanya Bimtek internal cukup berpengaruh khususnya untuk menerapkan metode analisis baru yang belum pernah dilakukan.
- Program evaluasi kinerja laboratorium melalui Program Uji Profisiensi, Uji Kolaborasi dan Uji Banding baik dari provider internal oleh P3OMN Badan POM RI maupun dari eksternal telah dilaksanakan oleh Laboratorium BBPOM di Makassar. Uji Profisiensi telah diikuti oleh seluruh laboratorium Bidang Pengujian dengan hasil inlier (memuaskan).
- Memastikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dilakukan dengan Verifikasi Metode Analisa
- Upaya penjaminan peralatan/instrumen yang digunakan dalam uji memberikan hasil pengukuran sesuai telah dilakukan dengan kalibrasi baik internal oleh P3OMN maupun oleh pihak eksternal

- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 merupakan pengakuan terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian, pada tahun 2021 telah dilaksanakan audit pemenuhan ISO 9001:2015 dan persiapan reakreditasi ISO 17025:2017
- Pemanfaatan Alat Sarana Prasarana laboratorium serta manajemen penjadwalan WFO WFH yang optimal memberikan pengaruh pada ketercapaian target kinerja mengingat beberapa staf pengujian juga menjadi penguji sampel Covid.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya perbaikan pelayanan publik BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :
Berdasarkan evaluasi sebelumnya, telah dilakukan usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dengan pemenuhan baku pembanding dan reagensia/media melalui optimalisasi anggaran yang ada. Selain itu, untuk menyelesaikan semua target pengujian sampel juga dilakukan pengaturan jadwal WFO dan WFH bagi penguji secara fleksibel dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan capaian yang tidak dapat disimpulkan pada triwulan II tahun 2021, maka perlu dilakukan review terhadap target indikator pada tahun 2022 disesuaikan dengan pedoman sampling yang baru. Untuk tahun 2021 juga telah dianggarkan pembelian baku pembanding, serta perencanaan pengadaan reagen dan Bimtek Internal untuk memfasilitasi metode analisis baru yang belum dikuasai.

Sasaran 7

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Tools **Dihitung berdasarkan nilai tingkat keberhasilan**

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Makanan dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.
Tahapan Penindakan antara lain:

a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Pada triwulan II Tahun 2021 BBPOM di Makassar belum berhasil meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Makanan dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan belum tercapainya indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Makanan dan Makanan dengan capaian 23,33 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a. **SPDP** sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
b. **Tahap I** sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
c. **P21** sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
d. **Tahap 2** sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan OM =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{Jumlah\ capaian}{Target\ perkara}$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II Tahun 2021

Capaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Makanan dan Makanan triwulan II Tahun 2021 adalah 116,45 % dengan realisasi sebesar 50,07% perkara yang diselesaikanI d wilayah kerja BBPOM di Makassar. Diatas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 43 % dengan kriteria Sangat Baik

Tabel 3.43

Capaian Kinerja Indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Makanan dan Makanan triwulan II Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Makanan dan Makanan	43	50,07	116,45	Sangat Baik

Hasil perhitungan diperoleh dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara pada tabel berikut :

Tabel 3.44

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan II Tahun 2021

UPT		Tahapan	s.d TW II (Jan - Juni)										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
Makassar	Makassar	SPDP	12	3			1,00		0,15	15,00%	75,11%	66,67%	50,07%
		Tahap I			4	0	1,00	0,30	0,4	40,00%			
		P21			1	3	0,43	0,30	0,3	16,81%			
		Tahap II			2	0	0,29	0,00	0,15	3,30%			
		Total	12	3	7	3							
	Kota Palopo	SPDP		0			0		0,15	0,00%	0,00%	0	0,00%
		Tahap I					0	0	0,4	0%			
		P21					0	0	0,3	0%			
		Tahap II					0	0	0,15	0%			
		Total	0	0	0	0							
	-	SPDP		0			0		0,15	0,00%	0,00%	0	0,00%
		Tahap I					0	0	0,4	0%			
		P21					0	0	0,3	0%			
		Tahap II					0	0	0,15	0%			
		Total	0	0	0	0							
	TOTAL	SPDP	12	3	0		1,00		0,15	15,00%	75,11%	66,67%	50,07%
		Tahap I			4	0	1,00	0,30	0,4	40,00%			
		P21			1	3	0,43	0,30	0,3	16,81%			
		Tahap II			2	0	0,29	0,00	0,15	3,30%			
		Total	12	3	7	3				0%			

d. Perbandingan Realisasi dan Capaian triwulan II Tahun 2021 dengan triwulan I Tahun 2021

Tabel 3.45. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Makassar triwulan II Tahun 2021 dengan triwulan II Tahun 2020

Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
Triwulan I Tahun 2021	33	23,33	70,70	Cukup	23,33
Triwulan II Tahun 2021	43	50,07	116,45	Sangat Baik	23,33

Terdapat peningkatan realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan II tahun 2021 dibanding triwulan I Tahun 2021 dari nilai 70,70 menjadi 116,45 capaiannya mengalami peninngkatan 45,75 point, pada kategori sangat baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2021 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.46. Perbandingan realisasi Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan II Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target triwulan II 2021	Target 2024	Realisasi triwulan II 2021	% Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	43	90	50,07	55,63	Kurang

indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun **2021 tidak dapat dibandingkan** dengan target Renstra tahun 2024. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat lebih meningkat menjadi kategori Sangat Baik

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor pendukung ketercapaian kinerja dan alternatif solusi

Faktor pendukung :

- koordinasi lintas sektor, melalui: Penandatanganan perjanjian kerjasama/MoU antara Balai Besar POM di Makassar dengan lintas sektor terkait (Bea cukai, Kepolisian dan Kejaksaan)
- Meningkatnya kompetensi PPNS dalam menyelesaikan berkas perkara.
- Hubungan kerjasama antara penyidik Balai Besar POM dengan jaksa penuntut umum sehingga perkara dapat diselesaikan sampai tahap 2.
- Adanya UU Cipta Kerja yang mengubah unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pada UU Kesehatan dan UU Pangan yang dulunya Sediaan farmasi dan Pangan harus memiliki izin edar dan dengan adanya UU Cipta Kerja berubah harus memiliki Perizinan Berusaha
- SKEP PPNS belum memiliki kewenangan terhadap UU Cipta Kerja
- Informasi pengiriman Paket obat dari Direktorat Intelejen Badan POM yang segera ditindaklanjuti oleh PPNS BBPOM di Makassar, sehingga menjadi berkas perkara.

- Pihak Expedisi yang dipakai oleh pengirim paket sangat kooperatif dengan BBPOM di Makassar, sehingga sangat membantu tertangkapnya penerima paket obat.
- Mempelajari berkas-berkas sebelumnya yang berkaitan dengan paket obat-obat tertentu terutama dalam hal pemenuhan pasal.
- Sebagian besar Tersangka kooperatif sehingga tahap II dapat dilaksanakan dengan baik.

Alternatif Solusi :

- Koordinasi yang secara kontinu dan berkelanjutan dengan lintas sektor terkait, utamanaya dengan kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan kejaksaan
- Perkuatan kompetensi SDM Bidang Penindakan
- Pada UU No. 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan, PPNS tidak mempunyai kewenangan penggeledahan, sehingga sehingga BBPOM Makassar harus bekerja sama dengan korwas PPNS Polda Sulawesi-Selatan untuk melakukan penggeledahan. Hal tersebut dapat mengakibatkan pengembangan perkara tidak maksimal.

d. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Meningkatkan komunikasi dengan kelompok substansi Infokom dan kelompok substansi Pemeriksaan (pihak internal) BBPOM di Makassar terkait informasi awal adanya dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan.
- Memperdalam investigasi sehingga mendapatkan data dan fakta lapangan yang memperkuat dan menunjang dalam proses penindakan, penyidikan dan pemberkasan.
- Melakukan pengawasan daring / patroli siber untuk mengawasi dan menindaklanjuti penjualan obat dan makanan secara online yang tidak memenuhi syarat dan mengandung bahan berbahaya.
- Meningkatkan kompetensi PPNS BBPOM di Makassar.
- Memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan Criminal Justice System sehingga upaya pemberantasan kejahatan obat dan makanan dapat tertangani dengan lebih baik.
- Menjalin hubungan yang kontinyu dan berkelanjutan dengan informan yang berperan dalam menginformasikan adanya pelanggaran di bidang obat dan makanan.
- Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan proses pemberkasan perkara.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya perbaikan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan Korwas PPNS Polda Sulawesi Selatan semakin baik.
2. Koordinasi dengan pihak kejaksaan yang semakin baik, sehingga banyak perkara yang menjadi P-21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap) tanpa melalui P-19 (Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi) dan perkara yang carry over juga langsung P21 dan bisa dilanjutkan ke tahap II.
3. Meningkatkan dan memelihara hubungan kerjasama yang sudah terjalin baik dengan pihak-pihak yang berperan dalam upaya penyelidikan dan penyidikan adanya pelanggaran di bidang obat dan makanan, antara lain dengan pihak

Asperindo (Asosiasi Perusahaan Nasional Pengiriman dan Pengantaran Barang Indonesia), yaitu dengan perusahaan jasa ekspedisi.

4. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor pemerintah terkait dalam hal operasi bersama terkait penertiban Obat dan makanan ilegal yang selama ini sudah terjalin antara lain dengan adanya Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal, yang anggotanya dari berbagai lintas sektor antara lain Kejaksaan Tinggi Makassar, BNNP Makassar , Disperindag Provinsi Sulawesi Selatan, IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas dan Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar.

Sasaran 8

Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal

1. Indeks RB BBPOM di Makassar

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Acuan

Peratuan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
c. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

   Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

Tabel 3.47

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM :

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Tabel 3.48

Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Tabel 3.49

Target Kinerja Indikator Indeks RB BBPOM di Makassar triwulan II Tahun 2021

Indikator	Target triwulan II 2021	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks RB BBPOM di Makassar	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Pada triwulan II Tahun 2021, target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks RB BBPOM di Makassar .

Tidak ada Target Indeks Reformasi dan Birokrasi pada triwulan II Tahun 2021, dimana target akhir Tahun 2021 adalah 89 penilaian indeks RB yang dilakukan oleh Inspektorat Utama tahun 2020 sebesar 50,45 **belum mencapai** target dan capaian yang diperoleh kategori kurang, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2021 dapat tercapai

2. Nilai AKIP BBPOM di Makassar

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L).

Komponen

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja
5. Capaian Kinerja

Capaian indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar diperoleh berdasarkan hasil penilaian oleh Inspektorat Badan POM Pusat dengan menggunakan Lembar Kerja Elektronik terhadap dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM tahun n-1.

Penilaian AKIP terdiri dari 5 komponen penilaian, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
   - Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%)
   - Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2. Pengukuran Kinerja (25%), meliputi aspek:
   a. Pemenuhan pengukuran (5%)
   b. Kualitas Pengukuran (12,5%)
   c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%), meliputi aspek:
   a. Pemenuhan pelaporan (3%)
   b. Kualitas pelaporan (7,5%)
   c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal Kinerja (15%), meliputi aspek:
   a. Pemenuhan evaluasi (2%);
   b. Kualitas evaluasi (5%);
   c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%).
5. Pencapaian Kinerja (20%), meliputi aspek:
   a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%);
   b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%);
   c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%).

Tabel 3.50
Target Kinerja Indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar triwulan II Tahun 2021

Indikator	Target tw II Tahun 2021	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai AKIP BBPOM di Makassar	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat triwulan II tahun 2021, target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar .

Target indicator Nilai AKIP pada triwulan II Tahun 2021 belum ada penilaian, target akhir Tahun 2021 adalah 85. Penilaian Nilai AKIP BBPOM di Makassar yang dilakukan oleh Inspektorat Utama tahun 2020 sebesar 77,27 **belum mencapai** target dan capaian yang diperoleh kategori Baik,. masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2021 dapat tercapai.

Kendala /Keberhasilan pencapaian kinerja Nilai AKIP BBPOM di Makassar disebabkan oleh :

Pada tahun 2019, BBPOM di Makassar mendapatkan nilai AKIP BB, sehingga perlu beberapa upaya konkrit untuk mencapai target nilai A. Berdasarkan rekomendasi dari APIP terhadap implementasi SAKIP BBPOM di Makassar pada tahun 2019 maka tealah dilakukan perbaikan di tahun 2021 berupa: penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 berdasarkan Renja, menyusun SKP secara cascading dari eselon 2, eselon 3, eselon 4 hingga ke individu, evaluasi kinerja secara rutin setiap bulan, penyusunan draft Renstra 2020-2024, pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan yang berdasarkan Balance Scorecard dan pengukuran kinerja cascading dari pejabat eselon 2 di BBPOM di Makassar hingga pejabat eselon 3 dan 4, mengintegrasikan e-performance dengan aplikasi e-SKP yang merupakan pengukuran kinerja individu, revisi SOP mikro monitoring dan evaluasi, penyusunan Perjanjian Kinerja individu bagi seluruh pegawai berdasarkan cascading kinerja, mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi serta menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata dan memanfaatkannya untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang yang dituangkan didalam laporan evaluasi internal setiap triwulan serta penyusunan laporan kinerja interim setiap triwulan. Penilaian mandiri evaluasi SAKIP BBPOM di Makassar telah dilakukan pada bulan Maret 2021 pada aplikasi simolekdesi.

Renstra 2020-2024 telah selesai disusun pada triwulan III tahun 2020, didalamnya telah memuat beberapa perubahan kebijakan dan perubahan pengukuran indikator hasil evaluasi kinerja tahun 2020 yang diharapkan dapat mengukur kinerja secara lebih tepat. Penyesuaian dokumen PK, RAPK, RKT,dan IKU berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 juga telah diselesaikan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja Nilai AKIP BBPOM di Makassar adalah:

Berdasarkan evaluasi setiap triwulan, telah dilakukan perbaikan secara bertahap sesuai rekomendasi APIP atas implementasi SAKIP 2019. Sedangkan hasil rekomendasi APIP atas impelementasi SAKIP BBPOM di Makassar tahun 2020 akan diterapkan di tahun 2021 sebagai upaya perbaikan kinerja dan meningkatkan nilai sesuai target Renstra dan Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

Berdasarkan rekomendasi Inspektorat , BBPOM di Makassar akan melakukan perbaikan sebagai berikut:

a. Perencanaan

   Mencantumkan sub kegiatan/ komponen secara rinci pada dokumen RENSTRA 2020-2024 yang akan di review dalam rencana aksi untuk memastikan bahwa program/ kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan.

b. Pengukuran

   i. Menyelaraskan petapkan target kinerja atas perjanjian kinerja eselon Ill dan IV sampai ke tingkat individu, serta menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai;

   ii. Melakukan pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit sebagai dasar pemberian reward and punishment;

   iii. Membuat SOP dan mekanisme pengumpulan data kinerja secara transparan dan akuntabel

c. Pelaporan

   i. Menyajikan pembandingan realisasi atau capaian tahun berjalan dengan target IKU Badan POM, realisasi atau capaian tahun berjalan dengan capaian satker lain yang memiliki indikator sejenis;

   ii. Analisis efisiensi pengukuran kinerja kegiatan per sasaran;

   iii. Memanfaatkan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja.

d. Evaluasi Internal

   i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.

   ii. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan.

e. Capaian Kinerja

   i. Melakukan pengawalan terhadap pencapaian target indikator yang capaiannya masih dibawah target yang telah ditetapkan;

   ii. Membuat sistem informasi kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan yang valid dan didukung dengan sumber data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur.

Sebagai upaya pencapaian indikator Nilai AKIP di lakukan berbagai upaya sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP) sesuai dengan hasil rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat yaitu Melakukan perbaikan, menyampaikan dan mensosialisasikan kepada seluruh komponen penanggung jawab bidang masing-masing atas saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah di BBPOM Makassar sehingga permasalahan dapat terdeteksi lebih dini dan dapat diatasi lebih cepat.
2. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pertemuan penyusunan Lapkin dan Laptah serta rapat evaluasi nasional.

Sasaran 9

Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal

1. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan

Acuan

Peratuan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 tahun 2018 Tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatusr Sipil Negara

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Form Survei dian survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);

b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);

c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan

d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;

b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;

c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;

d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan

e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah. Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);

b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);

c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan

d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;

b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;

c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;

d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan

e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Tabel 3.51

Target Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar triwulan II Tahun 2021

Indikator	Target tw II Tahun 2021	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	-	-	-	-

Target indicator Indeks Profesionalitas ASN pada triwulan II Tahun 2021 belum ada penilaian, dimana target akhir Tahun 2021 adalah 77. Penilaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar yang dilakukan oleh Biro Umum dan SDM tahun 2020 sebesar 73,49 **belum mencapai** target dan capaian yang diperoleh kategori Baik. masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2021 dapat tercapai.

Sasaran 10

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai asesment Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Acuan

Perhitungan Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembanagan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3: Optimal

1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75: Sangat Kurang

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Standar Ruang Lingkup > 65,
2. Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
3. Standar Alat Laboratorium > 70.

Tabel 3.52

Target Kinerja Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP triwulan II Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-

Target indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada triwulan II Tahun 2021 belum ada penilaian, dimana target akhir Tahun 2021 adalah 79. Penilaian indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP BBPOM di Makassar yang dilakukan oleh P3OMN tahun 2020 sebesar 70,60 **belum mencapai** target dan capaian yang diperoleh kategori cukup. masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2021 dapat tercapai.

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal

BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

Acuan

Perhitungan Diperoleh dari Nilai Asesmen
Pusat Data dan Informasi Nasional

Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3	**: Optimal**
1,51 – 2,25	**: Cukup**
0,76 – 1,5	**: Kurang Optimal**
0 – 0,75	**: Sangat Kurang**

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1) Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC
   a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
   b. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
   c. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan makanan dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan makanan dan makanan oleh pimpinan
   d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut:
   a. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracuanan
   b. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
   a. Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
   b. Pusat : email dan dashboard BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Tabel 3.53
Target Kinerja Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal triwulan II Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2	1,63	81,25	Cukup

Target indicator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal pada triwulan II Tahun 2021 belum ada penilaian, dimana target akhir Tahun 2021 adalah 2. Penilaian Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal BBPOM di Makassar yang dilakukan oleh Pusdatin tahun 2020 sebesar 1,32 **belum mencapai** target dan capaian yang diperoleh kategori cukup. masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2021 dapat tercapai pada triwulan kedua.

Sasaran 11

Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel

1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/ UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Acuan

Hasil perhitungan diperoleh dari penjumlahan nilai (EKA) bobot 60 % dengan Nilai (IKPA) bobot 40 %

a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/ UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluas iKinerja Anggaran (EKA).

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

c. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

   a. Revisi DIPA
   b. DeviasiHalaman III DIPA
   c. Pengelolaan UP
   d. Rekon LPJ Bendahara
   e. Data Kontrak
   f. PenyelesaianTagihan
   g. PenyerapanAnggaran
   h. Retur SP2D
   i. Perencanaan Kas (Renkas)
   j. Pengembalian/Kesalahan SPM
   k. DispensasiPenyampaian SPM
   l. Pagu Minus
   m. Konfirmasi Capaian Output

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II Tahun 2021

Capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar triwulan II Tahun 2021 adalah 100,08 % dengan realisasi sebesar 93,07 %, diatas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 93 dengan kriteria Baik.

Tabel 3.54

Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar triwulan II Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	50	67,89	135,79	Tidak dapat disimpulkan

Hasil perhitungan diperoleh dari penjumlahan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 60 % dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40 %

Tabel 3.55

Jumlah Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar triwulan II Tahun 2021

Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	Bobot	Hasil
EKA	53,35	60%	32,01
IKPA	89,71	40%	35,88
Total		100%	**67,89**

Jumlah Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar triwulan II Tahun 2021 sebesar 68,10 terdiri atas :

- Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 60 % = 32,01
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40 % = 35,88

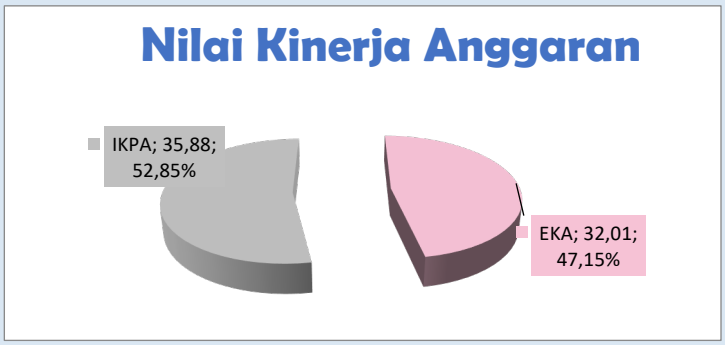

Gambar 3.36

Nilai Kinerja Anggaran pada triwulan II Tahun 2021

a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai IKPA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk IKPA, antara lain :

revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP, rekon LPJ bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas (Renkas), pengembalian/kesalahan SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, konfirmasi capaian *output*.

Menindaklanjuti perkembangan pelaksanaan anggaran belanja K/L saat ini serta sebagai bentuk relaksasi kebijakan penilaian IKPA belanja K/L triwulan II Tahun 2021 dalam rangka mendukung kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran K/L untuk percepatan penanganan Covid-19, Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) triwulan II Tahun 2021 pada Aplikasi OM-SPAN sebesar 89,71

b. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi.

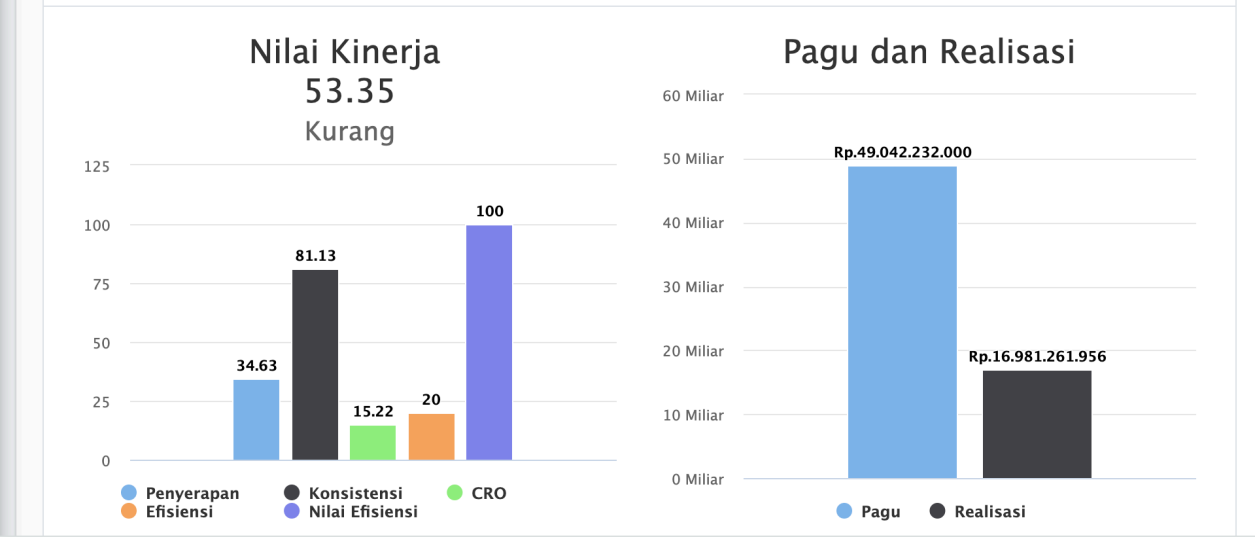

Gambar 3.37

Dashboard BBPOM Makassar Monev DJA triwulan II Tahun 2021

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BBPOM di Makassar triwulan II tahun 2021 yaitu pada angka 53,70

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian triwulan II Tahun 2021 dengan triwulan II Tahun 2021

Tabel 3.57. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar triwulan II Tahun 2021 dengan triwulan II Tahun 2020

Indikator Nilai Kinerja Anggaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan II Tahun 2020	30	36,96	123,20	Tidak dapat disimpulkan
Triwulan II Tahun 2021	50	67,89	135,79	Tidak dapat disimpulkan

Terdapat peningkatan realisasi Nilai Kinerja Anggaran triwulan I tahun 2021 dibanding triwulan II Tahun 2021 dari nilai 123,20 menjadi 135,79 capaiannya mengalami peningkatan 12,59 point, pada kategori tidak dapat disimpulkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2021 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.58. Perbandingan realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran triwulan II Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target triwulan II 2021	Target 2024	Realisasi triwulan II 2021	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran	50	97	67,89	-	-

Capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran triwulan II tahun 2021 **tidak dapat dibandingkan**. Serta diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat lebih representatif menjadi kategori Sangat Baik.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar disebabkan oleh :

a. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BBPOM di Makassar triwulan II Tahun 2021 sebesar 53,35
   ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu
   Realisasi anggaran = 34,63
   Konsistensi RPD = 81,13
   Capaian keluaran kegiatan = 20
   Efisiensi = 100

b. Penyerapan anggaran BBPOM di Makassar pada triwulan II tahun 2021 sebesar Rp 16.028.159.506,- (32,68 %) terhadap pagu anggaran sebesar Rp. 49.042.232.000,- dan masih dibawah dari target minimal penyerapan anggaran Satker/Eselon I/KL pada triwulan II Tahun 2021 sebesar 40 %.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar adalah :

- Menyusun secara teliti dan realistis dan mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA serta meningkatkan capaian output kegiatan BBPOM di Makassar.
- Melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk kegiatan-Prioritas Nasinal serta Penanganan pandemi akibat Covid-19
- Meningkatkan serapan anggaran melalui monitoring kegiatan dan anggaran secara lebih intens;
- Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D;
- Melakukan ralat dokumen realisasi belanja (SPM) terhadap belanja penanganan pandemi Covid-19 yang tidak menggunakan akun-akun khusus Covid-19;
- Memaksimalkan capaian output kegiatan dan capaian indikator kinerja kegiatan Balai Besar POM di Makassar;.
- Melakukan perhitungan kebutuhan anggaran dalam mencapai kinerja untuk periode tahun ketiga Renstra 2020-2024
- Meminimalisasi angka revisi POK/DIPA dengan melakukan perencanaan penggunaan anggaran dengan baik;
- Meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) terutama untuk IKK yang tidak mencapai 100% dari target.

e. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Kegiatan yang telah dilaksanakan di triwulan II tahun 2021 untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai kinerja anggaran adalah pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan koordinasi serta konsultasi secara internal maupun stakeholder eksternal dalam hal ini adalah KPPN Makassar II dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan adanya kerja sama yang baik dengan stakeholder, maka permasalahan permasalahan keuangan yang dihadapi dapat segera diselesaikan dengan baik.
- Mengikuti Sosialisasi terkait IKPA dan EKA oleh DJPB dan KPPN
- Mengikuti Sosialisasi Peraturan Revisi Tahun 2021 oleh DJPB

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya perbaikan pelayanan publik BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan, maka disimpulkan bahwa rendahnya nilai kinerja anggaran pada triwulan II disebabkan oleh rendahnya penyerapan anggaran, maka telah dilakukan percepatan penyerapan anggaran pada

triwulan 3 dan 4, dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan oleh Kepala BBPOM di Makassar dan di masing-masing bidang untuk memastikan semua kegiatan terlaksana dan semua target tercapai, selain itu juga dilakukan revisi anggaran untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran, diantaranya revisi untuk penambahan pelaksanaan kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat.

- Realiasasi capaian per output kegiatan BBPOM di Makassar bisa tercapai sesuai dengan target yang direncanakan .

2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar

Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE)

Acuan

Perhitungan Diperoleh dari Nilai Asesmen
Pusat Data dan Informasi Nasional

a. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

b. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input

$$IE = \frac{\%\ capaian\ output}{\%\ capaian\ input}$$

c. Standar efisiensi (SE) adalah 1

d. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien.

1. Kriteria:
    1. Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
    2. Tidak efisien apabila TE<0 atau TE>1

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

1. 0 - 0,2 : 100% → Efisien
2. 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien
3. 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien
4. 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien
5. 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien
6. 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien
7. 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien
8. 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien
9. 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien
10. > 1,81 : 75% → Tidak Efisien

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II Tahun 2021

Capaian Nilai Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar triwulan II Tahun 2021 adalah 113,64 % dengan realisasi sebesar 100, diatas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 88,50 dengan kriteria sangat baik.

Tabel 3.59
Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Makassar triwulan II Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	88	100	113,64	Sangat Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari range nilai dari perbandingan indeks efisiensi terhadap standar efisiensi

Tabel 3.60.
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Makassar triwulan II Tahun 2021

Indikator Kinerja **Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran**	% Capaian	IE	SE	TE	Range
Input	32,68	1,15	1	0,15	**0 - 0,2: 100 % → Efisien**
Output	37,44				

Nilai tingkat efisiensi kegiatan BBPOM di Makassar pada triwulan II Tahun 2021 sebesar 100% (Efisien).

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.61 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Makassar triwulan I Tahun 2021 dengan triwulan II Tahun 2021

Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan I Tahun 2021	88	95	107,95	Baik
Triwulan II Tahun 2021	88	100	113,64	Sangat Baik

Terdapat peningkatan realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran triwulan I tahun 2021 dibanding triwulan II Tahun 2021 dari nilai 107,95 menjadi 113,64 capaiannya mengalami peninngkatan 5,69 point, pada kategori sangat baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2021 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.62. Perbandingan realisasi Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran triwulan II Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target triwulan II 2021	Target 2024	Realisasi triwulan II 2021	% Capaian	Kriteria
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	88	90	100	111,11	Sangat Baik

indikator Indeks Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran triwulan II Tahun 2021 **mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Sangat Baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tetap dipertahankan sebagai kategori Sangat Baik.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja realisasi anggaran disebabkan oleh :

Target efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Makassar sudah tercapai dan melebihi target. Hal ini disebabkan karena dari 28 indikator 10 indikator yang memiliki realisasi dibawah 100%, sisanya 18 indikator memiliki realisasi diatas 100%. Sedangkan realisasi anggaran dari 28 indikator 15 diantaranya diatas 90% dan dibawah 100% sedangkan 13 indikator sisanya berada dibawag 90 %, sehingga menghasilkan efisiensi karena dengan anggaran yang terbatas bisa menghasilkan output/outcome yang melebihi target. Hal-hal yang telah dilakukan untuk memastikan target 28 indikator tercapai adalah melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan secara rutin setiap triwulan dengan membahas pencapaian indikator, pencapaian output kegiatan dan pencapaian realisasi anggaran. Beberapa indikator yang mempunyai capaian jauh dibawah target dipantau secara intensif sejak triwulan 1 namun perlu pengawalan terhadap. Indicator yang capaianya cukup yaitu indicator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; Indeks RB UPT; Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dan Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal agar ke empat indicator ini kedepan capaiannya termasuk dalam kategori Baik .

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi;
2. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA;
3. Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D;
4. Melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19;
5. Melakukan revisi penghematan anggaran terkait pandemi Covid-19;
6. Menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja tahunan dengan mencantumkan subkegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja pada rencana aksi, yang diwujudkan dalam dokumen Plan of Action;
7. Mengoptimalkan hasil pelaporan kinerja dalam rangka perbaikan perencanaan yang mendukung tujuan dan sasaran organisasi untuk periode selanjutnya;
8. Memperkuat monitoring periodik terhadap capaian output, anggaran maupun capaian sasaran kegiatan serta rencana aksi nyata perbaikan atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kinerja;

e. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan adalah pertemuan dalam rangka evaluasi dan koordinasi yang dilaksanakan secara rutin setiap triwulan untuk mengatasi semua masalah yang menghambat dan memastikan semua kegiatan dapat terlaksana dan mencapai target yang telah ditetapkan.
- Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi;
- Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA;
- Pelaksanaan kegiatan/output dilaksanakan sesuai dengan target dan segera melakukan proses keuangan sehingga deviasi antara capaian output dan capaian anggaran tidak terlalu jauh;
- Melakukan revisi target output untuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya perbaikan efisiensi penggunaan anggaran BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan, maka rencana aksi yang telah dilakukan hingga tahun 2021 adalah melakukan pemantauan dan upaya upaya perbaikan kinerja pada indikator indikator yang mempunyai capaian jauh dibawah target agar efisiensi penggunaan anggaran dapat efisien.
2. Selain itu juga dilakukan revisi anggaran untuk mendukung pencapaian target indikator.
3. Mengikuti Sosialisasi Peraturan Revisi Tahun 2021 oleh DJPB
4. Melakukan Monitoring Evaluasi anggaran dan kinerja secara rutin
5. Menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja tahunan dengan mencantumkan subkegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja pada rencana aksi, yang diwujudkan dalam dokumen Plan of Action;

1) Realisasi Anggaran

Sesuai Surat Pengesahan DIPA No. SP DIPA - 063.01.2.432923/2021, Pagu anggaran pada DIPA awal yang diterbitkan per 23 Nopember 2019 sebesar Rp. **50.528.112.000**, dimana mengalami revisi APBNP tanggal 3 Juni 2021 mengalami penurunan anggaran menjadi Rp **49.042.232.000** sehingga -. Realisasi anggaran triwulan II Tahun 2021 adalah Rp. 16.028.159.506,- atau 32,68 %,. Jumlah Pagu Anggaan per jenis belanja beserta realisasinya pada triwulan II Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.63 di bawah ini

Tabel 3.63

Realisasi Anggaran Balai Besar POM di Makassar triwulan II Tahun 2021

No	Nama Satker	Ket	Jenis Belanja			Total
			Pegawai	Barang	Modal	
1	BALAI BESAR PENGAWAS	PAGU	18.025.725.000	22.467.060.000	8.549.447.000	**49.042.232.000**
		REALISASI	8.966.502.000	6.990.384.249	71.272.650	**16.028.159.506**

	MAKANAN DAN MAKANAN MAKASSAR	PERSENTASE	(49,74 %)	(31,11 %)	(0,83 %)	**(32,68 %)**
		SISA	9.059.222.393	15.476.675.751	8.478.174.350	**33.014.072.494**

Pengelolaan anggaran BBPOM di Makassar senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Makassar dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
b. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja.

Tabel 3.64
Data Sasaran Strategis dan Realisasi Penyerapan Anggaran triwulan II Tahun 2021 Balai Besar POM di Makassar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Volume			Anggaran		
				Target TW I	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	84,21	100,73	381.100.800	121.787.011	31,96
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	90,00	112,50	176.469.750	30.243.701	17,14
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6	100,00	119,62	95.275.200	30.446.753	31,96
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	89,16	111,45	58.823.250	10.081.234	17,14
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	-	-	-	139.350.000	0	0,00

3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	229.649.000	0	0,00
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	105.166.000	33.505.000	31,86
		8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	577.333.000	13.362.000	2,31
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	100,00	112,36	189.543.200	16.310.028	8,60
		10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	74,69	124,48	81.232.800	6.990.012	8,60
		11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	87,50	99,43	228.240.000	42.179.000	18,48

		12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	57,45	112,65	365.455.000	33.310.000	9,11
		13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	78,93	131,55	1.708.359.000	153.932.254	9,01
		14	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	99.720.000	4.250.000	4,26
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,87	-	-	3.396.344.000	0	0,00
		16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	-	-	-	798.340.000	0	0,00
		17	Jumlah desa pangan aman	-	-	-	913.058.000	0	0,00
		18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	-	4,00	-	503.990.000	13.550.000	2,69
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	12,49	83,27	461.440.000	0	0,00
		20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	12,23	122,30	529.370.000	11.090.640	2,10
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	33	35,00	106,06	1.336.127.000	51.140.000	3,83

8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	22	Indeks RB BBPOM di Makassar	-	-	-	19.782.351.000	4.183.837.411	21,15
		23	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	-	-	-	342.215.000	0	0,00
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	-	-	-	383.907.000	0	0,00
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	8.851.737.000	164.383.350	1,86
		26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	2	-	-	380.291.000	23.674.000	6,23
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	30	36,96	123,20	8.045.029.000	1.019.024.220	12,67
		28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	88,00	95,00	107,95	368.196.000	48.605.619	13,20
							50.528.112.000	**6.011.702.232**	**11,90**

Berdasarkan table 3.51, dapat dilihat bahwa persentase penyerapan anggaran yang paling besar adalah Sasaran Strategis pertama yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar yaitu pada Indikator Kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat dan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Makassar dengan persentase capaian yang sama yaitu 31,96. Sedangkan persentase penyerapan anggaran terendah adalah untuk sasaran kegiatan kedua, yaitu: Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Makassar dan untuk sasaran kegiatan kesembilan, yaitu: Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal dengan capaian 0 %

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\%\ Rencana\ Capaian\ Output}{\%\ Rencana\ Capaian\ Input} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika IE ≥ SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Tingkat Efisiensi Kegiatan

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Makassar triwulan II tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.65 . Nilai TE dan kategori efisiensi indikator kegiatan BBPOM Makassar triwulan II Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/ Output		Rata-rata % Capaian		IE	TE	Kategori	
			Input	Output				
1.	ADD Standarisasi Lembaga (Lembaga)	001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Laboratorium)	6,27	25,00	3,99	2,99	Tidak Efisien	75 %
2.	AEA Koordinasi (kegiatan)	001 Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh BB/BPOM (Laporan)	0,00	11,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien	75 %
3.	BAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan)	001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM (Keputusan)	9,21	5,00	0,54	-0,46	Tidak Efisien	75 %
4.	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Orang)	001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM (Orang)	0,43	14,69	33,96	32,96	Tidak Efisien	75 %
5.	BKB Pemantauan produk (laporan)	001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (Laporan)	8,09	25,00	3,09	2,09	Tidak Efisien	75 %
6.	BMB Komunikasi Publik (layanan)	001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM (Layanan)	0,00	3,85	0,00	-1,00	Tidak Efisien	75 %
7.	CAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)	001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Paket)	0,00	0,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien	75 %
8.	CAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)	002 Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (Paket)	0,00	0,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien	75 %
9.	CAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)	003 Layanan Prasarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia (Unit)	0,00	0,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien	75 %

10.	QCD Perkara Hukum Badan Usaha (Perkara)	U44 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR (Persen)	4,40	16,67	3,78	2,78	Tidak Efisien	75 %
11.	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (Sekolah)	0,00	0,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien	75 %
12.	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	002 Desa Pangan Aman (Desa)	0,00	0,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien	75 %
13.	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	003 Pasar aman dari bahan berbahaya (Pasar)	2,69	50,00	18,60	17,60	Tidak Efisien	75 %
14.	QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM (Persen)	3,25	3,35	1,03	0,03	Efisien	100 %
15	QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM (Persen)	16,23	7,95	0,49	-0,51	Tidak Efisien	75 %
16.	QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	008 Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM (Persen)	56,99	27,37	0,48	-0,52	Tidak Efisien	75 %
	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksaoleh BB/BPOM (Persen)	9,96	25,54	2,57	1,57	Tidak Efisien	80 %
	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM (Persen)	9,35	31,94	3,42	2,42	Tidak Efisien	75 %
	EAA Layanan Perkantoran (Layanan)	004 Layanan Perkantoran UPT (Layanan)	20,36	25,00	1,23	0,23	Efisien	95 %

Pada triwulan II Tahun 2021 BBPOM di Makassar melaksanakan 19 (sembilan belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil 2 kegiatan efisien yaitu Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM (Persen) dan Layanan Perkantoran UPT (Layanan). Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan adalah 0,03 . Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM (Orang) mempunyai TE tertinggi karena output sudah 14,69 % sesuai target dengan penyerapan anggaran rendah yaitu 0,43 %.

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) yang dimiliki BBPOM di Makassar belum mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Ke depan,

pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

Tingkat Efisiensi Indikator Kinerja

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

1) 0 - 0,2 : 100% à Efisien
2) 0,21 - 0,4 : 95% à Efisien
3) 0,41 - 0,6 : 92% à Efisien
4) 0,61 - 0,8 : 90% à Efisien
5) 0,81 - 1,0 : 88% à Efisien
6) 1,01 - 1,2 : 86% à Tidak Efisien
7) 1,21 - 1,4 : 84% à Tidak Efisien
8) 1,41 - 1,6 : 80% à Tidak Efisien
9) 1,61 - 1,8 : 78% à Tidak Efisien
10) > 1,81 : 75% à Tidak Efisien

Pada triwulan II Tahun 2021, Dari 28 dimana hanya 16 indikator yang memiliki target dan realisasi sedangkan 12 indikator lainnya target pada akhir tahun 2021, indikator yang mendukung pencapaian 11 sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Makassar, berdasarkan Tabel 5.13 terdapat 4 (empat) indikator kinerja triwulan II Tahun 2021 yang Tidak Efisien serta ada 12 indikator yang Efisien dengan Nilai TE yang diperoleh bervariasi antara 0,10 sampai 0,96. Nilai TE tertinggi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (TE = 0,96) dan Nilai TE terendah adalah Persentase Obat yang memenuhi syarat (TE = 0,10). Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Indikator Kinerja Utama Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan TE tertinggi karena efisiensi penggunaan anggaran jauh lebih kecil dibandingkan capaian output.

Tabel 3.66. Tingkat Efisiensi Anggaran untuk pencapaian Indikator Kinerja Balai Besar POM di Makassar triwulan II Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,30	100,73	1,10	1	EFISIEN	0,10
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	68,55	112,50	1,64	1	EFISIEN	0,64
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,30	119,62	1,31	1	EFISIEN	0,31
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68,55	111,45	1,63	1	EFISIEN	0,63
2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	5 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	0,00	-	-	1		
3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0,00	-	-	1		
	7 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	91,03	-	-	1		
	8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	15,43	-	-	1		
4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	9 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	57,37	112,36	1,96	1	TIDAK EFISIEN	0,96
	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57,37	124,48	2,17	1	EFISIEN	1,17
	11 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	52,80	99,43	1,88	1	EFISIEN	0,88

	12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,76	112,65	1,85	1	EFISIEN	0,85
	13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,07	131,55	2,19	1	EFISIEN	1,19
	14	Indeks Pelayanan Publik	28,41	-	-	1		
5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	0,00	-	-	1		
	16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	0,00	-	-	1		
	17	Jumlah desa pangan aman	0,00	-	-	1		
	18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	17,92	-	-	1		
6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0,00	83,27	-	1	EFISIEN	0,00
	20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	13,97	122,30	8,76	1	EFISIEN	7,76
7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25,52	106,06	4,16	1	EFISIEN	3,16
8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	22	Indeks RB BBPOM di Makassar	141,00	-	-	1		
	23	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	0,00	-	-	1		
9 Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	0,00	-	-	1		
10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	12,38	-	-	1		
	26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	41,50	-	-	1		
11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	84,44	123,20	1,46	1	EFISIEN	0,46
	28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	88,01	113,64	1,29	1	EFISIEN	0,29
Total			**77,42**	**98,33**	**1,27**	**1**	**EFISIEN**	**0,27**

Tabel 129. Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Balai Besar POM di Makassar triwulan II Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	% Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	111,07	Sangat Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	116,09	Sangat Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	-	-
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	102,78	Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	106,06	Baik
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	-	-
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	-	-
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	115,58	Sangat Baik

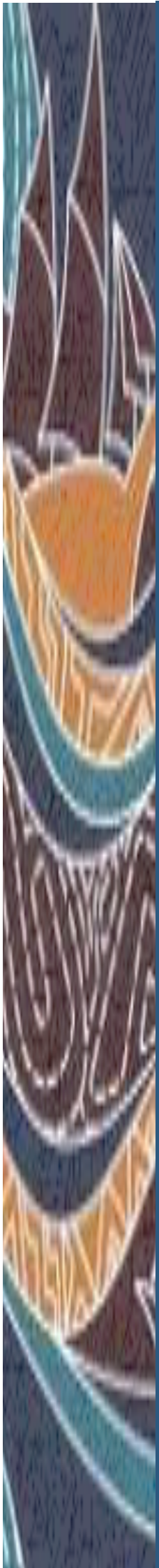

Bab IV

Penutup

a. Kesimpulan
b. Saran

Bab IV

Penutup

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2021 BBPOM di Makassar merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi melalui pencapaian sasaran strategis/kegiatan yang telah ditetapkan dan sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis BBPOM di Makassar tahun 2020-2024.

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan capaian sasaran, pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BBPOM di Makassar tahun 2020-2024 belum sepenuhnya dapat dicapai secara maksimal. Capaian kinerja organisasi sesuai penilaian 11 sasaran strategis yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2021 BBPOM di Makassar merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi melalui pencapaian sasaran strategis/kegiatan yang telah ditetapkan dan sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis BBPOM di Makassar tahun 2020-2024.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari periode Rencana Strategis 2020-2024. Tahun 2021 evaluasi didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2021 yang mengacu pada Renstra BBPOM di Makassar tahun 2020-2024 dan DIPA tahun 2021. Sementara dalam laporan Interim Triwulan III Tahun 2021 ini didasarkan pada target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Level II Kepala Balai Besar POM di Makassar Untuk menunjang pencapaian 11 sasaran strategis dan 28 indikator tersebut, telah dilakukan 19 kegiatan utama.

1. Dari 11 sasaran strategis diantaranya ada 5 sasaran strategis untuk penilaian Triwulan II Tahun 2021, diperoleh 1 sasaran strategis memperoleh capaian “Sangat Baik”dan 3 sasaran strategis memperoleh capaian “Baik”, 2 sasaran strategis memperoleh capaian “Tidak Dapat Disimpulkan” dan 1 ada sasaran strategis memperoleh capaian “Cukup”.
2. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

    - Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketujuh sebesar 116,26 % dengan kriteria “Sangat Baik ”, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Makassar pada Triwulan III tahun 2021;
    - Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 101,63 % dengan kriteria “Baik”, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Makassar pada Triwulan III Tahun 2021;
    - Capaian Indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 106,49 % dengan kriteria “Baik”, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar pada Triwulan III Tahun 2021;
    - Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesebelas sebesar 101,09 % dengan kriteria “Baik”, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam mengelola keuangan BBPOM di Makassar secara akuntabel pada Triwulan III Tahun 2021

- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesepuluh sebesar 87,50 % dengan kriteria "Cukup", menunjukkan belum berhasilnya BBPOM di Makassar terhadap Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan pada Triwulan III Tahun 2021
- Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 120,20 % dengan kriteria "Tidak dapat disimpulkan ", menunjukkan perlu reviu terhadap target untuk keberhasilan BBPOM di Makassar dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Makassar pada Triwulan III Tahun 2021;
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keenam sebesar 178,60 % dengan kriteria " Tidak Dapat disimpulkan", menunjukkan perlu reviu terhadap target untuk keberhasilan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Makassar pada Triwulan III Tahun 2021;
- Capaian indicator kinerja Utama sasaran strategis sasaran strategis kedelapan mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal; sasaran strategis kesembilan terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal belum ada target dan penilaian pada sasaran strategis tersebut pada Triwulan III Tahun 2021

3. Pada Triwulan III Tahun 2021 BBPOM di Makassar melaksanakan 19 (sembilan belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil 14 kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan adalah 0,03 – 0,91 . Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM mempunyai TE tertinggi karena output sudah 100 % sesuai target dengan penyerapan anggaran rendah yaitu 97,27 %.

4.2. SARAN

Sehubungan dengan capaian kinerja tersebut, BBPOM di Makassar terus melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan demi peningkatan kinerja BBPOM di Makassar untuk masa mendatang :

- Memperhatikan rekomendasi Inspektur Utama tentang hasil Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 dengan memanfaatkan pengukuran data kinerja sebagai acuan dalam memberikan *reward* dan *punishment* hingga tataran individu pegawai.
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan komprehensif atas rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja sehingga dapat memberikan alternative perbaikan.
- Dilakukan reviu untuk menaikkan target 3 indikator dengan capaian diatas 120% atau tidak dapat disimpulkan, yaitu indikator ke-13 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (136,87 %), indikator ke-19 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (146,35 %), indikator ke-20 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar (210,85 %),

- Perlu direncanakan upaya dan langkah-langkah nyata di tahun 2021 dengan memanfaatkan hasil evaluasi tahun 2020 serta hasil evaluasi Triwulan I dan II Tahun 2021 untuk mencapai target 10 indikator yang belum tercapai di tahun 2020 yaitu pada indikator ke-4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (99,26 %), indikator ke-6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan (99,40 %), indikator ke-9 keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (78,38 %), indikator ke-10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (94,38 %), indikator ke-14 Indeks Pelayanan Publik (99,15 %), indikator ke-22 Indeks RB BBPOM di Makassar (59,35 %), indikator ke-23 Nilai AKIP BBPOM di Makassar (95,40 %), indikator ke-24 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar (97,99 %), indikator ke-25 persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (89,59 %), dan indikator ke-26 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal (87,42 %).

Tabel 2.1

Pengukuran Kinerja Tahun 2021 Balai Besar POM di Makassar

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	77
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan	84,5
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	90
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Indeks Pelayanan Publik	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86.87
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	77
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	Indeks RB BBPOM di Makassar	89
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar	85

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPTBBPOM di Makassar	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di	88,5

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Balai Besar POM di Makassar Triwulan III Tahun 2021 dan Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target TW III	Target 2021
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6	83,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	80
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	77
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	84,5
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	72
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	-	90
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	60
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	88
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60
		Indeks Pelayanan Publik	3,76	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,87	86.87
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	-	40
		Jumlah desa pangan aman	-	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	-	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	60	86

Pengukuran Kinerja Balai Besar POM di Makassar Triwulan III Tahun 2021 dan Tahun 2021

	Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40	77
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50	73
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	Indeks RB BBPOM di Makassar	-	89
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar	-	85
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	-	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	79
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	2	2
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	75	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	88 (88%)	88 (88%)

BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

Jl. Baji Minasa No. 2 Makassar 90126, Telpon (0411) 872021, Fax. (0411) 873496
Email : bbpomdimakassar@gmail.com ; bpom_makasar@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM.
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Makassar
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K Lukito, M.C.P.
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 21 Desember 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dr. Penny K. Lukito, M.C.P.	Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM.

BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

Jl. Baji Minasa No. 2 Makassar 90126, Telpon (0411) 872021, Fax. (0411) 873496
Email : bbpomdimakassar@gmail.com ; bpom_makasar@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	01-Persentase obat yang memenuhi syarat	83,6
		02-Persentase makanan yang memenuhi syarat	80
		03-Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6
		04-Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	05-Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Makassar	77
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	06- Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84,5
		07- Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72
		08- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	09- Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		10- Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		11- Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		12- Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		13- Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		14- Indeks Pelayanan Publik	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di	15- Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,87

	wilayah kerja BBPOM di Makassar	16- Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		17- Jumlah desa pangan aman	12
		18- Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar.	19- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86
		20- Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	77
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	21- Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	22- Indeks RB BBPOM di Makassar	89
		23- Nilai AKIP BBPOM di Makassar	85
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	24- Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25- Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
		26- Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	27- Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	94
		28- Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	Efisien (88,5%)

Kegiatan	**Anggaran**
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp. 25.363.546.000
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp. 25.164.566.000

Makassar, 21 Desember 2020

Kepala Badan POM,

Dr. Penny K. Lukito, M.C.P.

Kepala Balai Besar POM di Makassar,

Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM.

BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

Jl. Baji Minasa No.2 Makassar 90126, Telp. (0411) 872021, Fax. (0411) 873496

email : bbpomdimakassar@gmail.com ; bpom_makasar@pom.go.id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
(BALAI BESAR/BALAI) PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60	83,60	83,60	83,60	381.100.800
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00	80,00	80,00	80,00	176.469.750
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,60	83,60	83,60	83,60	95.275.200
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,00	80,00	80,00	80,00	58.823.250
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	-	-	-	77,00	139.350.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat	-	-	-	84,50	229.649.000

	dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	dan Makanan					
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	72,00	105.166.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	-	-	-	90,00	577.333.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00	89,00	89,00	89,00	189.543.200
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00	60,00	60,00	60,00	81.232.800
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00	88,00	88,00	88,00	228.240.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00	51,00	51,00	51,00	365.455.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	60,00	60,00	1.708.359.000
		Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	3,76	99.720.000
5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi,	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,87	86,87	86,87	86,87	3.396.344.000

	Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	-	-	-	40	798.340.000
		Jumlah desa pangan aman	-	-	-	12	913.058.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	-	-	-	8	503.990.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	30	60	86	461.440.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	20	40	77	529.370.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	33	43	50	73	1.336.127.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Makassar yang optimal	Indeks RB BBPOM di Makassar	-	-	-	89,00	270.746.000
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar	-	-	-	85,00	342,215.000
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	-	-	-	77,00	19.895.512.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan	-	-	-	79,00	8.851.737.000

BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

Jl. Baji Minasa No.2 Makassar 90126, Telp. (0411) 872021, Fax. (0411) 873496

email : bbpomdimakassar@gmail.com ; bpom_makasar@pom.go.id

	pengawasan Obat dan Makanan	Makanan sesuai standar GLP					
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	2,00	2,00	2,00	2,00	380.291.000
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPTBBPOM di Makassar	30	50	75	94	8.045.029.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88,50)	368.196.000

Makassar, 21 DEC 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM

Lampiran 4

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021 TRIWULAN III
BBPOM DI MAKASSAR

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi	% Capaian	% Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	95,71	114,49	101,63	Baik
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	81,20	101,50		
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6	95,07	113,72		
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	61,44	76,80		
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-		
		8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	100,00	112,36	120,20	Tidak dapat disimpulkan
		10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	77,51	129,18		
		11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	90,81	103,19		
		12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	63,19	123,90		
		13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	82,12	136,87		
		14	Indeks Pelayanan Publik	3,76	4,35	115,69		
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan	86,87	92,51	106,49	106,49	Baik
		16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	-	63,33	63,33		
		17	Jumlah desa pangan aman	-	46,88	46,88		
		18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	-	52,50	52,50		
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	60	87,81	146,35	178,60	Tidak Dapat disimpulkan
		20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40	84,34	210,85		
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50	58,13	116,26	116,26	Sangat Baik
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	22	Indeks RB BBPOM di Makassar	-	-	-	-	-
		23	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	-	-	-		
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	-	-	-	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	87,50	Cukup
		26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	2	1,75	87,50		
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	75	74,93	99,91	101,09	Baik
		28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	88,00	90,00	102,27		

140,11

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021 TRIWULAN III
BBPOM DI MAKASSAR

No.	Sasaran Strategis	% Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	101,63	Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	120,20	Tidak dapat disimpulkan
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	106,49	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	178,60	Tidak Dapat disimpulkan
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	116,26	Sangat Baik
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	-	-
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	87,50	Cukup
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	101,09	Baik

Tabel 3.2
Capaian Kinerja BBPOM di Makassar Triwulan III Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian TW III
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60	95,71	114,49
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00	81,20	101,50
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,60	95,07	113,72
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,00	61,44	76,80
2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	5 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	-	-	-
3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan	-	-	-
	7 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-
	8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-
4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	9 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi	89,00	100,00	112,36
	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	60,00	77,51	129,18
	11 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00	90,81	103,19
	12 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00	63,19	123,90
	13 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	82,12	136,87
	14 Indeks Pelayanan Publik	3,76	4,35	115,69
5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	15 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,87	92,51	106,49
	16 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	-	63,33	63,33
	17 Jumlah desa pangan aman	-	46,88	46,88
	18 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	-	52,50	52,50
6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	19 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	60,00	87,81	146,35

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian TW III
pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	20 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40,00	84,34	210,85
7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	21 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50,00	58,13	116,26
8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	22 Indeks RB BBPOM di Makassar	-	-	-
	23 Nilai AKIP BBPOM di Makassar	-	-	-
9 Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	24 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	-	-	-
10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai	-	-	-
	26 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	2,00	1,75	87,50
11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	27 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	75,00	74,93	99,91
	28 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	88,00	90,00	102,27